



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEPENTINGAN CINA DALAM PENANDATANGANAN
CROSS STRAIT ECONOMIC COOPERATION FRAMEWORK
AGREEMENT DENGAN TAIWAN TAHUN 2010**

SKRIPSI

**AVINA NADHILA WIDARSA
0806352220**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
DESEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEPENTINGAN CINA DALAM PENANDATANGANAN
CROSS STRAIT ECONOMIC COOPERATION FRAMEWORK
AGREEMENT DENGAN TAIWAN TAHUN 2010**

SKRIPSI

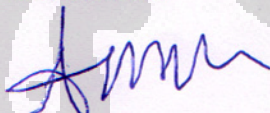
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional**

**AVINA NADHILA WIDARSA
0806352220**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
DESEMBER 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Avina Nadhila Widarsa
NPM : 0806352220
Tanda Tangan : 
Tanggal : 27 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Avina Nadhila Widarsa
 NPM : 0806352220
 Program Studi : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
 Judul Skripsi :

“Kepentingan Cina dalam Penandatanganan *Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement* Dengan Taiwan Tahun 2010”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Andi Widjajanto, M.Sc., M.S.	()
Sekretaris	: Aninda Tirtawinata, M.Litt.	()
Penguji Ahli	: Syamsul Hadi, Ph.D	()
Pembimbing	: Makmur Keliat, Ph.D	()

Ditetapkan di : Depok
 Tanggal : 11 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Economics is a critical component of Beijing's "New Security Concept," "win-win cooperation," and "comprehensive national power." Economics seems likely to continue to play an important role in China's pursuit of its strategic objectives. (New York: Public Affairs, 2006)

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, karunia, dan berkah-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang terang benderang. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Menjamurnya penandatanganan berbagai kesepakatan ekonomi seperti *free trade agreement* dan *preferential trade agreement* merupakan suatu tren akibat globalisasi di bidang ekonomi. Cina, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia selama dua dekade terakhir tentu saja tidak mau ketinggalan dari tren tersebut. Dalam memilih partner untuk kerjasama ekonomi, Cina tentu akan mempertimbangkan keluaran ekonomi yang didapatkan sekaligus hubungan politik yang telah terjalin selama ini. Menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam ketika akhirnya Cina menandatangani suatu kesepakatan ekonomi dengan Taiwan, wilayah yang selama ini menjadi buah simalakama bagi integritas teritorialnya.

Skripsi ini meneliti lebih jauh mengenai kepentingan Cina dalam penandatanganan kerangka kesepakatan kerjasama ekonomi lintas selat antara Cina dan Taiwan. Berbagai temuan yang penulis dapatkan dari berbagai sumber meyakinkan penulis bahwa penandatanganan kesepakatan ekonomi tersebut merupakan salah satu cara Cina untuk menormalisasikan hubungan politiknya dengan Taiwan. Tujuan utama Cina untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan tentu saja menjadi kepentingan politik yang paling tergambar dari kesepakatan ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan karya ini. Semoga penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik secara akademis maupun praktis.

Depok, 26 Desember 2011

Avina Nadhila Widarsa

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*, ucapan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, karunia dan nikmat yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Dalam proses penelitian maupun penulisan skripsi, banyak dukungan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Makmur Keliat, Ph.D selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia menjadi pembimbing dan telah membantu penulis sejak awal penulis menyampaikan ide, membuat proposal hingga akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi dengan lancar.
2. Syamsul Hadi, Ph.D selaku peguji ahli yang dengan baik memberikan saran serta masukan yang membangun bagi perbaikan skripsi ini.
3. Andi Widjajanto, M.A., M.Sc. selaku Ketua Program yang telah mengoreksi kesalahan metodologi dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan program percepatan SPM-Skripsi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan sarjana dalam waktu 3,5 tahun.
4. Suzie Sudarman, M.A., selaku pembimbing akademik penulis yang mendukung segala usaha penulis untuk dapat meraih masa depan yang lebih baik dan selalu menanamkan jiwa nasionalisme pada diri penulis.
5. Dwi Ardhanariswari, M.Phil selaku dosen pengajar SPM yang telah membantu penulis dalam membuat alur berpikir yang logis dan sistematis sebagai fondasi dasar bagi penulisan skripsi ini.
6. Keluarga penulis, Mama dan Bapak yang senantiasa memberikan kasih sayang sepanjang umur penulis, memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu dan meraih gelar sarjana secepat mungkin. Adik-adik penulis yang terkadang menyebalkan namun selalu mengingatkan penulis agar bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka. Nenek, yang selalu mendukung penulis untuk menjadi cucu yang terbaik. Tante Ira, Om Aulia, Om Ari, dan Om Eman yang senantiasa siap menyokong kebutuhan finansial penulis selama menempuh masa pendidikan. Bunda Eva yang terus mengingatkan penulis untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi di

luar negeri. Eyang kakung beserta Om dan Tante dari keluarga Bapak yang walaupun jarang bertemu namun tetap berusaha menjalin komunikasi di dunia maya. Para adik – adik sepupu yang penulis banggakan.

7. Teman – teman HI 08 yang tersayang, kepada Lesly yang telah memberikan ide bagi penulisan skripsi ini, Sri yang menjadi teman galau penulis sejak memutuskan untuk percepatan, Emir yang setia menjadi teman makan siang penulis selama pengerjaan skripsi khususnya, Yari yang sama-sama nekat ambil program percepatan, Ulpa dan Min Ah teman satu bimbingan penulis, Nico yang menjadi teman pada masa – masa awal kegalauan pasca SPM, Sorang, Deny dan Melissya teman – teman asdos yang sering mendengar keluh kesah penulis di jurusan. Teman – teman ekopolin Adi, Kun, Machfudz, Oka, Bombom, Weki, Nyunyu, Fadlin, Dwi, AJ, Kohar, Gya, Vivi, Yonathan dan Tulus yang pernah menjadi teman diskusi maupun teman sekelompok penulis. Teman – teman mastrans Riza, Nasrul, Raisa, Ipeh, Mita, Dafy, Yanti, Iqbal, Marga, TB, Adhy Eraldo dan Ria serta teman – teman pengstrat Aria, Dhani, Citra, Roby, Palar, Yusdam, Joan dan Gita, serta teman tanpa cluster Agung Pamungkas yang telah menjadi bagian dari hidup penulis selama 3,5 tahun di HI UI.
8. Para senior dan junior HI UI, khususnya angkatan 2007, 2009 dan 2010. Teman percepatan penulis Rain dan Naufal serta segenap senior yang mendukung persiapan penulis mengerjakan skripsi Daba, Erika, Tangguh dan Gera. Untuk Darang, Kiki, Ipeh, Afu, Aswin dan rekan – rekan 2009 yang selalu menyemangati penulis di UPDHI.
9. Mas Roni, Pak Dahlan, Mas Andre, Mbak Anin dan Mbak Ayu yang sigap membantu penulis di UPDHI dan jurusan.
10. Teman – teman seorganisasi dan seperjuangan di KSM Eka Prasetya UI 2011 (Fadlin, Dini, Tika, Ibnu, Gema, Roby, Rina, Bagus, Dita dan seluruh teman – teman PLD XXIV, juga kepada Bang Berly selaku pembina sekaligus mentor saya), OIS 2010, Pusgerak BEM UI 2010 (Sakti, Wilis, Faiqoh, Ijul, Haryo dan Hadi), Kastrat BEM FISIP UI 2009 (Tias, Juang, Alvin, Wanda, Farcil, Silvi, Dina dan Nasron), Mapres dan Talent Scouting FISIP UI 2011, UI to PIMNAS 2011 (khususnya Aya dan Even yang sabar sama kelakuan saya :D).
11. Keluarga PPSDMS Nurul Fikri, khususnya rekan – rekan tiara di regional 1 Jakarta Putri. Mbak Tiwi, Mbak Asri, Anin yang sudah menyempatkan hadir

sidang, teman – teman sekamar Neti, Zahra dan Hani, teman – teman KIP Mbak Ayu, Ovy, Aisyah Iadha, Aisyah Bidara, Sentia, Ilma, Ihda, Rona, Bilqis, Enung, Septi, Ifah, Yora, Fina dan rekan – rekan PPSDMS lainnya.

12. Keluarga kunang – kunang, FIMaga, khususnya rekan – rekan Jong Sunda (Noey, Agung, Ecky, Thea, Uwi, Etha, Dio, dan lain – lain) serta sahabat misterius saya, Kamil dan Lia yang sudah menyempatkan hadir pada saat sidang. *It means a lot to me* ☺
13. Keluarga besar Ascaree Costadinova (ASCOVA) khususnya Hamida Amalia dan teman – teman yang telah memberikan semangat melalui *twitter, facebook* dan grup BBM.
14. Yayasan Goodwill Internasional, khusus Ibu Mien dan Mbak Rosa serta Dikti dengan beasiswa PPAnya yang telah mendukung tambahan finansial saya di semester terakhir.

Serta segenap pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga hasil yang penulis berikan dapat memuaskan bagi semua. Terima kasih.

Depok, 27 Desember 2011

Avina Nadhila Wdarsa

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avina Nadhila Widarsa
NPM : 0806352220
Program Studi : S1-Reguler Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Kepentingan Cina dalam Penandatanganan *Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement* Dengan Taiwan Tahun 2010”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 11 Januari 2011

Yang menyatakan



Avina Nadhila Widarsa

ABSTRAK

Nama : Avina Nadhila Widarsa
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kepentingan Cina dalam Penandatanganan *Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement* dengan Taiwan Tahun 2010

Setelah terlibat konflik politik selama lebih dari enam dekade, Cina mengambil sebuah kebijakan yang fenomenal dalam hubungannya dengan Taiwan. Pada tanggal 29 Juni 2010 disepakati suatu kerangka kerjasama ekonomi yang ditandatangani oleh Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) yang mewakili pemerintah Cina dan Strait Exchange Foundation (SEF) yang mewakili pemerintah Taiwan. Penandatanganan *Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) ini menandai babak baru dalam hubungan lintas selat. Walaupun perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang resiprokal dan setara, dalam isi perjanjian ECFA justru lebih menguntungkan Taiwan daripada Cina. Dalam ECFA disepakati kedua pihak sepakat untuk menurunkan tarif pada produk – produk ekspornya hingga 0%. Cina bersedia menurunkan tarif bagi 539 produk impor dari Taiwan, sementara Taiwan hanya bersedia menurunkan tarif bagi 267 produk impor dari Cina. Jelas terdapat ketidakseimbangan dalam kesepakatan ekonomi tersebut. Menjadi pertanyaan yang menarik, mengapa Cina tetap mau menandatangani perjanjian yang sudah jelas merugikan baginya secara ekonomi? Melalui kerangka pemikiran *economic statecraft*, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Cina memiliki kepentingan di balik penandatanganan ECFA. Adapun kepentingan politik Cina dalam penandatanganan ECFA adalah sebagai tahap awal untuk mencapai reunifikasi secara damai dengan Taiwan dan sebagai pembuktian upaya *peaceful development* yang dilakukan Cina di kawasan Asia Timur. Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga aliran dana investasi langsung dari Taiwan yang menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Cina.

Kata kunci: ECFA, economic statecraft, kerjasama ekonomi, hubungan lintas selat, ekspor impor.

ABSTRACT

Name : Avina Nadhila Widarsa
Study Program : International Relations
Title : China's Interest on the Signing of Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement with Taiwan in 2010

After six decades full of hostility and political tension, China took an extraordinary action regarding her relation towards Taiwan. On June 29, 2010, an economic cooperation framework agreement was signed between Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) as a representative of government of China and Strait Exchange Foundation (SEF) as a representative of government of Taiwan. The signing of Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) was marking the new era of cross strait relations. While looking to improve economic cooperation reciprocally and equally, this agreement is more favor Taiwan instead of China. China agreed to reduce tariffs until 0% for 539 Taiwan export goods, while Taiwan only agreed to reduce tariffs for 267 China export goods. It is likely that China will face economic disadvantages because of this agreement. Then, the question is why China wants to sign this agreement although it doesn't give maximum advantages to her economy? Through the analysis from economic statecraft and economic cooperation as conceptual framework, this research pointed out that China has political and economic interest within this agreement. This research identified China's interest on ECFA as initial step to achieve peaceful reunification with Taiwan and as a way for China to prove the peaceful development strategy in East Asia region. Moreover, China also has economic interest towards ECFA which is to make sure Taiwan's FDI still come to China.

Keywords: ECFA, economic statecraft, economic cooperation, cross strait relation, export import.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
HALAMAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASITUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL, DIAGRAM DAN GRAFIK	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I Pendahuluan	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Permasalahan	5
I.3. Kerangka Pemikiran	6
I.3.1. Definisi Konseptual : Kepentingan Nasional	6
I.3.2. Konsep <i>Economic Statecraft</i>	8
I.4. Metodologi Penelitian	12
I.4.1. Metode Penelitian	12
I.4.2. Operasionalisasi Konsep	13
I.4.3. Model Analisa	15
I.4.4. Asumsi dan Hipotesis Penelitian	16
I.5. Tinjauan Pustaka	17
I.6. Rencana Pembabakan Skripsi	26
I.7. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	27
BAB II KERANGKA KESEPAKATAN KERJASAMA EKONOMI CINA – TAIWAN: MOMENTUM BARU HUBUNGAN LINTAS SELAT	29

II.1. Sekilas Mengenai ECFA	29
II.2. Latar Belakang Pembentukan ECFA	31
II.3. Proses Negosiasi yang Singkat	34
II.4. Isi Perjanjian ECFA	39
II.5. Implementasi Program “Early Harvest” pada Semester Pertama Tahun 2011	44
BAB III PENANDATANGANAN ECFA SEBAGAI <i>ECONOMIC STATECRAFT</i> CINA TERHADAP TAIWAN.....	49
III.1. Tipe Instrumen Kebijakan Ekonomi yang Diambil Cina untuk Mempengaruhi Taiwan	49
III.1.1. Penandatanganan ECFA sebagai <i>Positive Sanction</i> Cina terhadap Taiwan	49
III.1.2. Kemungkinan Cina melakukan <i>Negative Sanction</i> terhadap Taiwan	51
III.2. Taiwan sebagai Target <i>Economic Statecraft</i> Cina	56
III.3 Ruang Lingkup Sasaran Kebijakan Dalam Penandatanganan ECFA	61
BAB IV KEPENTINGAN CINA DALAM PENANDATANGANAN ECFA	66
IV.1. ECFA sebagai Upaya Cina untuk Mencapai Reunifikasi dengan Taiwan... ..	66
IV.2 Kepentingan Ekonomi Cina dalam Penandatanganan ECFA	77
IV.3. ECFA sebagai Upaya <i>Peaceful Development</i> Cina di Kawasan Asia Timur.....	81
IV.2.1. Terminologi <i>Peaceful Development</i>	81
IV.2.2. ECFA dan <i>Peaceful Development</i> di Kawasan Asia Timur	84
IV.4. Kepentingan Cina dalam Penandatanganan ECFA : Analisa <i>Economic Statecraft</i> Cina terhadap Taiwan	86
BAB V KESIMPULAN	89
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN DIAGRAM

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Operasionalisasi Konsep	14
Tabel II.1. Rangkaian Negosiasi Chiang – Chen Talks	37
Tabel II.2. Daftar Sektor dan Nilai Perdagangan Produk yang Disetujui Masuk ke Program “Early Harvest”	41
Tabel II.3. Skema Penurunan Tarif yang Disepakati pada Program “Early Harvest”	42
Tabel II.4. Jenis Sektor Jasa dan Keuangan yang Dibuka pada Program “Early Harvest”	43
Tabel III.1. Nilai Ekspor Taiwan ke Cina dan Ketergantungan Ekonomi Taiwan terhadap Cina tahun 1987 – 1997 (dalam hitungan US\$ dan %)	54
Tabel IV.1. Nilai Perdagangan Cina – Taiwan melalui Hong Kong tahun 1979 - 2004	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1. Nilai Ekspor - Impor Taiwan ke Cina periode Januari - Oktober 2011 (dalam ratusan juta US\$)	46
Grafik III.1. Nilai Ekspor Impor Taiwan – Cina Tahun 2006 – 2010 (dalam Milyar US\$)	52
Grafik III.2. Proporsi Barang Impor Taiwan di Cina Tahun 2008 – 2011 (dalam %)	53
Grafik III.3. Persepsi Masyarakat Taiwan terhadap Hubungan Lintas Selat (1988 – 1999)	65

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I.1. Kategorisasi <i>Economic Statecraft</i>	11
--	----

DAFTAR SINGKATAN



ACFTA	<i>ASEAN – China Free Trade Agreement</i>
ADB	<i>Asian Development Bank</i>
APEC	<i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
ARATS	<i>Association for Relations Across Taiwan Straits</i>
CECA	<i>Comprehensive Economic Cooperation Agreement</i>
CEPA	<i>Closer Economic Partnership Agreement</i>
DPP	<i>Democratic Progressive Party</i>
ECFA	<i>Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
KMT	<i>Kuomintang</i>
PTA	<i>Preferential Trade Agreement</i>
RRC	<i>Republik Rakyat Cina</i>
SEF	<i>Strait Exchange Foundation</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Teks Perjanjian Utama *Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA)

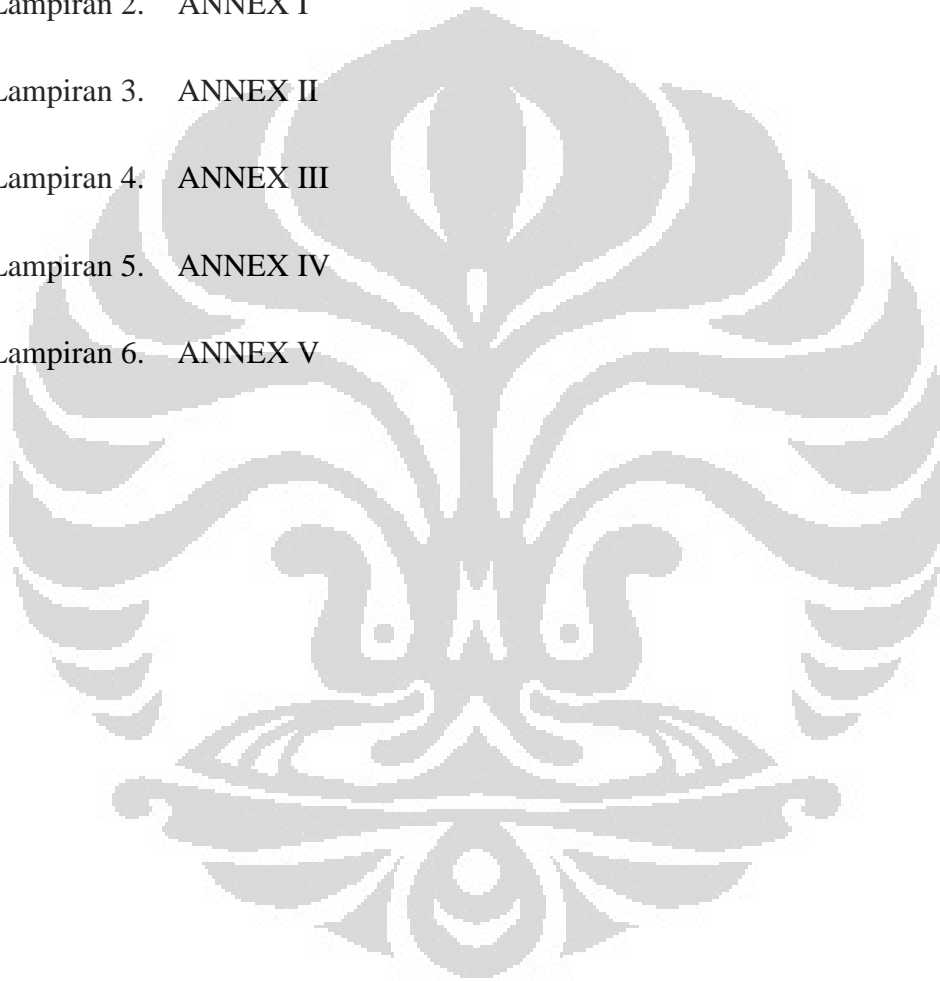
Lampiran 2. ANNEX I

Lampiran 3. ANNEX II

Lampiran 4. ANNEX III

Lampiran 5. ANNEX IV

Lampiran 6. ANNEX V



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan membawa dunia hari ini semakin terintegrasi secara global. Fenomena integrasi global yang dikenal dengan istilah globalisasi, mempengaruhi perubahan struktur dan relasi antar negara. Salah satu dampak globalisasi dalam hubungan antar negara terdapat pada bidang ekonomi. Meningkatnya kebutuhan negara – negara untuk menghilangkan hambatan perdagangan internasional, baik berupa hambatan tarif maupun hambatan non tarif, merupakan contoh globalisasi dalam bidang ekonomi.

Komitmen negara-negara untuk menurunkan hambatan perdagangan internasional terus dilakukan melalui berbagai kerangka perjanjian ekonomi, seperti dalam bentuk *Preferential Trade Agreement* (PTA/Perjanjian Preferensi Pengurangan Tarif Perdagangan) dan *Free Trade Agreement* (FTA/Perjanjian Perdagangan Bebas). Persetujuan negara-negara untuk bergabung dalam kesepakatan ekonomi idealnya didasarkan pada keuntungan resiprokal yang diperoleh dari partnernya. Adanya tren penandatanganan perjanjian ekonomi seperti PTA maupun FTA tersebut meningkatkan pula tren regionalisme di seluruh dunia.¹

Republik Rakyat Cina (Cina) sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia selama dua dekade terakhir tidak mau ketinggalan dari tren tersebut. Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978 telah mengubah posisi Cina di peta perekonomian dunia. Cina yang pada awalnya menghindari untuk terlibat dalam negosiasi perdagangan bebas di era 1970an dan 1980an, secara bertahap menjadi salah satu pemain teraktif dalam menginisiasi

¹ Claude Barfield, " US Trade Policy : The Emergence of Regional and Bilateral Alternatives to Multilateralism", dalam *Competing Regionalism – Patterns, Economic Impact and Implications for the Multilateral Trading System*, Intereconomics Forum, September/Oktober 2007, hal. 244.

perjanjian perdagangan bebas di dunia. Melalui penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain, Cina ingin menunjukkan strateginya membentuk kondisi internasional yang kondusif untuk tumbuh secara damai (*peaceful rise*).²

Sukses dengan penandatanganan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA), yang memiliki potensi pasar sebesar 1,8 milyar penduduk, Cina gencar melakukan penetrasi ke setiap pasar yang potensial di Asia. Hal ini membuat negara-negara di sekitar Cina seperti Taiwan, Jepang dan Korea Selatan merasa terancam dengan kemampuan Cina merebut seluruh pangsa pasar ASEAN dalam waktu yang singkat. Selain dengan ASEAN, Cina juga telah menjalin kerjasama dengan Chile, Pakistan, Selandia Baru dan Peru. Saat ini, Cina terus memperluas jejaring FTA dan tengah bernegosiasi dengan 20 negara lainnya untuk membuat FTA baru.³

Dalam memilih partner untuk membentuk sebuah kesepakatan ekonomi, Cina memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan – pertimbangan tersebut antara lain didasarkan pada kondisi hubungan diplomatik dan politik yang telah terjalin, struktur dan pola perdagangan yang dimiliki calon partner, cakupan wilayah pasar domestik yang substansial, preferensi pada wilayah yang menjadi pusat perdagangan dalam suatu regional, serta keinginan yang sama untuk membangun jejaring FTA.⁴ Cina mengadopsi doktrin “*give a lot while demand little*” dalam negosiasi FTA. Cina biasanya akan melakukan penandatanganan perjanjian ekonomi dengan negara lain yang memiliki pengaruh signifikan secara politik dengan keluaran ekonomi yang besar.⁵ Berdasarkan kriteria di atas,

² Henry Gao, “Cina’s Strategy for Free Trade Agreements : Political Battle in the Name of Trade”, diakses dari http://www.ideaswebsite.org/ideasact/dec09/pdf/Henry_Gao.pdf pada 18 September 2011 pukul 20.00 WIB, hal. 1.

³Diakses dari

http://itemsweb.esade.edu/research/esadegeo/DIALOGUE%20CHINA%20TAIWAN_GINE_EN.pdf, pada 20 September 2011 pukul 19.30 WIB.

⁴ Henry Gao, Loc. Cit, hal.8.

⁵ *Ibid*, hal. 14.

logikanya Cina akan memilih untuk menandatangani suatu kesepakatan ekonomi dengan wilayah yang tidak pernah memiliki konflik politik dan memberikan keuntungan ekonomi yang maksimal.

Pada tanggal 29 Juni 2010, terjadi sebuah peristiwa bersejarah di mana Cina yang diwakili oleh Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) menandatangani suatu kesepakatan ekonomi dengan Taiwan yang diwakili oleh Straits Exchange Foundation (SEF). Kesepakatan ekonomi tersebut bernama *Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA). ECFA dapat dikategorikan sebagai sebuah *preferential trade agreement* karena didalamnya terkandung klausul yang menyatakan kedua pihak sepakat untuk mengurangi hambatan perdagangan berupa tarif secara bertahap pada produk-produk tertentu.

Fenomena ini sangat menarik untuk diangkat mengingat hubungan Cina – Taiwan hampir selalu diwarnai ketegangan politik pasca perang sipil tahun 1949. Setidaknya, terdapat kurang lebih seribu misil yang ditempatkan di selatan Cina mengarah ke pulau Taiwan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua entitas ekonomi ini tidak stabil dan bersahabat, walaupun selama sepuluh tahun terakhir tidak ada kontak persenjataan antara kedua belah pihak.⁶ Menjadi suatu hal yang menimbulkan pertanyaan ketika akhirnya Cina setuju untuk menandatangani suatu kesepakatan ekonomi dengan Taiwan, wilayah yang selama ini menjadi buah simalakama bagi integrasi teritorial Cina.

Sebelum diberlakukannya ECFA, Cina menerapkan tarif antara 15-20% pada produk-produk ekspor Taiwan.⁷ Di lain pihak, Taiwan juga menerapkan kebijakan perdagangan diskriminatif melalui pembatasan barang-barang impor Cina dengan alasan keamanan dan kedaulatan. Melalui penandatanganan ECFA, kedua pihak sepakat untuk mengurangi tarif ekspor dan impor secara bertahap

⁶ Ariana Eunjung Cha, “*Taiwan, China Negotiating a Landmark Free-Trade Agreement*” diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/20/AR2009022003388.html> pada minggu, 27 November 2011 pukul 10.22 WIB.

⁷ Tsai-Lung Hong, “ECFA: A Pending Trade Agreement ? Also a Comparison to CEPA”, diakses dari http://www.apeaweb.org/confer/bus11/papers/Hong_h.pdf pada 20 September 2011 pukul 21.30 WIB.

hingga 0% dalam tiga tahun.⁸

Perjanjian ini merupakan sebuah momentum baru bagi hubungan lintas selat. Selama enam dekade terakhir, hubungan lintas selat Cina - Taiwan diwarnai ketegangan hubungan politik. Perbedaan prinsip dan interpretasi "One China", di mana Taiwan menganggap "One China" sebagai satu bangsa dalam dua negara yang berbeda sementara Cina menganggap hanya ada satu Cina dan Taiwan merupakan bagian dari Cina (RRC), menjadi sumber ketegangan politik yang berkepanjangan di antara kedua wilayah. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Chen Sui Bian, presiden Taiwan yang berasal dari Partai Demokrat Progresif (*Democratic Progressive Party / DPP*), pada tahun 2000 - 2008.⁹ Chen Sui Bian senantiasa menegaskan posisi Taiwan yang merdeka dari Cina. Prinsip "One China" yang diinterpretasikan olehnya sebagai satu Cina, dua negara, membuat pemerintah Cina daratan (RRC) marah. Tidak heran pemerintah Republik Rakyat Cina mengeluarkan "Anti-Secession Law" pada Maret 2005, yang berisi penggunaan "non-peaceful means" sebagai salah satu upaya mencapai "national unification" bila diperlukan.¹⁰ Kekuatan militer Cina pun selalu siap sedia menyerang pulau Taiwan kapanpun jika dirasa perlu.

Penandatanganan ECFA mengindikasikan adanya perubahan kebijakan yang lebih akomodatif dari Cina terhadap Taiwan. Selain itu, penandatanganan ECFA merupakan salah satu penanda menguatnya kembali hubungan formal kedua wilayah yang diwakili oleh ARATS dan SEF. Negosiasi antara ARATS dan SEF sendiri baru saja normal setelah 11 tahun dihentikan.¹¹ Dampak penandatanganan perjanjian ini tidak hanya berpengaruh pada hubungan lintas selat, tetapi juga pada kemungkinan masa depan integrasi ekonomi regional di Asia Timur.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ching-Chang Chen, "Understanding the Political Economy of Cross-Strait Security: A Missing Link" dalam *Journal of Chinese Political Science* No. 15, (September 2010), hal. 392.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ "Mainland, Taiwan Ready to Sign ECFA", *Xinhua*, 29 Juni 2010.

I.2. Rumusan Permasalahan

Implikasi dari penandatanganan ECFA diperkirakan dapat meningkatkan volume perdagangan antara Cina dan Taiwan. Namun, apabila dilihat dari kalkulasi ekonomi, keuntungan perdagangan yang didapatkan oleh Taiwan akan jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan Cina. Berdasarkan studi empiris dari Chung-Hua Institution for Economic Research yang dilakukan pada tahun 2009, Produk Domestik Bruto (PDB) Taiwan akan meningkat sebesar 1,03%, sementara PDB Cina hanya meningkat sebesar 0,17%.¹² Keuntungan ekspor yang didapatkan Taiwan dari Cina setelah diberlakukannya ECFA bernilai sebesar US\$ 66 Milyar, sementara Cina hanya mendapatkan keuntungan sebesar US\$ 31 Milyar dari produk-produknya yang masuk ke Taiwan.¹³ Dalam perjanjian ECFA, Cina sepakat akan menurunkan tarif bagi 539 produk ekspor Taiwan senilai US\$ 14 miliar. Sementara, Taiwan sendiri hanya menurunkan tarif bagi 267 produk ekspor Cina senilai US\$ 3 miliar.¹⁴ Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip Cina dalam mengadakan suatu kesepakatan ekonomi yang berharap akan keuntungan ekonomi yang maksimal.

ECFA menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti melihat hubungan Cina – Taiwan hampir selalu diwarnai ketegangan politik dan ancaman perang terbuka. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan ***“Mengapa Cina setuju untuk menandatangani perjanjian ECFA dengan Taiwan pada tahun 2010?”***

¹² Daniel H. Rosen dan Zhi Wang, “Deepening Cina-Taiwan Relations through the Economic Cooperation Framework Agreement”, *Policy Brief Number PB 10 – 16*, Peterson Institute for International Economics, diakses dari <http://www.iie.com/publications/pb/pb10-16.pdf> pada 20 September 2011 pukul 20.30 WIB.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

I.3. Kerangka Pemikiran

I.3.1. Definisi Konseptual : Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang hampir selalu dipakai dalam studi Ilmu Hubungan Internasional untuk menjelaskan perilaku negara-negara. Konsep ini menurut Coulombus dan Wolfe merupakan konsep sentral untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi maupun menjelaskan kemungkinan perilaku negara di tingkat internasional.¹⁵ Menurut Papp, negara adalah entitas yang mendefinisikan sendiri apa kepentingannya dan mendeterminasi usaha untuk mencapainya. Kepentingan suatu negara merupakan kepentingan nasional dan metode maupun aksi untuk mencapai kepentingan nasional disebut kebijakan nasional.¹⁶

Ada berbagai metode untuk mendefinisikan kepentingan nasional, sebab konsep kepentingan nasional sendiri merupakan konsep yang sangat ambigu. **Papp** mengidentifikasi setidaknya ada lima metode untuk mendefinisikan kepentingan nasional, yakni : **1) kriteria ekonomi, 2) kriteria ideologi, 3) augmentasi power, 4) keamanan dan/atau militer, serta 5) moralitas dan legalitas.**¹⁷ Sementara **Coulombus dan Wolfe** mengemukakan sepuluh kriteria untuk mendefinisikan kepentingan nasional, yakni : **1) operasional-filosofis (lokasi, waktu, dan persepsi terhadap dunia internasional), 2) ideologi, 3) moral dan legal, 4) pragmatis, 5) keunggulan profesional, 6)partisan, 7) birokratis, 8) etnis/ras, 9) status kelas, dan 10) ketergantungan terhadap kebijakan luar negeri.**¹⁸ Kepentingan nasional juga dapat dilihat dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara seperti interdependensi ekonomi, kemajuan teknologi, hadirnya institusi internasional, perpindahan transnasional dan sistem berpikir serta

¹⁵ Theodore Coulombus dan James Wolfe, *Introduction to International Relations*, (New Jersey : Prentice Hall, 1986), hal. 107.

¹⁶ Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations : Framework for Understanding*, (Madison, USA : Allyn dan Bacon, 1997), hal. 38

¹⁷ Daniel S. Papp, *Op.Cit*, hal. 43-46.

¹⁸ Theodore Coulombus dan James Wolfe, *Op.Cit*, hal. 115 – 119.

fragmentasi internal.¹⁹

Bagi kaum realis, negara memiliki pilihan yang lebih sempit untuk mendefinisikan kepentingan nasional mereka sebab sistem internasional yang anarki mengharuskan kepentingan nasional didefinisikan dalam kondisi *balance of power*. Posisi negara dalam sistem internasional itulah yang kemudian akan membentuk definisi kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri negara tersebut.²⁰

Sementara, bagi kaum liberalis, kepentingan nasional sangat tergantung pada tipe masyarakat domestik di suatu negara sehingga kepentingan nasional tidaklah tergantung pada posisi negara dalam sistem internasional saja. Dalam paradigma liberal, sistem internasional dipercaya sebagai sistem moderat yang memungkinkan institusi dan jalur-jalur komunikasi menjaga kestabilan sistem dalam kondisi damai.²¹ Dapat dikatakan, paradigma liberalis lebih memandang kepentingan nasional ditentukan dari faktor-faktor yang berada dalam negara sementara paradigma realis cenderung mendefinisikan kepentingan nasional dari faktor-faktor yang berada di luar negara.

Kepentingan nasional merupakan konsep sentral dalam penelitian ini sebab kepentingan nasional merupakan dasar Cina melakukan penandatanganan perjanjian ECFA dengan Taiwan. Kepentingan nasional di sini dilihat sebagai kumpulan tujuan-tujuan nasional yang keadaannya dinamis, tergantung persepsi dari pemimpin negara maupun elit pengambil kebijakan saat itu.

¹⁹ Daniel S. Papp, *Op.Cit.*, hal. 50.

²⁰ Joseph S. Nye Jr., *Understanding International Conflicts : an Introduction to Theory and History*, (USA : Longman, 1997), hal. 41.

²¹ *Ibid.*, hal. 42.

I.3.2. *Economic Statecraft*

Kerangka pemikiran lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *economic statecraft* yang dipaparkan oleh David Allen Baldwin. Konsep *economic statecraft* digunakan untuk menjelaskan mengapa penandatanganan ECFA sebagai variabel dependen terjadi.

Diadopsi dari konsep *statecraft* yang berarti teknik para pembuat kebijakan negara (*statesman*) dalam mempengaruhi aktor – aktor lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, konsep *economic statecraft* menjelaskan tentang penggunaan cara-cara ekonomi untuk tujuan – tujuan non ekonomi.²²

Menurut Harold Laswell, *statecraft* merupakan seni dalam menjalankan urusan-urusan kenegaraan dan kebijakan publik, baik dalam dimensi domestik maupun hubungan luar negeri. *Statecraft* juga dianggap sebagai tindakan terorganisir yang dilakukan pemerintah untuk mengubah lingkungan eksternal secara umum atau kebijakan – kebijakan dan tindakan – tindakan dari negara lain secara khusus untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Segala upaya yang digunakan oleh *statesman* untuk mempengaruhi aktor-aktor internasional lain dilihat sebagai aksi politik.

Menurut Baldwin, baik perang maupun ekonomi tidak dapat terpisahkan dari politik. Semuanya harus dilihat sebagai sebuah instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tertinggi dalam politik. Tidak semua kebijakan ekonomi otomatis berupaya untuk mencapai tujuan – tujuan ekonomi. Diktum Clauwsewitz yang mengatakan bahwa “perang memiliki tujuannya sendiri” menurut Baldwin dapat dan harus digunakan untuk mengkarakterisasi cara – cara ekonomi. Dengan demikian, Baldwin menganggap *economic statecraft* konsisten dengan pandangan tersebut.²³

Adapun teknik-teknik kebijakan luar negeri yang termasuk dalam *statecraft* diantaranya propaganda, diplomasi, ekonomi dan militer. Dalam analisa kebijakan

²² David Baldwin, *Economic Statecraft*, (New Jersey : Princeton University Press, 1985), hal. 40.

²³ *Ibid*, hal. 9

luar negeri, Austin Ranney mendesak untuk memberi perhatian lebih kepada isi kebijakan dan dampak dari usaha yang digunakan untuk mencapai tujuan negara. Hal ini disebabkan analisa kebijakan luar negeri yang dilakukan akademisi hubungan internasional maupun politik internasional selama ini lebih menekankan analisa proses kebijakan dibandingkan dengan analisa isi kebijakan yang dihasilkan.²⁴

Analisa *statecraft* sendiri lebih melihat hasil suatu negara dalam menjalankan hubungan internasional sehingga fokus analisisnya bukan proses pengambilan kebijakan (*policy process*) namun pada isi dari kebijakan yang dihasilkan (*policy content*). Pada *policy process* fokus analisa akan bertumpu pada siapa aktor-aktor yang terlibat, sementara pada *policy content* analisa akan terfokus pada apa yang mau dicapai dan apakah bisa melalui cara tersebut. Secara umum *statecraft* memiliki tujuan untuk memperbesar *power* yang dimiliki negara dan mempengaruhi aktor lain, baik *state actor* maupun *non-state actor*.²⁵

Teknik ekonomi dalam *statecraft* memperlihatkan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah utamanya didasarkan pada sumber daya – sumber daya yang memiliki kemiripan yang masuk akal terhadap harga pasar dalam bentuk uang. *Economic statecraft* menekankan pada pilihan – pilihan kebijakan dan menghindari penggunaan cara – cara umum yang tidak penting. Menurut Baldwin, ekonomi tidak dapat dilihat sebagai struktur pasar yang berjalan sukarela dalam mendistribusikan barang, namun pasar harus dilihat sebagai suatu instrumen politik. Dengan demikian, *economic statecraft* dapat disebut sebagai instrumen politik yang cenderung memfokuskan kepada cara (*means*) daripada tujuan (*ends*).

Menurut Baldwin, suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai sebuah *economic statecraft* dilihat dari tipe kebijakan yang diambil, apakah berupa *negative sanction* atau *positive sanction*. Adapun *positive sanction* contohnya pengurangan tarif untuk fasilitasi perdagangan dan investasi. Sementara *negative*

²⁴ *Ibid*, hal. 12.

²⁵ *Ibid*, hal. 14.

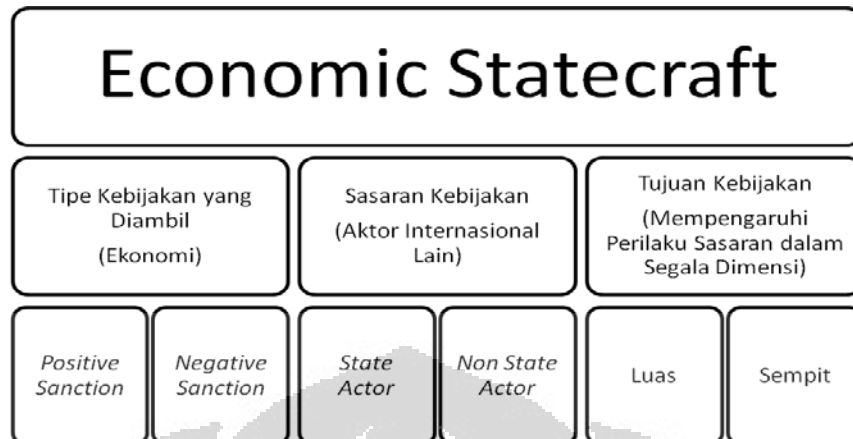
sanction dapat dilakukan melalui boikot, embargo, pemberian tarif bea masuk dan sanksi perdagangan. Syarat kedua yaitu *economic statecraft* juga harus memiliki domain (wilayah) dari upaya – upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi aktor internasional lain, apakah terbatas atau tidak terbatas. Terakhir, *economic statecraft* harus memiliki ruang lingkup dimensi dari perubahan perilaku sasaran kebijakan, baik berupa ekstrinsik maupun intrinsik. Lingkup dari *economic statecraft* ini termasuk , pandangan, pendapat, tindakan, perlakuan, opini dan segala dimensi yang berkaitan dengan perubahan perilaku target.²⁶ Secara umum, untuk menentukan apakah suatu kebijakan luar negeri termasuk ke dalam *economic statecraft* atau bukan, maka kebijakan tersebut harus memenuhi kriteria komponen-komponen utama dalam *economic statecraft*. Adapun tiga komponen utama dalam *economic statecraft* adalah **tipe kebijakan yang dipilih, target pengaruh dari kebijakan serta ruang lingkup dari kebijakan yang diambil.**

Suatu instrumen kebijakan yang termasuk dalam *economic statecraft* haruslah berupa tipe kebijakan ekonomi, memiliki sasaran atau target untuk mempengaruhi aktor internasional lain serta memiliki tujuan – tujuan tertentu dalam segala dimensi yang mempengaruhi perilaku target. *Economic statecraft* digunakan untuk memahami bagaimana usaha suatu negara mempengaruhi aktor internasional lainnya melalui cara ekonomi dalam ruang lingkup tertentu untuk mendapatkan tujuan nasional, utamanya untuk tujuan non - ekonomi. Aktor internasional yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada aktor negara (*state actor*), tetapi juga mencakup aktor non - negara (*non-state actor*).²⁷ Secara ringkas, untuk menentukan apakah suatu kebijakan termasuk ke dalam *economic statecraft* atau bukan dapat dilihat dari diagram di halaman berikut :

²⁶ *Ibid*, hal. 20 - 22.

²⁷ *Ibid*, hal. 41 – 42.

Diagram I.1. Kategorisasi *Economic Statecraft*



Sumber : David Baldwin, *Economic Statecraft*, 1985.

Economic statecraft merupakan konsep yang tepat dipakai untuk menganalisis perilaku tawar menawar yang dilakukan negara dalam kebijakan ekonomi luar negerinya. Perilaku tawar menawar tersebut diukur dari kapabilitas dan intensitas suatu negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri melalui instrumen ekonomi. Kapabilitas yang dimaksud di sini sangat dipengaruhi oleh *power* yang dimiliki dan intensitas di sini menunjukkan seberapa besar tujuan yang ingin dicapai dari orientasi kebijakan luar negeri.²⁸

Konsep *economic statecraft* lahir dari pemikiran nasionalisme ekonomi yang berasal dari paradigma realisme dalam ekonomi politik internasional. Negara diasosiasikan dengan seberapa kuat *power* yang dimiliki. Dalam tatanan sistem internasional yang anarki, dunia tidak memiliki pengaturan yang wajib dipatuhi negara-negara dalam hubungan internasional (*lawless*). *Power* dari negara diejawantahkan dalam bentuk kekuatan militer, ekonomi, diplomasi atau negosiasi serta gagasan, ide atau propaganda.

Statecraft seringkali diasosiasikan sebagai “portfolio” tidak terpisahkan dari kebijakan dalam mencapai tujuan strategis suatu negara. *Statecraft* sendiri dibagi jenisnya berdasarkan *power* yang dimiliki oleh negara (ekonomi, militer, diplomasi

²⁸ *Ibid*, hal. 101 – 102.

dan propaganda). Suatu *statecraft* dipilih tidak hanya untuk mempengaruhi aktor lain, tetapi juga untuk memperbesar *power* yang dimiliki negara itu.

Economic statecraft seringkali digunakan untuk memperlihatkan kekuatan ekonomi suatu negara. Sebetulnya *economic statecraft* juga dapat digunakan untuk memperlihatkan bentuk - bentuk kekuatan non - ekonomi yang dimiliki suatu negara. Kekuatan-kekuatan non-ekonomi tersebut juga dapat digunakan untuk mempengaruhi aktor internasional lain. Pengukuran efektivitas instrumen kebijakan untuk mempengaruhi sasaran dalam suatu *economic statecraft* mungkin tidak hanya dilihat dari dampak ekonominya. Bisa jadi efektivitas kebijakan yang dijalankan berasal dari sinyal yang dikirimkan negara yang memiliki intensi untuk menggunakan kebijakan-kebijakan tertentu. Contohnya, sanksi ekonomi yang digunakan suatu negara terhadap negara lain akan efektif bukan karena dampak ekonomi yang ditimbulkan melainkan sinyal dari negara untuk menerapkan sanksi.²⁹ *Economic statecraft* selalu melihat usaha untuk mempengaruhi perilaku aktor internasional lain dan keberhasilannya berdasarkan *power* ekonomi yang dimiliki negara tersebut.

I.4. Metodologi Penelitian

I.4.1. Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, yang dilakukan dalam prosedur deduktif.³⁰ Penelitian ini pada dasarnya akan menguji hipotesis yang didasarkan pada konsep yang telah dioperasionalisasikan menjadi indikator-indikator tertentu. Konsep *economic statecraft* dalam penelitian ini berfungsi sebagai “alat” untuk memahami fenomena yang hendak diteliti dan menjelaskan hubungan yang terjadi antara variabel dependen serta variabel independen. Akan tetapi, pengukuran yang akan digunakan

²⁹*Ibid*, hal. 24.

³⁰ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, 2006), hal. 98.

dalam penelitian ini bukan pengukuran kuantitatif statistik yang berdasarkan angka, tetapi lebih mengacu pada keakuratan deskripsi setiap variabel dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.³¹ Di samping itu, penelitian ini bersifat eksplanatif sebab untuk menjawab permasalahan penelitian, kesimpulan akan diambil sebagai refleksi dari pemahaman konsep yang dipergunakan.³²

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang mencakup studi dokumen primer (teks asli perjanjian ECFA dan pernyataan resmi pemerintah Cina) serta dokumen sekunder (informasi berita dari berbagai media massa, analisa pakar dan dokumen-dokumen lain yang terkait). Dokumen yang dimaksud dalam hal ini mengacu pada teks atau apa saja yang tertulis, tampak secara visual atau diucapkan melalui media komunikasi.³³

I.4.2. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara penandatanganan ECFA dengan kepentingan Cina. Penelitian ini juga akan berusaha mengaplikasikan konsep *economic statecraft* dalam kasus penandatanganan ECFA. Konsep *economic statecraft* yang digunakan untuk menjelaskan variabel independen, yakni kepentingan Cina, dalam penelitian ini diturunkan menjadi tiga komponen yakni tipe instrumen kebijakan yang dipilih (*positive sanction/negative sanction*), aktor internasional lain yang menjadi sasaran pengaruh kebijakan yang di ambil (*state actor/non-state actor*) serta tujuan dari kebijakan yang diambil (luas/sempit). Indikator yang dipakai untuk menganalisa tipe kebijakan yang diambil akan dilihat dari isi perjanjian ECFA. Sementara pada sasaran pengaruh kebijakan dilihat dari aktor negara dan aktor negara yang menjadi target penandatanganan ECFA. Tujuan penandatanganan ECFA sendiri akan diidentifikasi dari tujuan Cina dalam hubungan lintas selat secara umum yang didukung dengan pernyataan – pernyataan

³¹ *Ibid*, h. 101.

³² *Ibid*, h. 94- 95.

³³ Lawrence Neuman, *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: Pearson Education Inc, 2004), hal. 219.

resmi pemerintah Cina yang berkaitan dengan penandatanganan ECFA.

Gambaran dari operasionalisasi variabel independen dengan menggunakan konsep di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1. Operasionalisasi Variabel

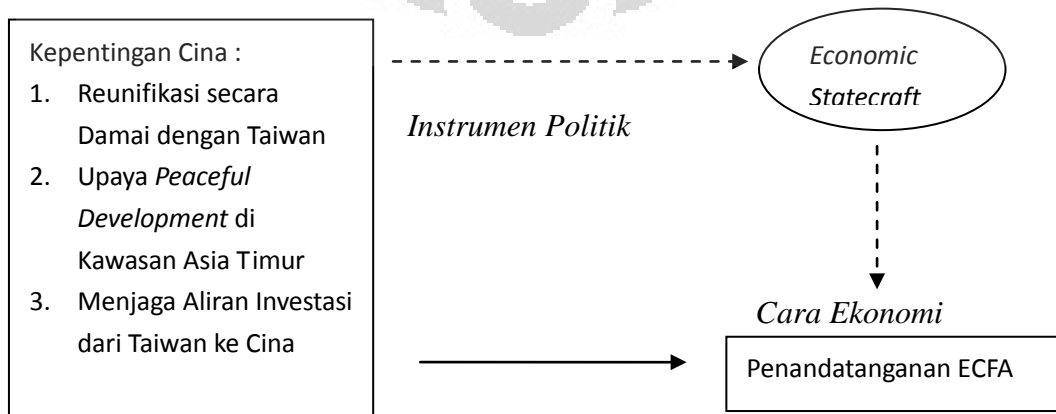
Variabel		Kategorisasi	Indikator	
Dependen	Penandatanganan ECFA (dalam analisa <i>Economic Statecraft</i>)	Tipe Instrumen Kebijakan yang Dipilih	Kebijakan – kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Cina terhadap Taiwan	
				<i>Positive Sanction</i>
			<i>Negative Sanction</i>	
		Sasaran Kebijakan	Aktor Negara	Aktor-aktor yang terlibat dalam proses Penandatanganan ECFA
		Aktor Non-negara		
		Ruang Lingkup Kebijakan	Ruang Lingkup dari sasaran kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Cina terkait pelaksanaan ECFA	
			Luas	
			Sempit	

Independen	Kepentingan Cina (dalam analisa Kepentingan Nasional)	Tujuan Nasional yang Dinamis	Reunifikasi dengan Taiwan secara Damai	Direfleksikan dari pernyataan – pernyataan dan dokumen – dokumen resmi serta kebijakan yang diambil pemerintah Cina
			Upaya Peaceful Development di Kawasan Asia Timur	
			Menjaga Aliran Dana Investor dari Taiwan ke Cina	

I.4.3. Model Analisa

Dari operasionalisasi konsep di atas, model analisa yang penulis rumuskan untuk mendapatkan jawaban penelitian adalah :

Diagram I.1 Model Analisa



Dari model analisa di atas dapat kita lihat bahwa konsep *economic statecraft* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara penandatanganan ECFA dan kepentingan Cina sebagai variabel dependen dan variabel dependen dalam penelitian. Penelitian ini akan membuktikan apakah penandatanganan ECFA termasuk dalam bentuk *economic statecraft* dan menjelaskan hubungannya dengan kepentingan nasional Cina. Hubungan yang diharapkan terjadi antara variabel independen dan variabel dependen adalah bahwa variabel independen (kepentingan Cina) mempengaruhi terjadinya variabel dependen (penandatanganan ECFA). Adapun kepentingan Cina yang tercantum pada kotak bagian kanan model analisa merupakan hipotesis yang akan diuji kebenarannya.

I.4.4. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap negara memiliki kepentingan dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Asumsi ini berangkat dari pemikiran realis bahwa negara adalah aktor yang terpenting dalam politik dunia, dan sebagai aktor yang rasional, negara akan berupaya mencapai kepentingan maksimal melalui cara-cara yang tersedia sesuai dengan paradigma realisme dalam ekonomi politik internasional.³⁴

Selain itu, dalam penelitian juga ada asumsi yang merupakan hal-hal yang dianggap benar sebagai koridor analisa nantinya. Hal-hal yang dianggap benar tersebut adalah :

1. Taiwan merupakan negara yang berdaulat secara *de facto*, memiliki pemerintahan yang berdaulat, penduduk dan wilayah teritorial namun belum memperoleh pengakuan internasional secara *de jure* akibat kebijakan “One China”.
2. Cina tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat, melainkan sebagai bagian dari wilayah teritorial Cina.

³⁴ Robert O. Keohane, “Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond”, dalam Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, (New York: Macmillan Publishing Company, 1993), hal. 191.

3. Sebagai negara, baik Cina maupun Taiwan dianggap merupakan aktor utama, uniter, dan rasional yang selalu berusaha mencapai kepentingan nasional melalui kebijakan luar negerinya.

Sementara itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Cina setuju untuk menandatangani ECFA karena Cina memiliki tujuan reunifikasi secara damai dengan Taiwan,
2. Cina setuju untuk menandatangani ECFA karena Cina berupaya melakukan *peaceful development* di kawasan Asia Timur,
3. Cina setuju untuk menandatangani ECFA karena Cina memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga aliran investasi dari Taiwan.

I.5. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini akan dipaparkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memberikan signifikansi pada topik penelitian yang diambil. Secara umum, penulis membagi tinjauan pustaka menjadi tiga bagian. Pertama, pemaparan penelitian tentang kebijakan ekonomi Cina terhadap Taiwan dan dinamika hubungan lintas selat. Kedua, penelitian mengenai motivasi, kepentingan dan tujuan Cina untuk terlibat dalam suatu kesepakatan ekonomi baik secara bilateral maupun multilateral. Ketiga, mengenai dampak penandatanganan ECFA bagi hubungan Cina-Taiwan yang diproyeksikan dalam beberapa tulisan.

Kebijakan Ekonomi Politik Cina terhadap Taiwan dan Dinamika Hubungan Lintas Selat

Salah satu karya ilmiah yang pernah membahas tentang kebijakan ekonomi politik Cina terhadap Taiwan adalah tulisan **Zhang Linzheng**, “Cina’s Economic Policy Towards Taiwan” dalam buku *Reflection on Triangular Relations of Beijing – Taipei – Washington since 1995*. Fokus pembahasan dalam tulisan tersebut mengenai strategi ekonomi politik yang dilakukan oleh Cina terhadap Taiwan serta pengaruhnya terhadap hubungan lintas selat. Pada dasarnya, kebijakan apapun yang

diambil oleh pemerintah Cina terkait hubungan lintas selat adalah untuk mencapai unifikasi secara damai dengan Taiwan, termasuk kemungkinan menggunakan kekuatan militer. Dalam hal perdagangan dan kegiatan – kegiatan ekonomi lintas selat, Beijing selalu berharap agar dapat berhubungan langsung dengan Taipei demi mendukung tujuannya mencapai unifikasi secara damai.

Selama ini, Taiwan cenderung membatasi hubungan perdagangannya dengan Cina daratan karena alasan politik dan keamanan. Cina sendiri hanya mengizinkan Taiwan membuka hubungan ekonomi dan budaya secara informal dengan negara – negara lain. Ekspansi hubungan ekonomi lintas selat telah meyakinkan para pemimpin Cina bahwa dengan adanya integrasi ekonomi diharapkan menjadi pondasi bagi terciptanya unifikasi secara damai. Integrasi ekonomi yang ditunjukkan saat ini menjadi alasan bagi pemerintah Cina menurunkan tekanan militernya terhadap Taiwan.³⁵

Sementara itu, dalam tulisannya berjudul "Strategic Uses Of Economic Interdependence: Engagement Policies in South Korea, Singapore, and Taiwan" **Miles Kahler** dan **Scott L. Kastner** menjelaskan bahwa kebijakan yang berusaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan tujuan utama mengubah perilaku negara target dan memiliki dampak pada peningkatan hubungan politik bilateral disebut dengan *economic engagement* (pendekatan ekonomi). Pendekatan ekonomi ini terbagi atas tiga tipe yakni pendekatan dengan syarat, pendekatan tanpa syarat bertujuan untuk memanfaatkan dampak batasan dari interdependensi ekonomi serta pendekatan tanpa syarat yang bertujuan untuk mengubah dampak interdependensi ekonomi. Pendekatan ekonomi inilah yang menjadi dasar kebijakan ekonomi politik Cina terhadap Taiwan maupun Taiwan terhadap Cina. Tulisan ini secara umum membahas pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh kedua pihak antara

³⁵ Zhang Linzheng, "Cina's Economic Policy Towards Taiwan" dalam *Reflection on Triangular Relations of Beijing – Taipei – Washington since 1995*, (New York : Palgarve Macmillan, 2005), hal. 64 – 87.

satu dengan lainnya. Pendekatan ekonomi secara faktual lebih menguntungkan bagi Taiwan, namun dalam kalkulasi politik Cina lebih diuntungkan dalam jangka panjang.

Beijing selalu menganggap Taiwan sebagai bagian dari Cina sehingga target unifikasi menjadi tujuan utama dari setiap pemimpin Cina. Pemerintah Cina sendiri selalu berusaha menahan penggunaan kekuatan militer ketika bernegosiasi mengenai status Taiwan. Baik Taiwan maupun Cina telah berusaha menggunakan strategi interdependensi ekonomi dalam negosiasi terkait masa depan Taiwan.

Strategi interdependensi ekonomi ini dapat dikatakan menjadi sumber negosiasi utama Cina terhadap Taiwan. Kepentingan Cina akan terpenuhi bila interdependensi ekonomi dan kontak dari banyak jalur seperti jalur budaya dan pariwisata terbuka dalam rangka meningkatkan 'kesadaran' masyarakat Taiwan untuk mengidentifikasi dirinya sebagai orang Cina bukan orang Taiwan. Namun, justru kebijakan ekonomi yang diambil Cina terhadap Taiwan tidak terbukti meningkatkan nasionalisme Cina dalam masyarakat Taiwan, alih-alih meningkatkan kepuasan ekonomi pada masyarakat Taiwan. Dalam hal ini Kahler dan Kastner menganalisis bahwa walaupun Cina terlihat mengalah dalam setiap kebijakan ekonomi politiknya terhadap Taiwan, namun hal ini justru meningkatkan pertukaran ekonomi di kedua wilayah sehingga diharapkan akan tercipta integrasi ekonomi dan penurunan ketegangan militer di kedua wilayah.³⁶

Pada literatur lain, **James Hsiung** berargumen bahwa di era geoekonomi, hubungan antara negara-negara bukan lagi merupakan *zero-sum games* di mana tidak ada yang kalah ataupun menang. Dalam alasan yang dikemukakan Richard Rosecrance dalam konsepnya *vulnerable interdependence* (interdependensi yang rentan), semakin terintegrasi hubungan perdagangan dan investasi antara Cina dan Taiwan, maka semakin kecil kemungkinan mereka melukai hubungan tersebut

³⁶ Miles Kahler dan Scott L. Kastner, "Strategic Uses Of Economic Interdependence: Engagement Policies in South Korea, Singapore, and Taiwan", *Journal of Peace Research*, Vol. 43 No. 5 (2006), hal. 523 – 541.

karena hal itu sama saja dengan bunuh diri. Saat ini, Taiwan telah menempatkan lebih dari 50.000 perusahaannya untuk beroperasi di Cina, diperkirakan 70% investasi ekonomi luar negeri Taiwan mengalir ke Cina dan lebih dari 5% penduduk Taiwan tinggal di Cina. Kesadaran Taiwan akan ketergantungannya terhadap sumber daya alam impor dan kemungkinan eksklusi serta isolasi dari grup – grup ekonomi internasional membuka kemungkinan terjadinya integrasi antara Cina dan Taiwan. Dengan kata lain, semakin terintegrasinya Cina dan Taiwan dalam hal integrasi ekonomi, maka semakin banyak hal yang membuat mereka bersatu dan semakin kecil kemungkinan mereka menyakiti satu yang lainnya. Sebab interdependensi ekonomi akan menciptakan kerentanan satu sama lain di era geoekonomi. Oleh sebab itu, inisiatif Taiwan untuk membuat area perdagangan bebas hingga akhirnya menciptakan integrasi ekonomi dengan Cina bukan merupakan *zero sum game*.³⁷

Penelitian mengenai hubungan antara konflik politik dengan hubungan perdagangan antar negara sebetulnya telah banyak dibahas oleh para ahli Hubungan Internasional. Namun, menurut Scott Kastner, kasus yang terjadi di Cina – Taiwan cukup unik, mengingat pada umumnya semakin meningkat ketegangan politik antar negara, semakin menurun tingkat hubungan perdagangan keduanya. Berbeda dengan yang terjadi di Cina dan Taiwan hubungan perdagangannya justru meningkat ketika situasi politik semakin genting. Kastner berargumen bahwa faktor politik domestiklah yang pada akhirnya menentukan apakah hubungan ekonomi yang semakin meningkat dalam konflik politik justru mengurangi arus perdagangan dan investasi di kedua negara atau tidak.³⁸ Hal ini juga disepakati oleh Chen yang berpendapat bahwa situasi kondusif perdagangan antara Cina dan Taiwan hingga

³⁷ James C. Hsiung, “The Age of Geoeconomics, Cina’s Global Role, and Prospects of Cross-Strait Integration” dalam *Journal of Chinese Political Science* No. 14, (Maret 2009), hal. 113 – 133.

³⁸ Scott L. Kastner, “When Do Conflicting Political Relations Affect International Trade?” dalam *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 51, No. 4 (Agustus 2007), hal. 664-688

saat ini tidak terlepas dari peran politisi Taiwan yang pro unifikasi dengan Cina.³⁹

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan nampaknya terlihat bahwa hubungan ekonomi yang semakin erat antara Cina dan Taiwan akan berujung pada penurunan ketegangan konflik politik serta militer.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan ahli Hubungan Internasional yang menganut paham liberal seperti Oneal dan Russett yang mengemukakan akibat pada kemungkinan terjadinya perang sebab biaya yang dikeluarkan akan sangat besar, perubahan preferensi negara dan pengurangan penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik. Di sisi lain, para penganut realis seperti Robert Gilpin berpikir bahwa interdependensi bisa menjadi sumber konflik. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hubungan antara konflik dan integrasi ekonomi tidak semudah yang dijelaskan oleh paham realis maupun liberalis.

Konflik Cina-Taiwan yang telah terjadi selama lebih dari 60 tahun menjadi contoh kasus yang signifikan apakah peningkatan hubungan ekonomi akan mendekatkannya dengan perang atau damai.⁴¹ Berdasarkan pendapat kaum liberal, seperti yang diungkapkan oleh Karen, hubungan ekonomi Cina dan Taiwan yang semakin meningkat akan mengurangi kemungkinan perang antara kedua wilayah. Sementara Scott Kastner justru memandang bahwa hubungan ekonomi yang semakin meningkat tidak akan membawa perdamaian pada Selat Taiwan sebab di satu sisi pemimpin Cina tetap menganam Taiwan secara verbal dan secara militer berkali kali, sementara di sisi lain pemimpin Taiwan terus memprovokasi Cina untuk mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.⁴² Deng Ping dalam penelitiannya tahun 2000 menjelaskan dengan teori *relative gains* bahwa interdependensi

³⁹ Chien-Kai Chen, "China and Taiwan: A Future of Peace? A Study Of Economic Interdependence, Taiwanese Domestic Politics and Cross-Strait Relations" dalam *Josef Korbel Journal Of Advanced International Studies* diakses dari http://www.du.edu/Korbel/Jais/Journal/Volume1/Volume1_Chen.Pdf pada 10 Oktober 2011 pukul 11.30 WIB.

⁴⁰ Scott L. Kastner 2007, *Loc.Cit.*

⁴¹ Chien-Kai Chen, *Op.Cit.*

⁴² *Ibid.*

antara Cina dan Taiwan adalah interdependensi asimetris di mana Cina mendapat lebih banyak keuntungan relatif dari pada Taiwan, sebab ekonomi Cina tidak terlalu bergantung pada Taiwan namun sebaliknya Taiwan sangat bergantung pada ekonomi Cina.⁴³ Para pemimpin Cina berusaha menggunakan kepentingan pebisnis Taiwan di Cina untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Taiwan terhadap Cina. Oleh sebab itu, bagi para pemimpin Cina peningkatan hubungan ekonomi dengan Taiwan bukan soal ekonomi semata, melainkan soal keamanan nasional.

Kepentingan Cina dalam Kesepakatan Ekonomi Bilateral dan Multilateral

Salah satu artikel yang membahas kepentingan Cina dalam kesepakatan ekonomi, utamanya dalam penandatanganan perjanjian perdagangan bebas adalah artikel dari **Henry Gao** yang berjudul “Cina’s Strategy for Free Trade Agreements : Political Battle in the Name of Trade”. Dalam artikel ini diperlihatkan perkembangan jejaring *Free Trade Agreement* (FTA) yang dimiliki oleh Cina, termasuk komponen-komponen strategi yang diimplementasikan oleh Cina dalam penandatanganan FTA dan dampaknya terhadap ekonomi regional dan global. Cina yang pada awalnya menghindar untuk terlibat dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas di era 70an dan 80an, setahap demi setahap menjadi salah satu pemain teraktif di dunia dalam menginisiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA). Motivasi utama Cina menandatangani FTA sampai detik ini lebih menunjukkan motif politik daripada motif ekonomi. Cina ingin menunjukkan strateginya membentuk kondisi internasional yang kondusif untuk tumbuh secara damai (*peaceful rise*).⁴⁴

Sementara itu, penelitian mengenai kepentingan Cina dalam penandatanganan suatu kesepakatan ekonomi, baik secara bilateral maupun multilateral telah banyak dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia dalam skripsinya. Sejauh ini, ada tiga skripsi yang penulis

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Henry Gao, *Loc.cit.*

temukan meneliti tentang kepentingan Cina dalam konteks perjanjian ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan dan keuangan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh **Dyana Novita Sari** pada tahun 2010 berjudul “*Economic Statecraft* Cina dalam pembentukan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)”. Skripsi ini mengkaji pembentukan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-Cina dalam diplomasi baru Cina. Menggunakan kerangka teori *economic statecraft* David Baldwin, di mana alat ekonomi dapat digunakan untuk memperoleh tujuan kebijakan luar negeri (*economic means to political ends*), kalkulasi ekonomi rasional dalam untung rugi relatif (*fungibility*), serta sudut pandang pesan moral yang disampaikan. ACFTA mengurangi persepsi “China’s threat” di kawasan ASEAN (sengketa wilayah, peningkatan kekuatan militer Cina, kompetisi ekonomi). ACFTA dipilih karena Cina dan ASEAN memiliki struktur ekonomi yang saling mendukung dari sektor intra industri. Kebijakan ACFTA merupakan strategi *peaceful development*, menciptakan lingkungan regional yang aman dan stabil. Cina percaya bahwa ACFTA dapat mereduksi persepsi ASEAN mengenai ancaman Cina, sehingga Cina dapat tumbuh di lingkungan yang harmonis, memelihara stabilitas regional untuk menjaga pasar utama dan bahan mentah untuk pertumbuhan ekonomi Cina.⁴⁵

Penelitian kedua berjudul “Kepentingan Cina dalam Penandatanganan *Bilateral Currency Swap Agreement* Cina – Indonesia Tahun 2009” yang ditulis oleh **Lestari Aysha Damayanti** pada tahun 2010. Lestari mengungkapkan bahwa dalam menghadapi krisis *subprime mortgage* di Asia Timur, Cina memakai strategi bilateral berupa *Bilateral Currency Swap Agreement* (BCSA) dengan Indonesia. Padahal, dalam kerangka multilateral, sudah disepakati pembentukan *Chiang Mai Initiative* untuk mencegah krisis di Asia Timur. Lestari menyimpulkan bahwa kepentingan ekonomi Cina dalam BCSA antara lain untuk menjaga kelanaran

⁴⁵ Dyana Novita Sari, *Economic statecraft Cina dalam pembentukan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* skripsi, (Depok : Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, 2010).

hubungan dagang dengan Indonesia, memastikan kelancaran pasokan energi dari Indonesia, serta akibat inefisiensi CMI sebagai mekanisme ketahanan ekonomi di Asia Timur. Kepentingan politik Cina dalam BCSA adalah mendekati negara-negara anggota ASEAN tanpa pengaruh Jepang dan Amerika Serikat.⁴⁶

Penelitian tentang kepentingan Cina dalam kesepakatan ekonomi bilateral juga pernah ditulis **Rinnay Nitrabening Wahyunnisa** pada tahun 2009 dengan judul “Kepentingan Cina dalam Kesepakatan Kemitraan Strategis dengan Indonesia” tahun 2005. Dalam skripsi tersebut Rinnay mengungkapkan bahwa Cina memiliki dua kepentingan, secara politik dan ekonomi dalam penandatanganan kesepakatan kemitraan strategis dengan Indonesia. Kepentingan Cina secara ekonomi untuk mengamankan kebutuhan energi Cina serta meningkatkan keuntungan ekonomi perdagangan dan investasi. Kepentingan politik Cina untuk meningkatkan *power* dan pengaruhnya di ASEAN serta menciptakan stabilitas lingkungan yang kondusif bagi perekonomiannya.⁴⁷

Konteks tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian di atas adalah untuk membandingkan serta mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan kepentingan Cina dalam penandatanganan kesepakatan ekonomi. Dapat dilihat dari literatur-literatur di atas, dalam penandatanganan kesepakatan ekonomi, Cina berniat untuk membangun *image* positif kepada negara-negara lain.

Dampak Penandatanganan ECFA terhadap Hubungan Lintas Selat

Sebenarnya penelitian mengenai ECFA sudah banyak ditulis oleh beberapa ahli. Namun, penulisan tersebut lebih banyak menganalisis dampak penandatanganan ECFA terhadap hubungan lintas selat dan menganalisa untung rugi perjanjian tersebut dari sisi Taiwan. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang

⁴⁶ Lestari Aysha Damayanti, *Kepentingan Cina dalam Penandatanganan Bilateral Currency Swap Agreement Cina – Indonesia Tahun 2009* skripsi, (Depok : Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, 2010).

⁴⁷ Rinnay Nitrabening Wahyunnisa, *Kepentingan Cina dalam Kesepakatan Kemitraan Strategis dengan Indonesia tahun 2005* skripsi, (Depok : Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, 2009).

menganalisa kepentingan Cina secara lebih dalam dari perjanjian tersebut. Penelitian – penelitian yang ada saat ini rata-rata hanya menyebutkan bahwa tujuan Cina dalam penandatanganan ECFA untuk unifikasi dengan Taiwan dalam jangka panjang tanpa ada analisa mendetail dan mendalam. Oleh karena itu, topik penelitian yang penulis ajukan valid untuk dibahas dan dianalisa lebih dalam menjadi sebuah skripsi.

Tulisan pertama mengenai dampak ECFA terhadap integrasi hubungan lintas selat saya dapatkan dari penelitian **Zhao Hong** dan **Sarah Y. Tong** berjudul “Taiwan-Mainland Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) : Implications for Cross-Strait Relations”. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa ECFA merupakan situasi ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak walaupun Cina memiliki dampak jangka panjang. Melalui hubungan ekonomi yang lebih erat, Cina berharap untuk membawa Taiwan lebih dekat dengan integrasi politik lintas selat. Presiden Cina, Wen Jiabao dalam laporan tahunannya pada sesi kedua Kongres Rakyat Nasional mengemukakan bahwa Cina akan mengakselerasi normalisasi hubungan ekonomi lintas selat dan memfasilitasi penandatanganan perjanjian komprehensif dalam kerjasama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dari sini dapat dilihat dampak penandatanganan ECFA dalam jangka panjang baik secara ekonomi, politik maupun strategis. Cina memiliki tendensi untuk meningkatkan integrasi ekonomi lintas selat dan membawa Taiwan lebih dekat secara politik dan budaya sehingga tercipta integrasi politik lintas selat.⁴⁸

Tulisan selanjutnya dari **Daniel H. Rosen** dan **Zhi Wang** berjudul “Deepening Cina-Taiwan Relations through the Economic Cooperation Framework Agreement”. Tulisan ini membahas bagaimana ECFA menjadi perjanjian yang mengubah hubungan Cina - Taiwan secara fundamental dan berdampak pada ekonomi regional juga terhadap pengaruh Amerika Serikat dalam hubungan

⁴⁸ Zhao Hong & Sarah Y. Tong, “Taiwan-Mainland Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) : Implications for Cross-Strait Relations”, *EAI Background Brief No. 452*, 21 Mei 2009, diakses dari <http://www.eai.nus.edu.sg/BB452.pdf> pada 12 September 2011 pukul 22.30 WIB.

ekonomi trans pasifik. ECFA membawa kesempatan bagi Cina untuk melakukan pendekatan ulang terhadap kemungkinan integrasi politik dengan Taiwan. Dengan adanya ECFA, prospek integrasi politik antara Cina dan Taiwan semakin besar seiring besarnya kesejahteraan ekonomi yang didapatkan, sehingga ECFA menjadi kepentingan bersama Cina dan Taiwan.⁴⁹

Proyeksi yang dilakukan penulis mengindikasikan bahwa liberalisasi ekonomi yang dibawa oleh perjanjian ECFA akan menghasilkan reformasi ekonomi yang menguntungkan, khususnya bagi Taiwan. Kemungkinan lain dari ditandatanganinya perjanjian ini adalah iluminasi peran Amerika Serikat dalam integrasi ekonomi di Asia Timur. Washington dan Taipei dapat menjadi penyeimbang dalam momentum geoekonomi yang menempatkan Cina sebagai pusat kekuatan ekonomi di Asia Timur. Dapat disimpulkan bahwa ECFA sangat penting secara ekonomi, dampaknya dapat dirasakan tidak hanya pada hubungan Cina dan Taiwan, hubungan Cina-Taiwan dengan regional, bahkan hubungan regional dengan Amerika Serikat.⁵⁰

Dari berbagai tinjauan pustaka yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa topik mengenai kepentingan Cina dalam penandatanganan ECFA cukup signifikan untuk dijadikan penelitian skripsi. Sebab topik tersebut unik, belum pernah ada penelitian yang secara khusus membahas kepentingan Cina dalam ECFA, merupakan penelitian lanjutan untuk menganalisa kebijakan luar negeri Cina khususnya dalam sebuah kesepakatan ekonomi dan dapat dijadikan landasan untuk memproyeksikan hubungan Cina-Taiwan setelah ditandatanganinya ECFA.

I.6. Rencana Pembabakan Skripsi

Penelitian dengan permasalahan dan model analisa di atas akan disusun ke dalam lima bab. **Bab I** yang merupakan bagian pendahuluan terdiri dari latar

⁴⁹ Daniel H. Rosen dan Zhi Wang, *Loc.cit* .

⁵⁰ *Ibid*.

belakang permasalahan, rumusan permasalahan kerangka pemikiran, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, rencana pembabakan skripsi, serta tujuan dan signifikansi penelitian. **Bab II** akan menguraikan variabel dependen berupa perjanjian ECFA yang dianalisa menggunakan konsep *economic cooperation*. **Bab III** akan menganalisa dua komponen dasar pertama dari *economic statecraft* dalam penandatanganan ECFA yakni tipe instrumen yang dipilih dan identifikasi sasaran (target) yang ditujukan melalui kebijakan tersebut.

Selanjutnya, pada **bab IV** akan dilakukan pembuktian *economic statecraft* dalam penandatanganan ECFA dari komponen dasar terakhirnya, yakni tujuan. Tujuan – tujuan yang berhasil diidentifikasi inilah yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan Cina dalam penandatanganan ECFA, sehingga pertanyaan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dijawab.

Akhirnya, pada **bab V** akan disimpulkan berbagai temuan dari analisa yang telah dilakukan selama penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang diajukan. Selain itu, pada bab ini akan diusulkan rekomendasi yang diharapkan berguna bagi pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

I.7. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Cina dalam menandatangani perjanjian perdagangan dengan Taiwan. Tujuan ini berkaitan dengan analisa perilaku Cina sebagai negara yang tumbuh menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Dalam usaha mencapai status hegemon dunia, seringkali Cina terhambat oleh persoalan integrasi teritorial, salah satunya dengan Taiwan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mencari tahu motivasi Cina dibalik penandatanganan ECFA.

Signifikansi penelitian dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian dinamika pemikiran ekonomi politik internasional dalam

mengaplikasikan konsep nasionalisme ekonomi serta *economic statecraft*. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan signifikansi pada kajian dinamika Asia Timur serta kebijakan luar negeri dan keamanan Cina ketika membahas interaksi ekonomi politik antara Cina – Taiwan.

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk mengetahui perilaku Cina sebagai negara dalam menjalankan kebijakan ekonomi luar negerinya sehingga dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia, khususnya bagi pengambil kebijakan (pemerintah) di Indonesia ketika merancang dan melaksanakan kerjasama ekonomi dengan Cina.



BAB II

KERANGKA KESEPAKATAN KERJASAMA EKONOMI CINA – TAIWAN: MOMENTUM BARU HUBUNGAN LINTAS SELAT

Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement yang dalam bahasa Mandarin ditulis 两岸经济合作框架协议 (Liǎng'àn Jīngjì Hézuò Jiàgòu Xiéyì) menjadi suatu perjanjian ekonomi fenomenal karena melibatkan dua aktor dalam Hubungan Internasional yang terlibat konflik politik berkepanjangan, yakni Cina dan Taiwan. Pada bab ini akan diuraikan secara detail mengenai latar belakang, proses negosiasi dan isi perjanjian ECFA. Terakhir, sebagai penutup, akan dianalisa implementasi ECFA melalui penerapan program “Early Harvest” pada semester pertama tahun 2011 beserta dampak penandatanganan ECFA terhadap ekonomi Cina dan Taiwan.

II.1. Sekilas Mengenai ECFA

Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Lintas Selat (*Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement / ECFA*), ditandatangani pada 29 Juni 2010 dan mulai efektif berlaku pada 12 September 2010. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Chiang Ping Kung, ketua Strait Exchange Foundation (SEF) dan Chen Yunlin, presiden Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS). Kedua institusi tersebut adalah institusi privat yang mewakili pemerintah Taiwan dan pemerintah Cina dalam melakukan hubungan lintas selat. Penandatanganan ECFA merupakan langkah besar dalam normalisasi hubungan ekonomi antara Cina dan Taiwan sekaligus sebagai batu loncatan bagi integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur.⁵¹

⁵¹ Shiro Armstrong, “Taiwan's Asia Pacific Economic Strategies Post-Economic Cooperation Framework Agreement”, EABER Working Paper Series Paper No. 63, diakses dari <http://www.eaber.org/intranet/documents/80/2310/EABER%20Working%20Paper%2063.pdf>, hal. 3.

Setelah 20 tahun hubungan ekonomi antara Cina dan Taiwan berjalan secara informal dan tidak langsung, akhirnya melalui penandatanganan ECFA hubungan ekonomi lintas selat diformalkan melalui sebuah institusi. ECFA memiliki dampak signifikan terhadap hubungan lintas selat, baik secara politik maupun secara ekonomi. ECFA membuka kesempatan bagi Taiwan maupun Cina untuk bergabung ke dalam permainan ekonomi global lebih jauh lagi.⁵²

Melalui ECFA, Cina berkomitmen untuk menurunkan tarif bagi produk impor dari Taiwan secara bertahap mulai 1 Januari 2011 selama tiga tahun ke depan melalui mekanisme “Early Harvest” (panen awal). Pada mekanisme “Early Harvest”, Cina sepakat menurunkan tarif bagi 539 jenis produk barang dari Taiwan (termasuk 18 jenis produk pertanian dan perikanan) dengan nilai 10,14% jumlah ekspor Taiwan ke Cina. Selain itu, Cina juga akan membuka 11 kategori usaha jasa dan sektor keuangan bagi pengusaha dari Taiwan. Di lain pihak, Taiwan setuju untuk mengurangi tarif secara bertahap bagi 267 jenis barang dari Cina yang bernilai 10,53% jumlah produk yang ekspor Cina ke Taiwan.⁵³

ECFA menjadi suatu perjanjian awal untuk meningkatkan kerjasama ekonomi lintas selat dalam mempromosikan perdagangan komoditas, perdagangan jasa, perlindungan investasi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang nantinya akan dibahas lebih lanjut pada komite kerjasama ekonomi lintas selat.⁵⁴ ECFA merupakan sebuah “framework agreement” (kerangka kesepakatan) yang dibuat untuk menjadi fondasi bagi negosiasi – negosiasi dan kerjasama – kerjasama ekonomi selanjutnya antara Cina – Taiwan. Kesepakatan ekonomi yang komprehensif akan dilakukan secara bertahap untuk mengurangi biaya pada perubahan-perubahan struktural yang diperlukan untuk menormalkan hubungan ekonomi lintas selat.

⁵² Xinpeng Xu, “A deal that will shape Taiwan’s economic future in Asia”, *East Asia Forum*, 4 Agustus 2010, diakses dari <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/04/a-deal-that-will-shape-taiwans-economic-future-in-asia/> pada 9 Desember 2011 pukul 14.32 WIB.

⁵³ “Taiwan-mainland ECFA Formally Takes Effect”, *The China Post*, 12 September 2010.

⁵⁴ *Ibid.*

II.2. Latar Belakang Pembentukan ECFA

Sejak pertemuan ASEAN + 3 diadakan pertama kalinya pada Desember 1997, Cina secara bertahap menjadi kekuatan utama pendorong kerjasama ekonomi regional. Saat itu, Cina mendorong ASEAN untuk melakukan negosiasi pembentukan kawasan perdagangan bebas bersama ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA). ACFTA yang efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2010 merupakan pukulan telak bagi Taiwan. Pemotongan tarif hingga 0% yang dilakukan antara Cina dan negara-negara ASEAN merupakan usaha mengurangi hambatan perdagangan pada wilayah itu, namun di sisi lain merugikan negara yang juga memiliki tujuan ekspor ke ASEAN dan Cina. Taiwan yang menjadikan Cina sebagai negara tujuan ekspor utamanya, akan mendapat kerugian dengan tarif yang dikenakan pada produk-produk ekspornya sebesar 7 – 25%. Hal ini tentu menjadikan perbedaan harga yang cukup signifikan antara barang-barang asal Taiwan dan barang-barang dari ASEAN yang masuk ke pasar Cina. Selain dengan ASEAN, Cina juga telah menandatangani FTA dengan wilayah administrasi khususnya, Hong Kong dan Macau pada tahun 2003 yang diberi nama *Closer Economic Partnership Agreement (CEPA)*.⁵⁵

Taiwan yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara manapun di Asia Timur merasa dikucilkan dari tren integrasi ekonomi regional. Tren integrasi ekonomi regional ini sendiri membawa dampak buruk bagi perekonomian Taiwan. Taiwan mengalami kerugian yang cukup besar karena penghasilan negaranya yang bertumpu pada ekspor akan terhambat oleh tarif maupun hambatan non tarif ketika akan memasuki pasar di Asia Timur. Produk domestik bruto Taiwan sebesar 63% berasal dari ekspor dan 2/3nya merupakan nilai ekspor dari Taiwan ke Cina. Kerugian yang diderita Taiwan akibat masih adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan akan berdampak nyata pada usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan komponen terbesar

⁵⁵ “ECFA Makes Taiwan a New Gateway to China” diakses dari http://jonesday.com/ecfa_makes_taiwan/ pada 19 November 2011 pukul 20.30 WIB.

penyokong aktivitas ekonomi di Taiwan. Dari laporan terakhir tahun 2010, diperkirakan sekitar 110.000 pekerja di Taiwan akan kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari ASEAN + 3 FTA karena produk-produk ekspor Taiwan seperti barang petrokimia, elektronik, tekstil dan peralatan mesin akan dikenakan cukai impor sebesar 6,5%. Situasi ini bertambah parah dengan kehadiran krisis finansial dan guncangan ekonomi global. Taiwan mengalami kejatuhan nilai ekspor lebih dari 20% di tahun 2009, turunnya angka pertumbuhan ekonomi hingga 3,3% di tahun 2009 dari 5,5% di tahun 2008 serta kontraksi ekonomi yang cukup signifikan sebesar 8,4% pada kuartir keempat di tahun 2008. Selain itu, jumlah pengangguran yang naik sebesar 5% pada Desember 2008 dan naik 5,8% pada Maret 2009 menjadikan Taiwan sebagai negara dengan kenaikan jumlah pengangguran tertinggi di Asia Timur pada periode tersebut.⁵⁶

ECFA lahir dari kekhawatiran Taiwan terhadap fenomena integrasi ekonomi regional yang ditandai semakin menjamurnya perjanjian perdagangan bebas (FTA) di antara negara-negara di dunia. Walaupun partner dagang terbesar Taiwan adalah negara-negara besar seperti Jepang dan Amerika Serikat yang aktif dalam penandatanganan FTA, namun Taiwan sendiri hanya memiliki FTA dengan sejumlah kecil negara di kawasan Amerika Tengah.⁵⁷ Hal ini disebabkan oleh status politiknya yang unik. Taiwan tidak diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional kecuali oleh 23 negara akibat prinsip “One China”. Negara-negara yang berhubungan dengan Cina secara diplomatik tidak boleh membuka hubungan diplomatik juga dengan Taiwan, sehingga hanya sedikit negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

ECFA menjadi strategi Taiwan untuk mengurangi diskriminasi perdagangan pada Taiwan akibat FTA-FTA yang dilakukan partner dagangnya. Taiwan berpikir, bagaimanapun juga, permasalahan politik yang mereka hadapi dengan Cina tidak

⁵⁶ Zhao Hong dan Sarah Y. Tong, *Loc.cit*, hal. 3 – 4.

⁵⁷ Info selengkapnya mengenai FTA yang ditandatangani Taiwan dapat dilihat di <http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=158&lang=1&redirect=1>.

boleh menjadi hambatan untuk menandatangani FTA dengan partner dagang yang besar.⁵⁸ Namun, kenyataannya, hubungan politik antara Cina dan Taiwan tetap menjadi faktor penentu relasi Taiwan dengan dunia ekonomi internasional.

Sebelumnya, tidak ada perdagangan secara langsung antara Cina dan Taiwan hingga tahun 2000. Semuanya dilakukan melalui Hong Kong ataupun Macau, sehingga transaksi perdagangan yang dilakukan antara Cina – Taiwan menjadi lebih mahal karena harus membiayai transitnya barang-barang. Selama ini, Taiwan cenderung tertutup dan berhati-hati dalam hubungan ekonomi dengan Cina. Hal ini dapat dilihat dari minimnya nilai ekspor Taiwan ke Cina dan dibatasinya barang-barang impor Cina yang masuk ke Taiwan dengan alasan keamanan nasional.⁵⁹

Cina sendiri menggunakan pengaruh politiknya agar tidak ada negara yang menandatangani FTA dengan Taiwan baik dalam kawasan Asia Timur maupun dengan negara di luar kawasan Asia Timur. Melalui prinsip “One China” yang diterapkan, suatu negara yang telah membuka hubungan diplomatik dengan Cina tidak diperbolehkan membuka hubungan diplomatik dengan Taiwan, termasuk membentuk suatu kesepakatan FTA dengan Taiwan. Normalisasi hubungan ekonomi dengan Cina merupakan salah satu kunci bagi Taiwan agar tetap dapat bermain di kancah ekonomi internasional.

Mengingat besarnya dampak yang dirasakan Taiwan akibat tersingkirkan dari tren integrasi ekonomi regional, presiden Taiwan yang dilantik tahun 2008, Ma Ying Jeou bergerak cepat untuk fokus menyelesaikan permasalahan – permasalahan ekonomi di Taiwan. Ma menganggap sangat penting bagi Taiwan untuk membentuk suatu perjanjian perdagangan bebas dengan Cina, yang merupakan partner dagang terbesar Taiwan. Selain itu, hal ini juga sangat penting dalam proses normalisasi hubungan Cina – Taiwan. Atas dasar tersebut Taiwan mengajukan tawaran

⁵⁸Mainland Affairs Council, “Economic Cooperation Framework Agreement Background”, diakses dari www.mac.gov.tw/public/data/051116322071.pdf pada 5 September 2011 pukul 21.00 WIB.

⁵⁹Zhang Linzeng, *Loc.cit*, hal. 80.

negosiasi untuk membentuk sebuah kesepakatan ekonomi dengan Cina.

Secara umum, tujuan dibentuknya kesepakatan ekonomi antara Taiwan dan Cina adalah untuk mempromosikan hubungan ekonomi lintas selat dan normalisasi hubungan perdagangan. Walaupun kedua pihak merupakan anggota WTO namun masih ada diskriminasi dan hambatan perdagangan antara keduanya. Bagi Taiwan, kesepakatan ekonomi ini memiliki arti penting bagi usaha Taiwan untuk masuk ke dalam integrasi ekonomi regional serta untuk mengundang lebih banyak lagi investor asing masuk ke Taiwan. Sementara bagi Cina, kesepakatan ini dapat menjadi salah satu upaya normalisasi hubungan ekonomi lintas selat.

Dari latar belakang di atas, dapat kita simpulkan bahwa ECFA diawali dari inisiatif Taiwan yang merasa terdiskriminasi dengan adanya sistem jejaring FTA di kawasan Asia Timur. Inisiatif tersebut direspon dengan baik oleh Cina. Dalam penjelasan berikutnya akan diuraikan lebih mendalam lagi bagaimana proses negosiasi yang berlangsung antara Cina dan Taiwan sehingga menghasilkan keputusan penandatanganan ECFA yang menjadi sejarah baru hubungan lintas selat.

II.3. Proses Negosiasi yang Singkat

Aktivitas ekonomi Cina – Taiwan mengalami percepatan yang luar biasa ketika Taiwan dipimpin oleh presiden Chen Sui Bian, sehingga pada tahun 2001, Vincent Saw yang kemudian menjadi wakil presiden Ma Ying Jeou mengajukan proposal mengenai *cross strait common market* (pasar bersama lintas selat). Namun, proposal tersebut cenderung tidak disetujui para pemimpin oposisi di Taiwan saat itu.⁶⁰ Pada tahun 2005, Hu Jintao bertemu dengan Lien Chan, ketua umum partai Kuomintang (KMT) dari Taiwan membicarakan mengenai “aspirasi bersama dan kemungkinan pembangunan serta perdamaian dalam hubungan lintas selat”. Pada pertemuan tersebut kedua pihak sepakat untuk mempromosikan pertukaran-pertukaran ekonomi dan membangun mekanisme kerjasama ekonomi

⁶⁰ John F. Copper, *Taiwan's 2008 Presidential and Vice Presidential Election: Maturing Democracy*, (Baltimore: University of Maryland School of Law, 2008), hal. 57.

lintas selat.⁶¹

Kemudian pada tahun 2008, enam perusahaan dan organisasi industri terbesar di Taiwan meminta presiden Taiwan terpilih saat itu, Ma Ying Jeou untuk merealisasikan janji – janji kampanyenya terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Taiwan dan penguatan hubungan ekonomi dengan Cina. Saat itu, mereka sangat khawatir akan hilangnya daya saing produk ekspor Taiwan dengan kehadiran FTA-FTA di kawasan Asia Timur. Mereka kemudian mendesak pemerintah Taiwan untuk melakukan langkah cepat penyelamatan ekonomi agar kalangan bisnis Taiwan dapat tetap bersaing dengan barang-barang ekspor dari ASEAN dan negara – negara Asia Timur lain di pasar Cina.

Selanjutnya, untuk merealisasikan janji – janji kampanyenya pada tahun 2009, pemerintahan Ma mengajukan penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi komprehensif dengan Cina (*Comprehensive Economic Cooperation Agreement / CECA*). Namun, karena penamaan CECA diidentikkan dengan CEPA (*Closer Economic Partnership Agreement*) antara Cina dengan Hong Kong serta Cina dengan Macau sebagai daerah administrasi spesial Cina, maka pemerintah Ma mengajukan nama baru yakni ECFA yang lebih dekat dengan pemaknaan FTA sesuai dengan aturan yang ada di WTO.⁶² Tentu saja usulan ini disambut dengan positif oleh pemerintah Cina. SEF dan ARATS pun sepakat untuk membuka kembali negosiasinya pada Desember 2008.

Jangka waktu proses negosiasi yang dilakukan antara SEF dan ARATS hingga akhirnya mereka sepakat menandatangani ECFA dapat dikatakan sangat singkat. Proses negosiasi mengenai ECFA pertama kali dilakukan pada perundingan ronde keempat antara SEF – ARATS pada Desember 2009.⁶³ Perundingan selanjutnya dilakukan pada 26 Januari 2010 di Beijing, di mana 13 delegasi Taiwan

⁶¹ <http://english.gov.cn>

⁶² Zhao Hong dan Sarah Y. Tong, *Loc.cit*, hal. 3 - 6.

⁶³ “, Chiang-Chen meeting to herald start of ECFA talks” diakses dari <http://www.chinapost.com.tw/taiwan/china-taiwan-relations/2009/11/18/233152/Chiang-Chen-meeting.htm> pada 5 Desember 2011 pukul 09.59 WIB.

yang dipimpin Kao koong-lian, sekretaris jendral SEF bertemu dengan Zheng Lizhong, wakil presiden ARATS yang mewakili Cina.⁶⁴ Kemudian perundingan ketiga dilakukan di Taipei pada 31 Maret 2010⁶⁵ dan pada 13 Juni 2010 dilakukan negosiasi lanjutan di Beijing.⁶⁶ Akhirnya kesepakatan akhir ECFA ditandatangani setelah ronde kelima negosiasi SEF dan ARATS pada 29 Juni 2010 di Chongqing, Cina. Kesepakatan akhir ECFA ini ditandatangani oleh Chiang Pin Kung, ketua umum SEF yang mewakili Taiwan dan Chen Yunlin, presiden ARATS yang mewakili Cina. ECFA akhirnya mulai berlaku pada 12 September 2010 dan penurunan tarif pada produk-produk yang termasuk dalam daftar “Early Harvest” berlaku efektif pada 1 Januari 2011 setelah disetujui oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif kedua negara.⁶⁷

Walaupun negosiasi yang dilakukan cukup singkat, namun sebelumnya telah ada peninjauan yang dilakukan kedua pihak. Perjanjian ECFA merupakan sebuah hasil dari 37 pertemuan antara SEF dan ARATS yang dimulai pada 4 November 1991. Namun, akibat ketegangan politik dan isu mengenai keamanan nasional, negosiasi ini sempat jalan di tempat.⁶⁸ Negosiasi kemudian dimulai lagi pada bulan Desember 2008 ketika kedua pihak sepakat untuk duduk bersama dalam satu forum membahas hubungan ekonomi, perdagangan dan kebudayaan yang dilanjutkan dengan riset mendalam yang dilakukan masing – masing pihak. Pada tahun 2009 kemudian mulai disusun sebuah kerangka kerjasama ekonomi dan dilakukan negosiasi serta diskusi secara informal dan baru pada tahun 2010 dimulailah negosiasi secara formal (berupa isi teks dan program “Early Harvest”).

⁶⁴ “ECFA Talks Set at 26th” diakses dari <http://www.chinapost.com.tw/taiwan/china-taiwan-relations/2010/01/25/242130/p2/ECFA-talks.htm> pada 5 Desember 2011 pukul 10.04 WIB.

⁶⁵ “Mainland Affairs chief defends trade pact with China” diakses dari http://focustaiwan.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=aECO&ID=201004040015 pada 5 Desember 2011 pukul 10.11 WIB.

⁶⁶ “SEF Chairman Sets Goal to Sign ECFA by June” diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-04/03/content_9683485.htm pada 5 Desember 2011 pukul 10.15 WIB.

⁶⁷ “Taiwan – China Trade Deal Passed by Legislators” <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11008076> pada 5 Desember 2011 pukul 10.17 WIB.

⁶⁸ Y.C. George Lin, “The Background and Impactsof ECFA on China and Taiwan”, makalah dipresentasikan di National Chung Cheng University, Taiwan pada 19 Maret 2011, hal. 4.

Rangkaian negosiasi antara SEF dan ARATS yang dikenal dengan nama Chiang – Chen Talks (merujuk pada nama Chiang Pin – Kung dan Chen Yunlin) sebelum menghasilkan kesepakatan ECFA dapat dirangkum pada tabel berikut :

Tabel II.1 Rangkaian Negosiasi Chiang – Chen Talks

Ronde	Tanggal Pertemuan	Tempat	Hasil
1	13 Juni 2008	Beijing, Cina	Penandatanganan kesepakatan “Minutes of Talks on Cross-Strait Charter Flights” dan “Cross-Strait Agreement on Travel by Mainland Residents to Taiwan”
2	4 November 2008	Taipei, Taiwan	Menyepakati isi dari empat perjanjian terkait jalur penerbangan lintas selat, jalur pelayaran lintas selat, jasa persuratan dan keamanan pangan
3	26 April 2009	Nanjing, Cina	Kedua pihak menyelesaikan dan menyepakati perjanjian kerjasama pemberantasan kriminalitas bersama dan bantuan hukum timbal balik, kerjasama keuangan lintas selat serta penerbangan regular lintas selat. Kedua pihak juga telah mencapai consensus terkait promosi investasi Cina di Taiwan.

4	22 Desember 2009	Taichung, Taiwan	Kedua pihak sepakat menandatangani perjanjian mengenai karantina dan inspeksi produk pertanian, kerjasama standarisasi, inspeksi dan sertifikasi produk industry serta kolaborasi pekerja di sektor perikanan.
5	13 Juni 2010	Chongqing, Cina	Berhasil mencapai kesepakatan mengenai isi perjanjian inti ECFA beserta lima dokumen yang menjadi lampirannya (ANNEX).

Sumber : <http://www.taiwansecurity.org/TSR-CC.htm#News1> dan Biro Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Urusan Ekonomi, Republik Cina, 2010.

Singkatnya negosiasi yang dilakukan antara SEF dan ARATS hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan ECFA, disebabkan karena kesepakatan yang ditandatangani merupakan sebuah *framework* (kerangka kesepakatan) yang berisi pokok-pokok dan garis besar tujuan yang mengatur hubungan ekonomi kedua pihak secara umum. Isi perjanjian ECFA sendiri dibuat tidak spesifik karena untuk membuat perjanjian perdagangan bebas yang spesifik dan mencakup seluruh sektor membutuhkan waktu negosiasi yang panjang. Sementara pada waktu itu, karena keterdesakan Taiwan yang semakin terkucil dari integrasi ekonomi global, maka kerangka perjanjian ECFA hanya memuat preferensi pengurangan tarif bagi sektor-sektor industri kunci yang sensitif dan vital bagi kelangsungan ekonomi Taiwan.

II.4. Isi Perjanjian ECFA⁶⁹

Naskah utama perjanjian ECFA terdiri dari 5 bab, yang berisi pendahuluan, prinsip – prinsip umum, aturan perdagangan dan investasi, kerjasama ekonomi, daftar “Early Harvest” dan aturan lain – lain. Semuanya terangkum dalam 16 pasar yang menyangkut sebagian besar aktivitas ekonomi lintas selat.⁷⁰ Naskah perjanjian ECFA juga dilengkapi oleh 5 Annex (lampiran) yang berisi daftar produk dan pengurangan tarif yang disepakati dalam program “Early Harvest” untuk perdagangan barang, *rules of origin* (aturan- aturan asli) sementara untuk produk-produk barang yang tercantum dalam program “Early Harvest”, *safeguard measures* (mekanisme perlindungan) di antara kedua pihak bagi produk-produk barang yang masuk dalam program “Early Harvest”, ukuran – ukuran liberalisasi dan sektor-sektor jasa yang dibuka pada program “Early Harvest”, dan definisi penyedia jasa yang dapat masuk ke sektor yang telah diliberalisasi melalui program “Early Harvest”

Dalam teks ECFA, Cina dan Taiwan disebut dengan istilah *two parties* (kedua pihak). Tidak ada penyebutan nama Republik Rakyat Cina ataupun Republik Cina, Taiwan pada isi naskah tersebut. Kedua pihak dalam perjanjian tersebut sepakat untuk menguatkan hubungan ekonomi dan perdagangan lintas selat dengan prinsip kesetaraan, timbal balik dan progresif. ECFA disusun berdasarkan prinsip – prinsip dasar yang ada di WTO dengan konsiderasi kondisi ekonomi kedua pihak. Adapun tujuan dari kesepakatan ECFA yang tercantum dalam bab I, pasal pertama ialah :

1. Untuk menguatkan dan memajukan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi antara kedua pihak.

⁶⁹ Dirangkum dari isi perjanjian ECFA yang diakses dari <http://www.wantchinatimes.com/UploadFiles/ECFA.pdf>.

⁷⁰“ ECFA with China Ready for Signing” diakses dari

<http://www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national-news/2010/06/14/260568/ECFA-with.htm>
pada 7 Desember 2011 pukul 20.30 WIB.

2. Untuk mempromosikan liberalisasi barang dan jasa di antara kedua pihak dan secara bertahap membentuk fasilitas investasi yang adil, transparan serta mekanisme perlindungan investasi.
3. Untuk memperluas area kerjasama ekonomi sebuah mekanisme.

Masih di bab pembukaan, pada pasal kedua tercantum bentuk – bentuk kerjasama ekonomi yang harus dilakukan kedua belah pihak. Bentuk – bentuk kerjasama ekonomi yang tertuang dalam naskah ECFA antara lain pengurangan atau penghapusan hambatan tarif dan hambatan non tarif secara bertahap pada barang-barang yang diperdagangkan antara kedua pihak, pengurangan atau penghapusan restriksi pada sektor – sektor perdagangan jasa, penyediaan perlindungan investasi dan promosi investasi dua arah, serta promosi perdagangan dan fasilitasi kerjasama serta pertukaran industri.

Pada bab II kemudian dijelaskan mengenai aturan – aturan tentang investasi dan perdagangan baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa. Pada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, yang termasuk dalam bab II disebutkan bahwa perlu adanya negosiasi lanjutan mengenai perdagangan barang secara bilateral, perdagangan jasa dan investasi. Selanjutnya, pada bab III yang mencakup pasal tentang kerjasama ekonomi, Kedua pihak menyetujui akan meningkatkan kerjasama ekonomi di beberapa area berikut namun tidak terbatas pada kerjasama dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kerjasama di sektor keuangan, fasilitasi dan promosi perdagangan, kerjasama bea cukai, kerjasama *e-commerce*, promosi kerjasama industri, promosi kerjasama UMKM, dan promosi pembentukan bisnis – bisnis yang saling menguntungkan oleh badan – badan ekonomi dan perdagangan kedua pihak. Selain itu, kedua pihak juga harus terus melakukan konsultasi pada program – program yang spesifik dan telah disebutkan pada pasal ini.

Sementara itu, pada bab IV yang meliputi pasal 8 dan pasal 9 membahas tentang program “Early Harvest”. Program “Early Harvest” merupakan sebuah

skema yang konsepnya mengikuti program “Early Harvest” yang ada di ACFTA namun diperluas pada perdagangan jasa. Melalui program tersebut kedua pihak sepakat untuk memprioritaskan pengurangan tarif secara signifikan pada produk-produk yang didaftarkan. Seperti yang telah disebutkan di atas, ada 539 produk Taiwan yang menikmati program “Early Harvest”, sementara hanya ada 267 produk Cina yang bisa menikmati program yang sama. Berikut ini merupakan tabel pembagian jenis produk barang yang didaftarkan oleh kedua pihak pada program “Early Harvest” :

Tabel II.2. Daftar Sektor dan Nilai Perdagangan Produk yang Disetujui Masuk ke Program “Early Harvest”

Sektor	Persetujuan Cina		Persetujuan Taiwan	
	Jumlah Jenis Barang	Nilai Perdagangan (dalam 100 juta dolar)	Jumlah Jenis Barang	Nilai Perdagangan (dalam 100 juta dolar)
Petrokimia	88	5,944	42	0,329
Mesin	136	1,588	22	0,116
Tekstil	107	1,143	69	0,474
Transportasi	50	0,148	17	0,409
Pertanian	18	0,016	0	0
Lain – lain	140	4,997	117	1,53
Jumlah	539	13,838	267	2,858

Sumber : ICRIEI 2011, diakses dari <http://www.icrier.org/pdf/Session%20IV-Kristy%20Hsu-Presentation.pdf>

Dapat dilihat bahwa nilai perdagangan yang “dikorbankan” Cina lebih besar daripada yang “dikorbankan” oleh Taiwan. Pada program “Early Harvest” Cina mau membuka sektor pertanian untuk dimasuki produk impor dari Taiwan, sementara Taiwan tidak mau menerima produk pertanian impor dari Cina. Sementara itu, untuk skema pengurangan tarifnya sendiri pada program “Early Harvest” dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya.

Tabel II.3. Skema Penurunan Tarif yang Disepakati pada Program “Early Harvest”

No.	Range Impor pada 2009 (X%)	Penurunan Tarif yang Disepakati		
		Tahun Pertama (2011)	Tahun Kedua (2012)	Tahun Ketiga (2013)
1	$0 < X \leq 2,5$	0	-	-
2	$2,5 < x \leq 7,5$	2,5	0	-
3	$X > 7,5$	5	2,5	0

Sumber : ICRIEI 2011, diakses dari <http://www.icrier.org/pdf/Session%20IV-Kristy%20Hsu-Presentation.pdf>

Terlihat dari tabel penurunan tarif yang telah disepakati di atas, liberalisasi sektor barang yang disepakati dalam ECFA sangat progresif. Hanya dalam waktu tiga tahun setelah pemberlakuan program “Early Harvest”, perdagangan barang yang telah didaftarkan kedua pihak akan menikmati tarif sebesar 0%. Artinya, dalam tiga tahun ke depan tidak ada lagi hambatan tarif bagi barang-barang yang telah didaftarkan pada program “Early Harvest”.

Dalam kedua pasal tersebut disebutkan adanya regulasi yang mengatur penurunan tarif untuk barang – barang yang diperdagangkan serta akses pasar istimewa bagi jasa-jasa industri. Khusus untuk program “Early Harvest” perdagangan barang, implementasi harus dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perjanjian ini mulai berlaku. Artinya, dalam jangka waktu tersebut 539 barang impor dari Taiwan dan 267 barang impor dari Cina sudah menikmati penurunan tarif yang signifikan memasuki pasar Cina dan Taiwan. Sedangkan, untuk perdagangan jasa, mekanisme pembukaan sektor-sektor jasa yang diliberalisasi melalui program “Early Harvest” harus diimplementasikan secara meluas sejak berlakunya perjanjian ECFA. Adapun jenis sektor – sektor jasa dan keuangan yang telah disepakati untuk dibuka oleh kedua pihak dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.4 Jenis Sektor Jasa dan Keuangan yang Dibuka pada Program
“Early Harvest”**

	Jenis Sektor yang Dibuka Cina	Jenis Sektor yang Dibuka Taiwan
Sektor Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi, Auditing dan Pembukuan 2. Implementasi software dan pemrosesan data elektronik 3. Research and Development 4. Konvensi 5. Desain Khusus 6. Jasa Audiovisual 7. Rumah Sakit 8. Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Research and Development 2. Konvensi 3. Pameran 4. Jasa Khusus 5. Gambar Bergerak 6. Agen Jasa 7. Jasa Olahraga dan Rekreasi 8. Perbaikan Komputer
Sektor Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank dan jasa – jasa keuangan lainnya 2. Asuransi dan jasa lain yang berkaitan 3. Sekuritas dan jasa lain yang berkaitan 	Bank dan jasa – jasa keuangan lainnya

Sumber : ICRIEI 2011, diakses dari <http://www.icrier.org/pdf/Session%20IV-Kristy%20Hsu-Presentation.pdf>

Terakhir, pada bab V yang berisi aturan lain – lain, dijelaskan beberapa hal yang merupakan teknis implementasi dari perjanjian. Pada pasal 9 dijelaskan mengenai mekanisme pengecualian sesuai dengan aturan yang ada di WTO. Sementara pada pasal 10 disebutkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan harus dilakukan dengan cara konsultasi oleh kedua pihak yang kemudian berkaitan dengan pasal 11 mengenai pembentukan institusi Komite Kerjasama Ekonomi Lintas Selat. Komite ini bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi-konsultasi lanjutan yang diperlukan di samping melakukan interpretasi terhadap provisi yang ada dalam perjanjian, monitoring dan evaluasi implementasi perjanjian, serta sebagai representasi kedua pihak dalam menyelesaikan masalah terkait implementasi ECFA. Kemudian pasal 12 sampai 16 menjelaskan tentang format dokumen, lampiran – lampiran dan perjanjian yang menyertai, amandemen, masa mulai berlaku, dan masa berakhirnya perjanjian.

Di bagian akhir dalam perjanjian ini disebutkan bahwa dokumen asli perjanjian ECFA dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dengan masing – masing pihak dari SEF dan ARATS memegang 2 (dua) rangkap. ECFA mulai berlaku efektif setelah disahkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif di Cina dan Taiwan. Penandatanganan ECFA pun cukup menarik. Tidak seperti FTA lain yang ditandatangani kementerian perdagangan kedua negara, ECFA hanya ditandatangani ketua SEF dan ARATS yang mewakili pemerintah masing-masing dalam hubungan lintas selat.

II.5 Implementasi Program “Early Harvest” pada Semester Pertama Tahun 2011

Implementasi program “Early Harvest” ECFA yang dimulai sejak 1 Januari 2011 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada transaksi perdagangan barang dan jasa lintas selat. Sampai dengan akhir Maret 2011, impor Taiwan ke Cina yang berjumlah 3.923 kelompok barang senilai US\$ 684 juta telah menikmati

konsensi penurunan tarif sebesar 127 juta RMB (Yuan). Sementara impor Cina ke Taiwan senilai US\$ 315 juta, dengan proporsi produk kimia menguasai sekitar 46,1%, produk plastik sekitar 11,2%, produk logam dasar sebesar 10,6%, produk mesin dan elektronik sebesar 6,8% dan produk tekstil sekitar 4,9%. Namun, untuk produk pertanian yang diekspor Cina ke Taiwan jumlahnya masih sangat kecil yakni sebesar 0,2% dari keseluruhan ekspor Cina ke Taiwan, nilainya pun hanya sekitar US\$ 1,6 juta.⁷¹

Sementara itu, perdagangan jasa antara Cina dan Taiwan juga semakin menunjukkan tren yang progresif. Sampai akhir Maret 2011 ada 9 perusahaan jasa komputer, 26 perusahaan jasa desain khusus serta 1 perusahaan yang bergerak di bidang jasa konferensi (*event organizer*) diperbolehkan untuk masuk ke pasar Cina. Selain itu, ada tiga perusahaan sekuritas Taiwan yang diperbolehkan masuk ke dalam pasar bursa berjangka di Cina. Sebanyak 9 bank Taiwan juga mendapatkan manfaat dari program “Early Harvest” ECFA, di mana 7 di antaranya sudah memperoleh izin operasional di Cina.⁷²

Tren ini semakin menunjukkan nilai positif hingga akhir Mei 2011. Implementasi program “Early Harvest” ECFA telah membawa sebanyak 9.385 kelompok ekspor Taiwan ke Cina senilai US\$ 1,562 milyar menikmati pemotongan tarif preferensial sebesar 281 juta RMB (yuan). Pada periode yang sama, sebanyak 4.741 kelompok barang ekspor dari Cina senilai US\$325 juta menikmati pemotongan tarif sebesar 45 juta RMB dari perjanjian ECFA. Dalam perdagangan jasa, di akhir bulan Mei 2011, lebih dari 40 institusi non keuangan serta 5 perusahaan jasa keuangan telah masuk ke pasar Cina sesuai dengan ukuran preferensi program “Early Harvest” pada ECFA. Di lain pihak, pada waktu yang bersamaan 10 perusahaan jasa Cina telah masuk ke pasar Taiwan sesuai dengan

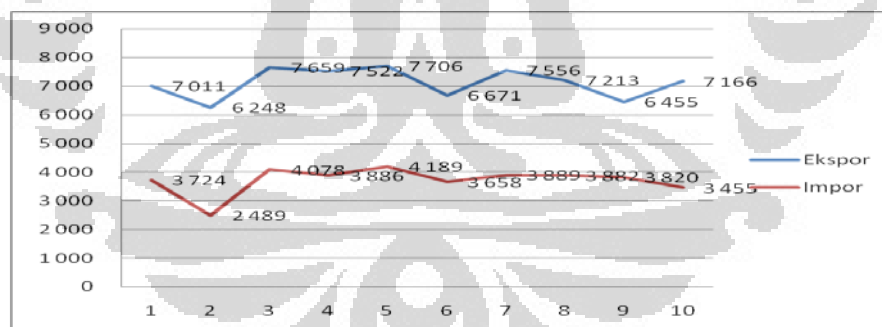
⁷¹ Kementrian Perdagangan Republik Rakyat Cina, “ECFA Makes a Good Start to Implement Early Harvest”, diakses dari <http://tga.mofcom.gov.cn/aarticle/e/201105/20110507569468.html> pada 2 Desember 2011 pukul 21.30 WIB.

⁷² *Ibid.*

ukuran preferensi tarif yang disepakati pada perjanjian ECFA.⁷³

Secara umum, hingga akhir Januari 2011, nilai ekspor – impor antara Cina dan Taiwan semakin meningkat setelah diberlakukannya program “Early Harvest” sampai akhir Januari 2011. Impor Taiwan ke Cina naik sekitar 26,1% atau menjadi sebesar US\$ 4,92 milyar, sementara impor Cina ke Taiwan juga naik sekitar 16,2%.⁷⁴ Namun, nilai ekspor impor ini kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam di bulan Februari 2011. Hingga bulan Oktober 2011, nilai ekspor – impor antara Taiwan dan Cina ternyata sangat fluktuatif dan tidak menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Jika dilihat dampaknya secara keseluruhan ECFA tidak terlalu mengubah angka *share market* produk Taiwan pada pasar Cina. Bahkan, *share market* produk Taiwan yang masuk ke pasar Cina mengalami penurunan sebesar 1,1% pada bulan Juli 2011, setelah pada tahun sebelumnya mencapai 8,6% menjadi 7,5%.⁷⁵ Walaupun begitu, nilai ekspor yang dilakukan Taiwan tetap lebih besar daripada impornya terhadap Cina.

Grafik II.1 Nilai Ekspor - Impor Taiwan ke Cina periode Januari - Oktober 2011 (dalam ratusan juta US\$)



Sumber : Diolah dari data Biro Perdagangan Luar Negeri Taiwan, November 2011.

⁷³“Implementation of Economic Cooperation Framework Agreement” diakses dari <http://www.biznewschina.com/news/2011/september/02/implementation-economic-cooperation-framework-agreement-ecfa> pada 5 Desember 2011 pukul 14.30 WIB.

⁷⁴ Kementerian Perdagangan Cina, *Loc.cit*.

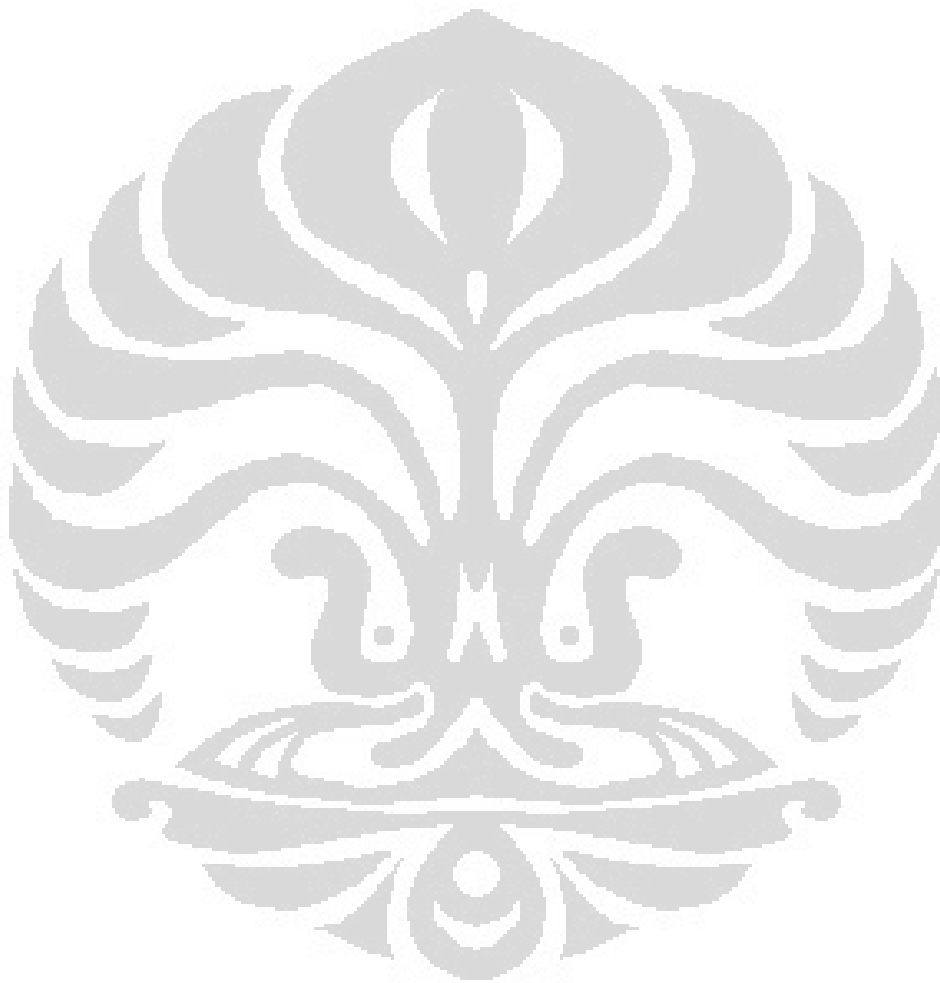
⁷⁵ Huang Tien-lin, “ECFA leads to a drop in share of the PRC market” diakses dari <http://www.taipetimes.com/News/editorials/archives/2011/07/12/2003507998> pada 9 Desember 2011 pukul 12.19 WIB.

Nilai ekspor Taiwan yang lebih besar dari Cina merupakan hal yang wajar mengingat Taiwan masih menerapkan restriksi pada barang – barang dan sektor jasa Cina yang boleh masuk ke pasar Taiwan, contohnya barang-barang pertanian dan jasa sekuritas. Merupakan konsekuensi yang logis dari isi perjanjian ECFA melihat nilai keuntungan yang dinikmati Taiwan dari konsesi penurunan tarif pada program “Early Harvest” lebih besar dari nilai keuntungan yang dinikmati Cina. Oleh sebab itu, tidak heran ECFA dikenal sebagai kesepakatan yang lebih menguntungkan Taiwan daripada Cina secara ekonomi.

Apa yang bisa disimpulkan dari isi perjanjian ECFA ini adalah Cina terlihat lebih banyak mengalah. Isi perjanjian ECFA lebih mengakomodir kepentingan ekonomi Taiwan daripada kepentingan ekonomi Cina. Dilihat dari isi perjanjian ECFA, Cina berusaha melakukan penyesuaian – penyesuaian kebijakan terhadap keinginan Taiwan sehingga pada akhirnya tercapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Seperti yang telah disebutkan oleh James Hsiung, dalam kerjasama ekonomi memang tidak dikenal *zero sum game*, sehingga Cina yang terlihat dirugikan di sini sebetulnya Cina juga mendapatkan keuntungan dalam kerjasama ekonomi dengan Taiwan. Keuntungan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 4.

Dari paparan di atas dapat terlihat bahwa setelah diberlakukannya ECFA, kedua pihak menikmati keuntungan yang cukup signifikan dari pengurangan tarif pada produk barang dan pembukaan sektor – sektor jasa dalam program “Early Harvest”. Kenaikan nilai ekspor dari Taiwan ke Cina dan dari Cina ke Taiwan sampai akhir Januari 2011 menunjukkan respon positif dari implementasi program “Early Harvest”. Namun demikian, keuntungan ekonomi yang didapatkan Cina tidak maksimal. Hal ini disebabkan isi perjanjian ECFA yang diskriminatif, lebih menguntungkan Taiwan daripada Cina. Dilihat dari kaca mata kerjasama ekonomi, ECFA tidak memenuhi indikator kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, karena jelas dari isi perjanjian keuntungan yang didapat kedua pihak tidak

seimbang. Menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa Cina tetap mau menandatangani perjanjian ECFA padahal secara jelas tidak membawa keuntungan yang maksimal padanya secara ekonomi. Tenu saja dibalik setiap kebijakan suatu negara ada kepentingan yang hendak dicapainya. Kepentingan Cina inilah yang akan dianalisa dan diidentifikasi pada dua bab selanjutnya.



BAB III

PENANDATANGANAN ECFA SEBAGAI *ECONOMIC STATECRAFT* CINA TERHADAP TAIWAN

Setelah melihat deskripsi latar belakang, proses negosiasi dan isi perjanjian ECFA, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan ekonomi tersebut lebih menguntungkan Taiwan daripada Cina secara kuantitatif. Pada bab ini akan dianalisa mengapa Cina mau menandatangani kesepakatan ECFA dengan Taiwan meskipun secara ekonomi Cina tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada Taiwan. Analisa penandatanganan ECFA akan dielaborasi lebih mendalam dengan tiga komponen dasar utama dari *economic statecraft* yang dikemukakan oleh David Baldwin.

III.1. Tipe Instrumen Kebijakan Ekonomi yang Diambil Cina

III.1.1. Penandatanganan ECFA sebagai *Positive Sanction* Cina terhadap Taiwan

Komponen pertama yang menunjukkan suatu kebijakan dikategorikan sebagai *economic statecraft* menurut David Baldwin adalah kebijakan yang diambil suatu negara merupakan tipe instrumen kebijakan ekonomi.⁷⁶ Penandatanganan ECFA merupakan bentuk kebijakan ekonomi yang diambil oleh Cina terhadap Taiwan sebab kesepakatan yang merupakan cara ekonomi yang digunakan oleh Cina untuk mempengaruhi perilaku Taiwan. Dalam *economic statecraft* sendiri terdapat dua bentuk instrumen ekonomi yang dapat dipilih oleh negara. Bentuk yang pertama adalah *negative sanction*, di mana instrumen ekonomi yang digunakan oleh negara berupa tindakan negatif, dalam bentuk hukuman (koersi) maupun ancaman, contohnya embargo, boikot, kenaikan tarif, diskriminasi tarif, kuota, dumping dan lain sebagainya.⁷⁷ Sementara, bentuk yang kedua ialah *positive*

⁷⁶ David Baldwin, *Op.cit*, hal. 32.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 41.

sanction, di mana instrumen ekonomi yang digunakan berupa penghargaan (*reward*) dan bantuan, contohnya bantuan luar negeri, pemotongan tarif, pengurangan pajak, fasilitasi investasi, pemberian lisensi impor dan lain sebagainya.⁷⁸ Dilihat dari bentuknya, penandatanganan ECFA dikategorikan sebagai bentuk *positive sanction* yang dilakukan oleh Cina kepada Taiwan.

ECFA dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk *positive sanction* sebab kesepakatan tersebut mencakup kesepakatan penurunan tarif, promosi dan fasilitasi investasi serta mendorong terjadinya pertukaran ekonomi yang lebih intensif antara Cina dan Taiwan. Dalam ECFA kedua pihak sepakat untuk menurunkan tarif perdagangan secara bertahap sampai 0%, menghilangkan hambatan – hambatan non - tarif, membuka sektor-sektor jasa dan menghilangkan larangan – larangan investasi. ECFA sebagai instrumen ekonomi juga mempromosikan kerjasama dan interaksi ekonomi lintas selat secara lebih dekat. Selain kerjasama dalam hal perdagangan, ECFA juga mempromosikan kerjasama lebih lanjut dalam bidang keuangan, bea cukai, UMKM, *e-business* dan kekayaan intelektual.⁷⁹

Esensi dari ECFA sebetulnya merupakan sebuah bentuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang didukung oleh World Trade Organization (WTO) agar diberlakukan pada semua anggotanya.⁸⁰ Cina dan Taiwan merupakan dua anggota WTO yang berhak mengadakan perjanjian FTA dengan negara anggota WTO lainnya. Adapun nama resmi Taiwan dalam WTO adalah Chinese Taipei, sementara Cina tetap menggunakan nama resmi China. Artinya, tanpa memperoleh izin Cina pun secara entitas ekonomi Taiwan sebetulnya dapat menandatangani perjanjian FTA dengan siapa saja. Sayangnya, akibat kontrak “One China” yang diterapkan oleh negara-negara di dunia, Taipei tidak bebas menandatangani perjanjian FTA.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 42.

⁷⁹ “ECFA Makes Taiwan a New Gateway to China” diakses dari http://jonesday.com/ecfa_makes_taiwan/, *Loc.cit.*

⁸⁰ *Ibid.*

Ide mengenai penandatanganan kesepakatan ekonomi lintas selat sebetulnya sudah diajukan oleh presiden Cina, Hu Jintao pada April 2005. Pada waktu itu, Hu sebagai sekretaris jendral komite pusat Partai Komunis Cina bertemu dengan Lien Chan, ketua umum partai Kuomintang (KMT) dari Taiwan membicarakan mengenai “aspirasi bersama dan kemungkinan pembangunan serta perdamaian dalam hubungan lintas selat”. Pada pertemuan tersebut kedua pihak sepakat untuk mempromosikan pertukaran-pertukaran ekonomi dan membangun mekanisme kerjasama ekonomi lintas selat. Mereka juga sepakat untuk melakukan negosiasi lebih jauh dalam topik per topik dengan prinsip "*easy things first, seeking common ground while reserving differences, proceeding in an orderly way and step by step, and advancing actively but reliably.*"⁸¹

Artinya, negosiasi yang dilakukan antara Cina dan Taiwan tidak akan berlangsung terburu-buru, melainkan secara bertahap, mencari persamaan dasar dan dimulai dengan hal-hal yang mudah namun dapat diimplementasikan secara langsung. ECFA memenuhi syarat-syarat tersebut. Bentuknya yang hanya *framework* mengindikasikan baik Cina maupun Taiwan tidak ingin terburu-buru dalam membuka semua sektor kerjasama ekonomi, namun hal tersebut merupakan salah satu kemajuan kongkret dalam hubungan lintas selat.

III.1.2. Kemungkinan Cina melakukan *Negative Sanction* terhadap Taiwan

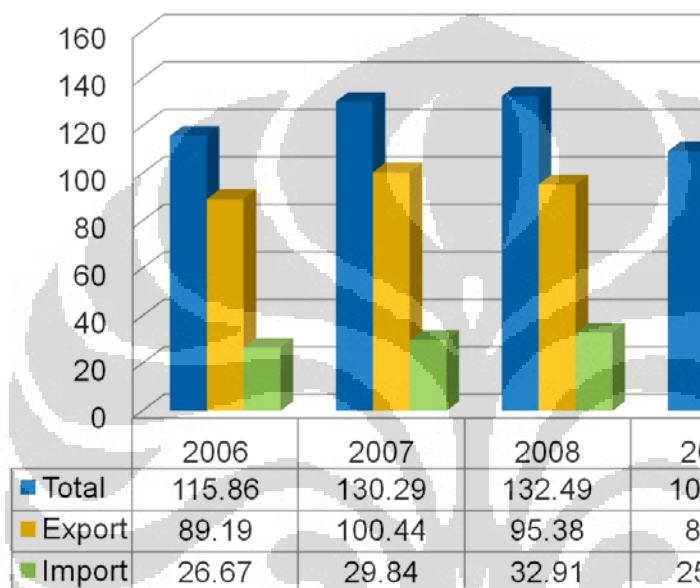
Selama satu dekade terakhir, Cina telah menggeser kedudukan Amerika Serikat dan Jepang sebagai partner dagang utama Taiwan dengan volume perdagangan per tahun mencapai lebih dari US\$ 100 milyar dolar dan presentase ekspor yang dikirim sebesar lebih dari 25% sejak tahun 2001. Pada tahun 2008 saja volume perdagangan keduanya mencapai US\$ 129 milyar, tetapi volume ini

⁸¹ “Backgrounder : ECFA a Cross Strait Economic Pact”, diakses dari www.gov.cn pada 30 November 2011 pukul 10.30

menurun pada tahun 2009 menjadi US\$ 106 milyar.⁸² Setelah itu, pada tahun 2009, nilainya naik lagi menjadi US\$ 152 milyar. Data ekspor – impor antara Taiwan dan Cina selama 5 tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik III.1. Nilai Ekspor Impor Taiwan – Cina Tahun 2006 – 2010
(dalam Milyar US\$)

Unit: US\$b



Sumber : Kementrian Hubungan Ekonomi, Republik Cina, Taiwan, 2011.

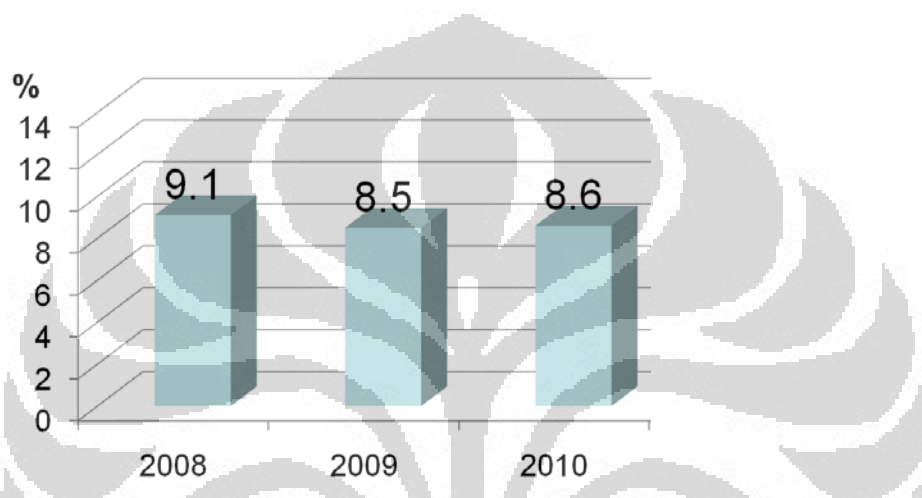
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa nilai ekspor Taiwan ke Cina selalu lebih tinggi daripada nilai impornya. Seiring dengan makin banyaknya barang ekspor Taiwan yang masuk ke Cina menjadikan Taiwan sebagai salah satu dari 5 besar partner dagang yang dimiliki Cina. Taiwan menempati posisi tersebut bersama Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong dan Korea Selatan.⁸³ Proporsi impor barang Taiwan ke Cina jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun pada tahun 2009 sempat mengalami sedikit penurunan, namun sampai

⁸² Adam Segal, *Chinese Economic Statecraft and the Political Economy of Asian Security*, diakses dari <http://www.ridgway.pitt.edu/LinkClick.aspx?fileticket=%2Fi5N%2BbenGJY%3D&tabid=235> pada 6 Desember 2011 pukul 12.30 WB.

⁸³ *Ibid.*

Februari 2011 angkanya bergerak naik, sehingga proporsi barang impor dari Taiwan ke Cina berjumlah 12,3% dari total impor yang masuk ke Cina. Hal ini dapat dilihat pada grafik selanjutnya.

Grafik III.2. Proporsi Barang Impor Taiwan di Cina Tahun 2008 – 2011
(dalam %)



Sumber : Kementerian Urusan Ekonomi, Republik Cina, Taiwan, 2011

Taiwan merupakan negara yang pembangunan ekonominya sangat bergantung kepada ekspor. Hampir 70% nilai GDP Taiwan dihasilkan dari kegiatan ekspor yang didominasi oleh barang - barang elektronik dan mesin - mesin. Ketergantungan yang sangat besar terhadap ekspor mengakibatkan ekonomi Taiwan sangat rentan dengan gejolak yang terjadi dalam dunia ekonomi internasional. Pada tahun 2009, GDP Taiwan sempat berkontraksi hingga 1,9% akibat terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 20% dari tahun sebelumnya sebagai dampak krisis finansial global. Namun, pada tahun 2010, Taiwan bangkit kembali sehingga GDP tumbuh hingga 10,5%.⁸⁴

Sebagai negara yang menjadi tujuan ekspor terbesar, tentu saja Taiwan memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap Cina. Ketergantungan

⁸⁴ Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/tw.html> pada 17 Januari 2012 pukul 14.05 WIB.

ekspor Taiwan terhadap Cina pada tahun 1997 saja sudah mencapai 18,37%. Menurut Chang Hsien - chao, jika ketergantungan ekspor Taiwan terhadap Cina sudah mencapai 30% maka mudah bagi Cina untuk mempengaruhi politik domestik Taiwan. Hal inilah yang sebisa mungkin diminimalisir oleh Taiwan.⁸⁵ Namun, melihat realitasnya, nilai ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap Cina justru semakin meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1. Nilai Ekspor Taiwan ke Cina dan Ketergantungan Ekonomi Taiwan terhadap Cina tahun 1987 – 1997 (dalam hitungan US\$ dan %)

Year	Values of Taiwan's Exports to Mainland China	Shares of Exports to Mainland China in Taiwan's Total Exports
1987	\$1,226.50	2.28
1988	\$2,242.20	3.70
1989	\$3,331.90	5.03
1990	\$4,394.60	6.54
1991	\$7,493.50	9.84
1992	\$10,547.60	12.95
1993	\$13,993.10	16.47
1994	\$16,022.50	17.22
1995	\$19,433.80	17.40
1996	\$20,727.30	17.87
1997	\$22,460.30	18.39

Sumber: Laporan Bulanan Statistik Ekonomi dan Ekspor Impor, Kementerian Keuangan dan Kantor Khusus Hubungan Cina, Taipei, Taiwan, Republik Cina, 1998.

⁸⁵ Chang Hsien – chao, “How Taiwan’s Accession into the WTO Will Lead to Political, Economic and Legal Ramifications for the “Three Links”, diakses dari Sheng Lijun, China and Taiwan : Cross Strait Relations Under Chen Sui – bian, (Singapore : ISEAS, 2002), hal. 73.

Dilihat dari tabel di halaman sebelumnya, pada tahun 1997 saja, nilai ketergantungan perdagangan Taiwan terhadap Cina sudah mencapai 18,39%. Nilai ketergantungan ekspor yang cukup tinggi ini tentu saja mengkhawatirkan bagi pemerintah Taiwan. Tingginya nilai ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap Cina dapat membawa intervensi politik dari Cina terhadap Taiwan, apalagi kekhawatiran Taiwan sejak terjadi krisis selat tahun 1995. Pada masa itu, Lee Teng Hui meminta kalangan bisnis Taiwan untuk menggunakan prinsip *jieji yongren* (hati-hati dan membatasi diri) dalam hubungan ekonomi dengan Cina.

Kekhawatiran dari Lee Teng Hui sepertinya cukup beralasan, mengingat angka ketergantungan ekspor Taiwan ke Cina semakin meningkat setiap tahunnya. Adanya ketergantungan ini sebetulnya dapat dimanfaatkan oleh Cina untuk melakukan *negative sanction* sebagai bentuk *economic statecraft* terhadap Taiwan. Cina sewaktu-waktu dapat memberikan sanksi perdagangan, embargo dan boikot kepada Taiwan karena *bargain position* yang lebih tinggi dalam bidang ekonomi. Namun, hal ini tentunya akan membawa hubungan politik lintas selat semakin ke arah negatif.

Opsi *negative sanction* juga tidak mungkin dilakukan Cina dalam waktu dekat. Hal tersebut dikarenakan Taiwan merupakan salah satu pemberi FDI terbesar di Cina, di mana dana – dana investasi tersebut juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Cina. Selain itu, tujuan Cina untuk melakukan reunifikasi secara damai dengan Taiwan juga memperkecil kemungkinan pemberlakuan *negative sanction* dari Cina. Sebab, pemberlakuan *negative sanction* selain menambah ketegangan politik dalam hubungan lintas selat juga akan memperbesar kemungkinan terjadinya perang terbuka antara Cina dan Taiwan.

Dari uraian dinamika interaksi ekonomi lintas di atas dapat kita lihat bahwa selama ini Cina cenderung menggunakan kebijakan ekonomi yang bersifat *positive sanction* terhadap Taiwan. Cina tidak pernah memberlakukan sanksi ekonomi seperti boikot ataupun embargo terhadap produk-produk Taiwan, padahal nilai

impornya terhadap Taiwan selalu lebih besar daripada nilai eksportnya. Alih – alih mengeluarkan sanksi, Cina justru mengeluarkan aturan-aturan yang menyediakan kemudahan akses investasi bagi pengusaha Taiwan untuk menanamkan modalnya di Cina.

III.2 Taiwan sebagai Target *Economic Statecraft* Cina

Komponen dasar kedua yang dikemukakan oleh David Baldwin, untuk menentukan apakah suatu kebijakan termasuk *economic statecraft* atau bukan adalah adanya sasaran kebijakan yang berupa aktor internasional lain. Penandatanganan ECFA dapat dikatakan sebagai sebuah *economic statecraft* yang diambil oleh Cina sebab dampak dari perjanjian tersebut tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga pada ranah internasional.

Dalam definisi *statecraft* menurut K.J. Holsti, disebutkan bahwa “*statecraft* merupakan tindakan – tindakan pemerintah yang terorganisir untuk mengubah lingkungan eksternal secara umum atau mengubah kebijakan – kebijakan dan tindakan – tindakan dari negara lain khususnya dalam rangka mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan pembuat kebijakan.”⁸⁶ Baldwin kemudian menurunkan definisi *statecraft* dari Holsti menjadi *upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi aktor – aktor lain dalam sistem internasional*. Dari definisi baru yang dibuat oleh Baldwin, artinya *statecraft* tidak hanya ditujukan bagi negara tetapi juga terhadap aktor-aktor internasional lain. Pada bagian ini, akan dibuktikan bahwa penandatanganan ECFA ditujukan untuk mengubah preferensi aktor internasional lain yang menjadi target yakni Taiwan.

Akan selalu menjadi perdebatan, apakah kasus Cina – Taiwan masuk ke ranah politik domestik atau sudah masuk dalam ranah politik internasional. Dalam penelitian ini, penulis mengasumsikan bahwa Taiwan, terlepas dari klaim Cina yang masih menganggap pulau tersebut sebagai bagian dari provinsinya, adalah sebuah

⁸⁶ James N. Rossenau, Kenneth Waltz dan Gavin Boyd (ed.) “The Study of Diplomacy” dalam *World Politics* , (New York : Free Press, 1973), hal. 293

negara sah dan berdaulat secara *de facto*. Hal ini ditunjukkan dari lepasnya pemerintahan Taipei untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan luar negeri dan keamanan tanpa campur tangan Beijing. Selain itu, keterlibatan Taiwan sebagai *observer* dalam institusi internasional seperti WTO dan sebagai anggota dalam institusi regional seperti APEC dan ADB. Adapun keanggotaan Taiwan yang lepas dari Cina tersebut menunjukkan independensinya dari pemerintah komunis Cina dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekspor impor yang dilakukan Cina juga dipisahkan dengan kegiatan ekspor impor yang dilakukan dengan Taiwan, sehingga kedua entitas ini merupakan entitas asing yang tidak dapat disatukan sebagai aktor internasional, walaupun Cina mengklaim Taiwan sebagai bagian dari Cina.

Status internasional Taiwan seakan dilupakan selama beberapa dekade. Saat ini, Taiwan tidak diakui sebagai negara independen oleh banyak pihak, namun telah secara efektif mengontrol wilayah Republik Cina selama 60 tahun. Hubungan antara Taiwan dengan Cina saat ini dikenal dengan keadaan *status quo*, sebuah titik keseimbangan di mana terdapat fleksibilitas – fleksibilitas tertentu bagi Taiwan dan meningkatkan kemungkinan Taiwan menjadi aktor internasional sepenuhnya.⁸⁷ Sejarah keambiguan status internasional Taiwan ini dapat kita lihat sejak berakhirnya perang sipil di Cina tahun 1949.

Walaupun hubungan Cina – Taiwan dianggap dalam kondisi *status quo*, namun hubungan ini mengalami naik turun dinamika politik selama enam dekade terakhir.⁸⁸ Konfrontasi yang terjadi antara Cina dan Taiwan merupakan perpanjangan dari perang sipil yang terjadi di Cina daratan tahun 1949 antara partai nasionalis dan partai komunis Cina.⁸⁹ Dalam perang sipil tersebut akhirnya

⁸⁷ Sigrid Winkler, “Biding Time: The Challenge of Taiwan’s International Status”, diakses dari http://www.brookings.edu/papers/2011/1117_taiwan_international_status_winkler.aspx pada 2 Desember 2011 pukul 10.30 WIB.

⁸⁸ Tse – Kang Leng, “Dynamics of Taiwan-Mainland China Economic Relations: the Role of Private Firms”, diakses dari <http://www.asianperspective.org/articles/v29n2-b.pdf/> pada 18 November 2011 pukul 17.31 WIB, hal. 4.

⁸⁹ *Ibid.*

kelompok nasionalis yang dipimpin Chiang Kai Sek kalah dan mengungsi ke pulau Formosa (Taiwan). Pada saat itu, kelompok komunis pimpinan Mao Zedong mengambil alih pemerintahan di Cina, termasuk hubungan luar negerinya. Sementara, kelompok nasionalis di Taiwan masih bersikukuh dengan pemerintahan mereka yang terlegitimasi dan Cina daratan serta Taiwan merupakan bagian dari Republik Cina pimpinan Chiang Kai Sek.

Konflik politik kemudian berkembang luas akibat perbedaan interpretasi prinsip “One China” oleh kedua pihak. Dari perspektif Cina daratan (RRC) dianggap bahwa hanya ada satu Cina, Taiwan merupakan bagian dari Cina, RRC adalah satu-satunya pemerintahan legal yang berkuasa di Cina sehingga kedaulatan rakyat Cina berada di tangan RRC namun Taiwan memiliki tingkatan otonomi khusus bagi urusan domestiknya. Dalam White Paper yang dikeluarkan tahun 1993, Cina mengklaim bahwa Taiwan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Cina, Taiwan milik Cina sejak zaman dahulu dan dunia internasional telah mengakui bahwa Taiwan adalah bagian dari Cina.⁹⁰

Sementara menurut Taiwan, realitas politik di selat Taiwan adalah adanya kedua entitas bangsa Cina yang setara telah memerintah Cina dan Taiwan secara terpisah sejak tahun 1949. Walaupun sama-sama didiami oleh bangsa Cina, namun sistem ekonomi dan politik mereka berbeda satu sama lain dan RRC tidak pernah secara efektif mengontrol tanah Taiwan sejak 1949 begitu juga sebaliknya. Taiwan menganggap dirinya adalah entitas politik yang berdaulat atas nama Republik Cina dan sama sekali berbeda dengan Cina daratan sehingga nosi bahwa adanya satu Cina dengan dua sistem pemerintahan yang berbeda tidak dapat diterima. Taiwan menganggap prinsip satu Cina lebih tepat didefinisikan sebagai sebuah Cina yang terpisah dan diatur oleh dua pemerintahan sebagai entitas politik yang berbeda.⁹¹

⁹⁰ Taiwan Affairs Office and Information Office State Council The People’s Republic of China, “The Taiwan Question and the Reunification of China”, Beijing, August 1993 dalam John Franklin Copper, *Words Across the Taiwan Strait : a Critique of Beijing’s “White Paper”*, (USA : East Asia Research Institute, 1995), hal. 74 – 77.

⁹¹ Mainland Affairs Council The Executive Yuan Republic of China, “Relations Across the Taiwan Straits”, July 1994 dalam John Franklin Copper, *Ibid*, hal. 93 – 98.

Dalam paradigma realis, negara merupakan aktor utama dalam Hubungan Internasional. Taiwan secara *de facto* merupakan negara yang memiliki teritorial, penduduk, dan kedaulatan. Sayangnya, Taiwan tidak mendapatkan pengakuan dari banyak negara di dunia internasional. Hanya ada 23 negara yang mengakuinya sebagai negara berdaulat dan semua negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat adalah negara-negara kecil di wilayah Pasifik, Amerika Tengah dan Afrika.

Sebetulnya, komunitas internasional mengakui eksistensi Taiwan sebagai aktor yang terpisah dari Cina dalam kegiatan internasional, khususnya kegiatan yang bersifat fungsional seperti kegiatan ekonomi dan sosial budaya. Saat ini menurut Kementerian Luar Negeri Republik Cina, Taiwan memiliki 57 perwakilan di negara lain dalam bentuk informal.⁹² Sementara itu, ada 49 negara yang menempatkan perwakilan informalnya di Taiwan.⁹³ Taiwan sendiri merupakan anggota dari 32 organisasi internasional sejak tahun 1987, diantaranya adalah APEC dan WTO.⁹⁴ Keanggotaan Taiwan dalam organisasi internasional tersebut memang tidak menggunakan nama Republik Cina, melainkan “Chinese Taipei”, “China (Taiwan)” atau “Taipei, China” karena Cina juga berada dalam organisasi tersebut. Status keanggotaan Taiwan pada organisasi – organisasi tersebut tentu saja bukan sebagai negara anggota. Keanggotaan Taiwan di WTO misalnya dianggap dalam kapasitasnya sebagai *separate customs territory*.

Lantas, apakah Taiwan merupakan aktor internasional lain bagi Cina? Ya, Taiwan merupakan aktor internasional yang asing bagi Cina. Baik secara politik,

⁹² Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), “List of Embassies & Missions Abroad”, diakses dari <http://www.mofa.gov.tw/webapp/lp.asp?ctnode=1864&ctunit=30&basedsd=30&mp=6>; pada 12 Desember 2011 pukul 14.30 WIB.

⁹³ Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), “Foreign Missions in the ROC (Taiwan)”, diakses dari <http://www.mofa.gov.tw/webapp/lp.asp?ctNode=1868&CtUnit=30&BaseDSD=30&mp=6>, pada 12 Desember 2011 pukul 14.30 WIB.

⁹⁴ Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), “Intergovernmental Organizations (IGOs) in which we participate”, diakses dari <http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem=51335&CtNode=2254&mp=6>, pada 12 Desember 2011 pukul 14.30 WIB.

ekonomi, maupun sosial budaya. Secara politik, jelas, pemerintahan yang menguasai Taiwan saat ini adalah partai Kuomintang (KMT) sementara yang menguasai Cina adalah Partai Komunis Cina (PKC). Tidak ada hubungan hirarki antara penguasa Taiwan dan penguasa Cina menunjukkan bahwa Taiwan secara politik merupakan entitas yang tidak berada di bawah control Cina. Selain itu, sistem politik yang diterapkan di Taiwan adalah sistem politik demokrasi, sementara di Cina, hingga saat ini sistem politik sosialis komunis masih diterapkan di sana. Strategi pembangunan ekonomi di kedua wilayah juga berbeda. Cina menerapkan sistem kapitalisme negara dalam perekonomiannya saat ini, setelah sebelumnya menggunakan sistem sosialis murni, sementara Taiwan dari dulu hingga sekarang konsisten dengan sistem ekonomi pasar.

Selain perbedaan ideologi politik dan strategi pembangunan ekonomi, Cina dan Taiwan juga memiliki perbedaan dalam hal sosial budaya. Bagi Taiwan, identitas budaya mereka merupakan campuran multietnis antara Cina, Jepang, Taiwan asli dan pengaruh barat. Rakyat Taiwan menempatkan nilai individualisme sebagai nilai lokal yang berbeda dengan yang mereka dapatkan di Cina, yakni nilai kolektivisme. Ketegangan politik yang terjadi selama beberapa dekade terakhir dan agresivitas Cina dalam merebut kembali wilayah Taiwan juga mempengaruhi sikap dan persepsi rakyat Taiwan terhadap Cina. Mereka merasa teralienasi dan membentuk sikap membenci pemerintahan yang ada di Beijing.⁹⁵ Perasaan tersebut kemudian menjadi justifikasi Taipei agar berpisah dari Beijing dan mendirikan pemerintahan secara otonom

Menurut Sutter, krisis identitas yang dialami masyarakat Taiwan merupakan hasil transformasi pemimpin politik yang berkuasa di Taiwan pada tahun 1980an dari sistem otoritarian menjadi sistem demokratis. Hal inilah yang membuat krisis identitas nasional bagi masyarakat Taiwan, sehingga mereka menganggap Cina sebagai orang asing. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan saat

⁹⁵ Karen M. Sutter, *Loc.cit*, hal. 530 – 534.

itu juga sukses mempengaruhi masyarakat bahwa mereka merupakan entitas sosial budaya yang berbeda bagi Cina.⁹⁶

III.3 Ruang Lingkup Sasaran Kebijakan Dalam Penandatanganan ECFA

Sejak awal kontak ekonomi dengan Taiwan dibuka, para pembuat kebijakan di Cina telah memiliki tujuan politik yang jelas dalam hubungan ekonomi lintas selat. Presiden Cina, Yang Shangkun pada National Conference in Taiwan Work tahun 1990 mengatakan bahwa :

“emphasis should be placed on economic and other exchanges in order to use business to press politics (*yi shang wei zheng*) and use the public to pressure the official (*yi min bi guan*).”⁹⁷

Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa Cina akan menggunakan cara-cara ekonomi untuk menyenangkan para pebisnis Taiwan demi menekan politiknya (*yi shang wei zheng*) dan menggunakan masyarakat untuk menekan pemerintahnya (*yi min bi guan*).⁹⁸ Melalui penandatanganan ECFA, Cina berusaha meyakinkan masyarakat Taiwan bahwa ECFA akan berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Taiwan yang sempat koleps akibat Krisis Finansial Global.⁹⁹

Ruang lingkup sasaran kebijakan dalam penandatanganan ECFA di Taiwan mencakup ruang lingkup yang luas (umum) dan sempit (khusus). Secara umum, ECFA ditujukan untuk mengubah keseluruhan perilaku aktor domestik di Taiwan (pemerintah, bisnis, dan masyarakat) agar menjadi lebih akomodatif terhadap kepentingan Cina. Secara khusus, pemerintah Cina memiliki target untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat Taiwan melalui perubahan perilaku pemimpin politiknya. Tentu saja, tidak mudah untuk langsung mengambil hati seluruh masyarakat Taiwan, sehingga pemerintah Cina melakukan pendekatan dari kalangan bisnisnya terlebih dahulu.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Adam Seagal, *Loc.cit*, hal. 14

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ “Taiwan-China trade No such thing as a free trade” , *The Economist*, Juni 2010.

Ketegangan politik yang terjadi antara kedua wilayah selama ini menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat Taiwan, khususnya kalangan bisnis untuk mengadakan hubungan ekonomi dengan Cina. Apalagi pemerintah Taiwan menerapkan sejumlah restriksi dalam hubungan perdagangan dengan Cina. Momentum ECFA dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah baru dalam hubungan lintas selat dan menjadi upaya normalisasi hubungan ekonomi yang selama ini kurang baik sejak Perang Dingin. Cina melihat ECFA sebagai cara untuk mendekatkan Taiwan secara sosiologis melalui kerjasama ekonomi.¹⁰⁰

Adapun langkah-langkah Cina mengambil hati rakyat Taiwan melalui ECFA dimulai sejak Hu Jintao, sekretaris jendral Partai Komunis Cina, mengeluarkan pernyataan pada tanggal 31 Desember 2008 ketika memberikan pidato pada perayaan 30 tahun “Message to Compatriots in Taiwan”. Secara jelas disebutkan bahwa Taiwan dan Cina dapat menandatangani sebuah kerjasama ekonomi komprehensif yang dibangun melalui mekanisme khusus untuk mencapai keuntungan bersama pada tingkat yang lebih luas.¹⁰¹ Menindaklanjuti pernyataannya, setahun kemudian Hu mengunjungi kalangan bisnis Taiwan di provinsi Fujian untuk meyakinkan kembali bahwa ECFA akan membantu promosi kerjasama ekonomi dan keduanya akan saling diuntungkan dengan keberadaan ECFA.¹⁰² Hu menambahkan bahwa Cina akan memperhatikan penuh kepentingan – kepentingan Taiwan, khususnya kepentingan para petani dalam rangkaian negosiasi ECFA. Hal ini ternyata bukan merupakan omong kosong belaka.

Pada 27 Februari 2010, Perdana Menteri Cina, Wen Jiabao mengatakan dalam sebuah *online chat* yang diselenggarakan oleh Xinhua, bahwa Cina bisa saja mengorbankan sebagian kepentingannya dalam negosiasi ECFA. Ia menguatkan pernyataan Hu bahwa Cina akan memperhatikan kepentingan – kepentingan masyarakat Taiwan, kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),

¹⁰⁰ Y.C. George Lin, *Loc.cit*, hal. 6.

¹⁰¹ “Backgrounder : ECFA a Cross Strait Economic Pact”, diakses dari www.gov.cn, *Loc.cit*.

¹⁰² *Ibid*.

khususnya petani dalam negosiasi. Cina tidak akan memaksakan kepentingannya pada negosiasi, sebab kemajuan dalam negosiasi merupakan kepentingan masyarakat di Cina dan Taiwan. Pengorbanan Cina untuk tidak memaksakan sebagian kepentingannya dalam negosiasi ECFA tersebut karena menurut Wen “*Taiwan compatriots are our brothers*”.¹⁰³

Dari pernyataan – pernyataan yang dikeluarkan oleh Hu Jintao maupun Wen Jiabao tersebut menggambarkan betapa Cina ingin memenangkan hati Taiwan selama negosiasi ECFA. Sebetulnya, dalam negosiasi ECFA terlihat jelas bagi Taiwan bahwa Cina memiliki kepentingan dibaliknya. Cina tentu saja memiliki kepentingan untuk mendukung kelompok yang setuju dengan penandatanganan ECFA, sehingga sedemikian rupa berusaha memberikan kenyamanan bagi pemerintah Taiwan selama negosiasi. Cina menginginkan pemerintah yang berkuasa di Taiwan adalah mereka yang tidak pro kemerdekaan dan memiliki sikap radikal separatis dengan Cina.

Oposisi di Taiwan tentu saja tidak serta merta setuju dengan rencana pemerintah Taiwan menandatangani ECFA dengan Cina. Partai Demokrasi Progresif (DPP) yang menjadi oposisi di Taiwan tetap mengkritisi penandatanganan ECFA yang dianggap mengancam demokrasi dan kedaulatan Taiwan. Partai Koumintang dianggap memutuskan kebijakan secara sepihak (otoriter). Lebih jauh lagi, pemerintah Ma dianggap sebagai pengkhianat yang menjual Taiwan hingga Cina mendapatkan tujuannya untuk reunifikasi. DPP juga mengklaim bahwa pelaksanaan ECFA akan merugikan Taiwan secara ekonomi.

Cina sendiri telah membuat konsesi selama negosiasi untuk menjawab kritikan yang dilontarkan oleh oposisi di Taiwan bahwa ECFA merupakan sebuah jebakan sebab kemungkinan kerugian para eksportir tradisional, UMKM dan petani Cina akibat ECFA juga tinggi.¹⁰⁴ Para negosiator Cina juga berkali – kali menekankan bahwa ECFA merupakan perjanjian ekonomi murni, bukan sebuah

¹⁰³ “Live : Premier Wen Gives Online Interview”, *Xinhua*, 27 Februari 2010.

¹⁰⁴ “Hu visits Taiwan businesses on mainland before Festival,” *Xinhua*, February 12, 2010.

perjanjian politik. Melalui negosiasi dan penandatanganan ECFA, Beijing mencoba untuk meraih dukungan dari masyarakat di Taiwan dalam ECFA dan menolong presiden Ma menghadapi permasalahan ekonomi.¹⁰⁵ ECFA dapat menjadi jalan bagi Taiwan untuk meningkatkan perannya dalam organisasi regional di Asia dan membentuk hubungan yang lebih baik dengan negara – negara di Asia Tenggara.¹⁰⁶

Kampanye yang dilakukan oleh pemerintah yang berasal dari KMT sepertinya berhasil mengajak masyarakat Taiwan bersifat positif terhadap ECFA. Tidak heran klaim mengenai ancaman terhadap demokrasi dan kedaulatan tidak digubris oleh masyarakat Taiwan. Publik Taiwan menganggap argumen terhadap demokrasi lemah dan perjanjian ekonomi seperti ECFA sudah diatur dalam hukum internasional, sehingga tidak akan mengancam kedaulatan.¹⁰⁷ Alih – alih mendapatkan dukungan untuk menolak ECFA, semakin banyak yang tidak tertarik dengan DPP. ECFA justru semakin populer di kalangan masyarakat Taiwan.¹⁰⁸

Situasi ini tentu saja menjadi sinyal yang positif bagi Cina untuk mencapai targetnya, mengubah persepsi masyarakat Taiwan. Selama beberapa dekade, masyarakat Taiwan cenderung menganggap hubungan lintas selat cenderung diwarnai permusuhan dibandingkan dengan pertemanan. Seperti yang dilihat dari grafik di berikut, tren persepsi yang ditunjukkan rakyat Taiwan terhadap hubungan lintas selat dari tahun 1994 hingga tahun 1999 semakin bergerak ke arah permusuhan daripada ke arah pertemanan.

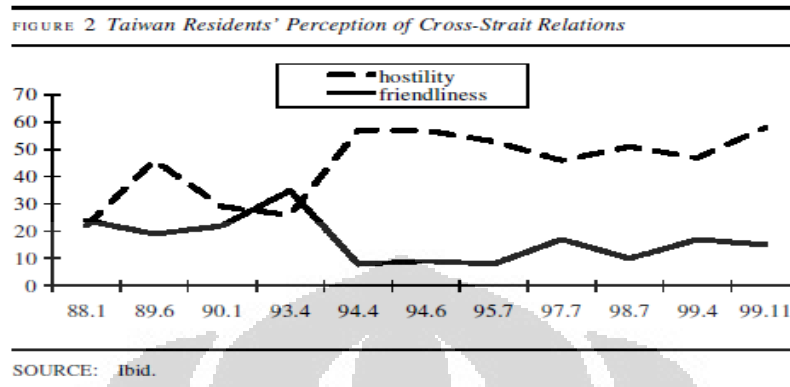
¹⁰⁵ John F. Copper, *Op.cit.*

¹⁰⁶ John F. Copper, “The China-Taiwan Economic Cooperation Framework Agreement: Politics, Not Just Economics”, *EAI Background Brief No. 548*, 6 Agustus 2010, hal. 13.

¹⁰⁷ Jens Kastner, “Taiwan challenge to Korea, Japan,” *Asia Times*, 22 Juli 2010.

¹⁰⁸ John. F. Cooper, *Loc.cit.*

**Grafik III.3. Persepsi Masyarakat Taiwan terhadap Hubungan Lintas Selat
(1988 – 1999)**



Sumber : Survey Center, *United Daily News*, Taipei, 2001.¹⁰⁹

Penandatanganan ECFA sebagai keluaran dari negosiasi yang dilakukan antara SEF dan ARATS merupakan bentuk instrumen ekonomi dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan Cina terhadap Taiwan. Taiwan, sebagai aktor internasional lain menjadi sasaran utama dari kebijakan Cina dalam penandatanganan ECFA. Secara luas, penandatanganan ECFA bertujuan untuk mempengaruhi perilaku seluruh aktor – aktor domestik di Taiwan yang terdiri dari kalangan pemerintah, bisnis dan masyarakat. Selain itu, secara sempit, penandatanganan ECFA memiliki ruang lingkup sasaran kebijakan untuk memenangkan hati masyarakat Taiwan agar pro unifikasi dengan Cina. Dapat disimpulkan dari keseluruhan analisa di atas bahwa penandatanganan ECFA merupakan *economic statecraft* yang dilakukan oleh Cina terhadap Taiwan.

Economic statecraft merupakan teknik penggunaan instrumen kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan – tujuan politik. Tujuan politik inilah yang kemudian terefleksi sebagai bentuk kepentingan suatu negara yang menjadi alasan mengapa kebijakan tersebut diambil. Kepentingan nasional menjadi dasar segala kebijakan luar negeri di ambil. Hal ini yang akan dianalisa pada bab selanjutnya.

¹⁰⁹ Chien-Min Chao, “Will Economic Integration Between Mainland China and Taiwan Lead to a Congenial Political Culture?” dalam *Asian Survey*, Vol. 43, No. 2 (Maret/April 2003), hal. 290.

BAB IV

KEPENTINGAN CINA DALAM PENANDATANGANAN ECFA

Setelah menganalisa penandatanganan ECFA sebagai *economic statecraft* di bab sebelumnya, pada bab ini akan dianalisa lebih jauh mengenai kepentingan Cina dalam penandatanganan ECFA dengan menggunakan konsep kepentingan nasional.

Menurut Papp, suatu negara mendefinisikan sendiri apa yang menjadi kepentingannya dan mendeterminasi usaha untuk mencapainya. Cina dalam hal ini mendefinisikan sendiri apa yang menjadi kepentingannya dalam penandatanganan ECFA. Kepentingan nasional yang dimiliki Cina merupakan justifikasi utama dari aksi – aksi suatu negara. Kepentingan nasional menurut Couloumbus dan Wolfe dilihat dan didefinisikan oleh para pembuat kebijakan. Formulasi kepentingan nasional terkait dengan sejumlah variabel antara lain kualitas pembuat kebijakan, filosofi dalam struktur dan proses pemerintahan, lokasi geopolitik dan tantangan yang dihadapi dari negara tetangga.¹¹⁰

Pada bab ini akan dipaparkan identifikasi kepentingan Cina dalam penandatanganan ECFA dilihat dari tujuan utama kebijakan luar negeri Cina terhadap Taiwan, definisi para pembuat kebijakan yang mencakup pernyataan – pernyataan resmi dan dokumen – dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina serta kondisi geopolitik di kawasan Asia Timur. Di akhir bab juga akan dibuktikan apakah hipotesis yang diajukan di awal benar atau justru tidak terbukti.

IV.1. ECFA sebagai Upaya Cina untuk Mencapai Reunifikasi dengan Taiwan

Pada tanggal 1 Januari 1979 Dewan Pengarah Kongres Rakyat Nasional Cina mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan dokumen “Message to

¹¹⁰ Theodore Couloumbus dan James Wolfe, *Op.cit*, hal. 118.

Compatriots in Taiwan”. Isi pesan kepada rekan senegara di Taiwan tersebut kurang lebih menunjukkan bahwa Beijing telah mengubah orientasi kebijakannya terhadap Taiwan dari “pembebasan Taiwan” (menggunakan cara – cara militer) menuju “unifikasi secara damai” (menggunakan cara ekonomi, sosial, budaya). Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa reunifikasi antara Cina dan Taiwan “tidak hanya keinginan seluruh rakyat Cina, termasuk rekan senegara yang ada di Taiwan, tetapi merupakan harapan dari masyarakat yang cinta damai di seluruh dunia.” Beijing mengklaim bahwa reunifikasi Cina merupakan tujuan yang populer di kalangan rakyat Cina dan secara umum menunjukkan perkembangan dukungan yang cukup pesat.¹¹¹

Sejak saat itu posisi dasar Cina dalam setiap kebijakannya terhadap Cina adalah mencapai unifikasi secara damai di mana hanya ada satu Cina dengan dua sistem pemerintahan yang berbeda dan hidup berdampingan secara damai.¹¹² Jiang Zemin dalam pidatonya di kongres ke-16 Partai Komunis Cina mengatakan bahwa semua persoalan berkaitan hubungan lintas selat bisa diselesaikan dengan kerangka prinsip “One China”.¹¹³ Tidak heran pemerintah Cina selalu konsisten mempromosikan formula “satu negara, dua sistem” dalam menyelesaikan persoalan Taiwan.

ECFA merupakan suatu perkembangan yang luar biasa dalam hubungan lintas selat. Cina menganggap kesepakatan ECFA sebagai cara untuk mempromosikan hubungan komersial dengan Taiwan, sehingga akhirnya menciptakan hubungan yang lebih baik secara keseluruhan. Hubungan antara Cina – Taiwan menjadi prioritas utama para pembuat kebijakan luar negeri Cina selama enam dekade terakhir.¹¹⁴ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan

¹¹¹ “Message to Compatriots in Taiwan”, diakses dari <http://www.china.org.cn/english/7943.htm> pada 15 Desember 2011 pukul 12:54 WIB.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ “All Cross Straits Issues Can Be Discussed Under One China Principle”, diakses dari <http://www.china.org.cn/english/48450.htm> pada 19 Desember 2010 pukul 20.30 WIB.

¹¹⁴ Robert G. Sutter, *Chinese Foreign Relations: Power and Policy since the Cold War* (Lanham, MD: Roman and Littlefield, 2010), hal. 154.

utama kebijakan Cina di Taiwan adalah untuk mencapai reunifikasi secara damai dengan Taiwan. Namun, tujuan itu sepertinya masih sangat jauh untuk bisa dicapai. Hal ini disampaikan sendiri oleh presiden Cina, Hu Jintao. Pada akhir 2008, Hu Jintao mengeluarkan pernyataan di hadapan publik bahwa “reunifikasi merupakan merupakan tujuan terbaik yang masih jauh”.¹¹⁵

Cina memang tidak menyebutkan tujuan penandatanganan ECFA secara eksplisit untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Namun, reunifikasi merupakan tujuan akhir Cina dalam setiap kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk Taiwan.¹¹⁶ Pada 1 Juli 2011 yang lalu, Hu Jintao kembali menegaskan dalam pidatonya di acara perayaan 90 tahun pendirian PKC, bahwa tujuan umum dalam hubungan dengan Taiwan adalah mempromosikan perdamaian jangka panjang, meningkatkan pertukaran dan kerjasama di semua bidang serta memperluas interaksi antara Cina – Taiwan. Hu mengingatkan bahwa rakyat dan pemerintah di kedua sisi harus bekerjasama untuk melawan setiap usaha separatisme atas nama “kemerdekaan Taiwan”. Diharapkan kedua pihak juga bekerja bersama demi kebahagiaan kedua rekan sebangsa, setanah air untuk masa depan bangsa Cina yang lebih baik.¹¹⁷

Cina menginginkan dialog ekonomi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir berubah menjadi sebuah dialog politik lintas selat. Dalam sebuah kawat diplomatik Amerika Serikat tertanggal 6 Januari 2010 yang dibocorkan oleh Wikileaks, wakil presiden ARATS, Ma Xiaoguang mengatakan bahwa Cina sadar walaupun Cina – Taiwan memiliki hubungan ekonomi yang erat, namun hal ini tidak menjadi jaminan akan adanya unifikasi secara alami.¹¹⁸ Namun, Ma menegaskan bahwa Cina akan bekerja keras untuk menguatkan Konsensus 1992

¹¹⁵ Alan D. Romberg, “Cross-Strait Relations: First the East, Now the Hard”, diakses dari www.hoover.org/publications/china-leadership-monitor/article/5595 pada 20 Desember 2011 pukul 21.30 WIB.

¹¹⁶ John F. Copper, *Loc.cit*, hal. 12.

¹¹⁷ Pidato Hu Jintao dalam Peringatan 90 Tahun Partai Komunis Cina, dapat diakses melalui http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-07/01/c_13960505.htm.

¹¹⁸ “WIKILEAKS : China Using ECFA to Push Unification”, *Loc.cit*.

sebagai dasar negosiasi politik dengan Taiwan. Artinya, Cina akan tetap berusaha menjadikan Taiwan bersatu dengan Cina melalui cara apapun. ECFA dianggap sebagai langkah awal untuk menormalisasikan hubungan dengan Taiwan, mengangkat isu politik dalam negosiasi – negosiasi lanjutan sebelum akhirnya mencapai reunifikasi dengan Taiwan.¹¹⁹

Tentu saja untuk mencapai reunifikasi dengan Taiwan bukanlah suatu hal yang mudah bagi Cina. Ada dua faktor yang menyebabkan sulitnya mencapai reunifikasi dengan Taiwan, walaupun normalisasi hubungan ekonomi sudah terjadi. Faktor pertama adalah keadaan politik domestik Taiwan sementara faktor yang kedua adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam hubungan lintas selat.

Dalam keadaan konflik, keamanan nasional menjadi perhatian utama pembuat kebijakan ekonomi di Taiwan. Para pembuat kebijakan ekonomi di Taiwan menganggap bahwa Cina sedang menggunakan interaksi ekonomi untuk kepentingan politik dan memaksa kalangan bisnis di Taiwan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Taiwan terhadap Cina.

Politik Taiwan yang demokratis dan dinamis tidak menjamin usaha Cina untuk melakukan reunifikasi menggunakan cara – cara ekonomi seperti melalui penandatanganan ECFA akan berjalan dengan mulus. Secara umum keadaan politik domestik di Taiwan terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok Pan - Biru yang pro dengan unifikasi dan kelompok Pan - Hijau yang pro dengan kemerdekaan. Adapun partai yang termasuk ke dalam kelompok Pan – Biru antara lain KMT, People First Party (PFP), dan Partai Baru. Sementara partai yang masuk ke dalam kelompok Pan – Hijau adalah DPP dan Taiwan Solidarity Union (TSU).

Para pendukung kelompok Pan – Hijau cenderung untuk menekankan Republik Cina sebagai negara yang terpisah dari Republik Rakyat Cina. Mereka menginginkan kemerdekaan penuh dari Cina dan segera memproklamasikan kemerdekaannya. Namun sebagian dari mereka juga ada yang berpendapat bahwa

¹¹⁹ *Ibid.*

tidak penting memproklamasikan kemerdekaan Taiwan sebagai Republik Cina karena Taiwan sudah merdeka dari dulu. Sementara, kelompok Pan – Biru lebih mendukung penamaan Republik Cina sebagai simbol hubungan bahwa mereka masih dalam “One China”. Kelompok Pan – Biru kebanyakan memang terdiri dari mereka yang memiliki sejarah hubungan langsung dengan Cina saat Kuomintang memimpin Cina, sehingga mereka masih menganggap Taiwan dan Cina adalah satu kesatuan.¹²⁰

Perkembangan dinamikan politik di Taiwan sangat mempengaruhi kelanjutan kerjasama ekonomi setelah penandatanganan ECFA. Jika pada tahun 2012, presiden Taiwan akan dipegang oleh seseorang dari koalisi Pan – Hijau, kemungkinan jalan untuk reunifikasi melalui penandatanganan ECFA akan terhambat. Sementara itu, jika Ma Ying Jeou atau kandidat lain dari partai yang termasuk koalisi Pan – Biru, jalan Cina untuk melakukan reunifikasi melalui penandatanganan ECFA akan semakin besar kemungkinannya. Walaupun demikian, pada akhirnya demokrasi di Taiwan yang menentukan apakah Taiwan akan mau melakukan reunifikasi dengan Cina atau tidak.

Berbicara mengenai hubungan lintas selat, kita tidak bisa melepaskan peranan Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas keamanan di Selat Taiwan. Amerika Serikat sebagai hegemon memiliki kepentingan menjaga keamanan di kawasan Asia Timur. Selain itu, hubungan sejarah dengan kelompok nasionalis Cina yang pada akhirnya terusir ke Taiwan, membuat hubungan Amerika Serikat – Cina semakin kompleks dengan adanya isu Taiwan.

Cina selalu memiliki pandangan pesimis terhadap kehadiran Amerika Serikat di Selat Taiwan. Menurut Cina, ketegangan politik yang terjadi antara Cina – Taiwan, salah satunya disebabkan oleh faktor Amerika Serikat. Amerika Serikat yang dianggap oleh Cina sebagai “kekuatan asing” yang berusaha merusak

¹²⁰ U.S. Department of State, “Overview of U.S. Policy Towards Taiwan” diakses dari <http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2004/31649.htm> pada 17 Januari 2012 pukul 19.30 WIB.

integritas teritorial Cina. Dalam White Paper on The Taiwan Question and the Reunification of China, Cina mengklaim bahwa persoalan Taiwan dan perang sipil lahir dari pemberontakan Kuomintang yang didukung oleh kekuatan asing.¹²¹

Hubungan antara Cina – Amerika Serikat – Taiwan memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, Amerika Serikat membuka hubungan diplomatik dengan Cina dan menyatakan bahwa akan tetap menghormati prinsip “One China” yang ditekankan dalam tiga *join communiqué* yang dibuat oleh Cina dan Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain, parlemen Amerika Serikat mengeluarkan sebuah keputusan yang dikenal dengan nama Taiwan Relations Act tertanggal 1 Januari 1979. Isi dari Taiwan Relations Act tersebut antara lain menekankan bahwa Amerika Serikat tetap menghormati prinsip “One China”, namun meminta penggunaan cara – cara damai untuk menentukan masa depan Taiwan. Penggunaan cara – cara kekerasan seperti boikot dan embargo yang membahayakan keamanan dan perdamaian di wilayah Taiwan akan menjadi perhatian Amerika Serikat, oleh sebab itu Amerika Serikat melalui Taiwan Relations Act berkomitmen menyediakan berbagai fasilitas yang berguna bagi Taiwan meningkatkan kemampuan defensifnya.¹²² Hal inilah yang menjadi perhatian utama Cina, sebab atas dasar Taiwan Relations Act, Amerika Serikat berhak untuk menjual peralatan militernya ke Taiwan. Keberadaan Taiwan Relations Act dianggap sebagai ‘pengkhianatan’ terhadap kesepakatan yang telah dibuat Cina dan Amerika sebelumnya.

Adanya Taiwan Relations Act memperlihatkan kepentingan Amerika Serikat di Selat Taiwan. Selain kepentingan keamanan, yakni menjaga perdamaian di selat Taiwan, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik dalam menjaga keberlangsungan hidup Taiwan, sebagai sekutunya di wilayah Asia Timur. Perilaku Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan *strategic ambiguity* ini tidak heran membuat Cina skeptis. Para pengamat Cina menganggap Amerika Serikat

¹²¹ Taiwan Affairs Office and Information Office State Council The People’s Republic of China, *Op.cit.*

¹²² “Taiwan Relations Act”, diakses dari <http://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html> pada 18 Desember 2011 pukul 20.30 WIB.

sebagai “Nervous Hegemon”¹²³, di mana Amerika Serikat akan mencegah Cina untuk melakukan segala upaya reunifikasi dengan Taiwan demi menjaga kepentingannya. Selain itu, Amerika Serikat juga dianggap sebagai “The Entangled Ally”¹²⁴ oleh sebagian akademisi Cina, di mana upaya kerjasama apapun yang dilakukan oleh Cina dan Amerika Serikat akan menyisakan suatu ketidakpercayaan terhadap masalah Taiwan. Sebab, kepentingan utama Amerika Serikat dalam permasalahan Taiwan adalah untuk menjaga stabilitas hegemoninya di wilayah Asia Timur, bukan karena Amerika Serikat mendukung gerakan pro demokrasi di Cina. Dalam konteksnya sebagai hegemon, Amerika Serikat akan berusaha membendung segala pengaruh Cina untuk meningkatkan kekuatannya di wilayah Asia Timur termasuk menggunakan Taiwan untuk mempertahankan kepentingannya.

Hubungan Cina dan Amerika Serikat sendiri sempat mengalami ketegangan terkait masalah Taiwan. Setelah uji coba militer tahun 1995 yang dilakukan Cina dibalas dengan peningkatan kapabilitas militer Taiwan, di mana dari US\$ 13,9 milyar anggaran yang digunakan Taiwan untuk membeli senjata, hampir 80%nya digunakan untuk membeli senjata dari Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 2007, pemerintahan Georg W. Bush di Amerika Serikat menyetujui sejumlah permintaan Taiwan untuk membeli sejumlah peralatan pendukung sistem pertahanan misil senilai US\$ 190 juta. Tentu saja hal ini membuat pemerintah Cina kesal, apalagi pada saat itu Taiwan dipimpin oleh Chen Sui Bian yang terkenal dengan sikap kerasnya terhadap Cina.¹²⁵ Hal ini membuat Amerika Serikat khawatir apabila terjadi perang terbuka sewaktu – waktu di Selat Taiwan.

Setelah kepemimpinan di Taiwan berganti dari Chen Sui Bian ke Ma Ying

¹²³ Andrew Bingham Kennedy,

“China's Perceptions of U.S. Intentions toward Taiwan: How Hostile a Hegemon?” dalam *Asian Survey*, Vol. 47, No. 2 (Maret/April 2007), hal. 268-287.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Esther Pan dan Youkyung Lee, “China-Taiwan Relations” diakses dari

<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/15/AR2008011501347.html> pada 18 Desember 2011 pukul 12.30 WIB.

Jeou, kebijakan Amerika Serikat terhadap Cina dalam masalah Taiwan agak lebih bersahabat. Sikap resmi pemerintah Amerika Serikat sendiri terhadap penandatanganan ECFA adalah mendukung sepenuhnya usaha kedua pihak untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan lintas selat.¹²⁶ Menteri luar negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton bahkan memuji usaha yang dilakukan presiden Ma sebagai “remarkable process” dalam meningkatkan hubungan lintas selat. Setelah penandatanganan ECFA, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga segera membekukan notifikasi kongres untuk penjualan senjata ke Taiwan hingga musim semi tahun depan. Disinyalir keputusan tersebut dibuat atas tekanan Cina.¹²⁷ Hal ini membawa tanda tanya apakah Cina tetap dapat menjaga keseimbangan kekuatan di Selat Taiwan, di mana Washington memiliki kepentingan untuk menjaga perdamaian di kawasan.¹²⁸ Tidak heran, pemerintahan Obama yang berkuasa di Amerika Serikat saat ini dianggap lemah terhadap Cina. Obama tidak banyak menyentuh permasalahan Cina – Taiwan dalam pidato-pidatonya. Amerika Serikat menyadari bahwa Cina menjadi satu – satunya “significant rising power” yang bisa mengalahkan eksistensi mereka sebagai hegemon dunia dan mereka terlibat banyak hutang kepada Cina untuk memperbaiki kondisi ekonominya pasca Krisis Finansial Global.¹²⁹ Walaupun demikian, para akademisi dan pengamat Cina di Amerika, menyayangkan sikap pemerintahnya yang dianggap lemah terhadap Cina.

Amerika Serikat juga menyadari bahwa ECFA merupakan upaya yang digunakan Cina untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Hal ini diungkapkan dalam sebuah bocoran kawat diplomatik yang dirilis oleh Wikileaks, di mana

¹²⁶ David B. Shear, “China-Taiwan: Recent Economic, Political and Military Developments Across the Strait and Implications for the United States,” diakses dari www.state.gov/p/eap/rls/rm/2010/03/138547.htm pada 18 Desember 2011 pukul 12.30 WIB.

¹²⁷ J. Michael Cole, “China lobbying provokes freeze on US arms sales,” *Taipei Times*, 30 Juni 2010.

¹²⁸ Martin L Lasater, *The Changing of the Guard: President Clinton and the Security of Taiwan*, (Boulder, CO: Westview Press, 1995), hal. 217-19.

¹²⁹ John F. Cooper, *Loc.cit*, hal 10.

disebutkan sebuah pertemuan rahasia antara perwakilan ARATS dan pejabat diplomatik Amerika Serikat di Beijing, bahwa ECFA tidak dapat dipungkiri akan menjadi batu loncatan bagi Cina dan Taiwan untuk melakukan negosiasi isu – isu politik yang lebih kompleks.¹³⁰ Walaupun begitu, Amerika Serikat tidak berupaya mencegah penandatanganan ECFA antara Cina dengan Taiwan, bahkan cenderung berusaha menyenangkan Cina dengan menahan penjualan senjata ke Taiwan. Walaupun demikian, Amerika Serikat akan selalu siaga jika sewaktu – waktu Cina melakukan serangan ke Taiwan untuk mencapai tujuan reunifikasinya.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa reunifikasi merupakan tujuan yang masih jauh dan sulit dicapai melalui penandatanganan ECFA. Menurut John. F. Copper, karena reunifikasi merupakan tujuan yang sangat jauh untuk dicapai Cina, agak sulit menghubungkan penandatanganan ECFA dengan upaya reunifikasi secara langsung. Jika Cina memaksakan kehendak untuk reunifikasi secara langsung melalui penandatanganan ECFA menurut Cooper akan membawa dua kerugian.

Pertama, kerugian yang diderita akibat kemungkinan rusaknya hubungan ekonomi yang telah terjalin sedemikian baiknya antara Cina dan Taiwan. Masyarakat Taiwan tentu sangat paham mengenai intensi Cina untuk melakukan reunifikasi.¹³¹ Cina akan sulit merebut hati masyarakat Taiwan untuk melakukan reunifikasi dengan perjanjian ECFA saja. Kedua, kemungkinan memaksakan kehendak untuk reunifikasi saat ini akan membawa kerugian pada *image* Cina yang ingin menjadi satu kekuatan baru yang tumbuh secara damai.¹³² Tujuan Cina untuk mencapai reunifikasi secara umum dapat dilihat dari bagaimanapun cara Cina memperlakukan Taiwan selama proses negosiasi hingga menghasilkan kesepakatan ECFA.

Awalnya, pemerintah Cina tidak mau menerima ajakan Taiwan untuk

¹³⁰ “WIKILEAKS : China Using ECFA to Push Unification”, *Taipei Times*, 9 September 2011.

¹³¹ “Taiwan-China trade No such thing as a Free Trade” , *Loc.cit.*

¹³² *Ibid.*

bernegosiasi tentang ECFA karena pada saat proposal ECFA ditawarkan ke pihak Cina untuk pertama kali, pemerintah Taiwan menerapkan sejumlah kebijakan yang inkonsisten terkait normalisasi hubungan ekonomi.¹³³ Taiwan melarang pekerja Cina dan 800 lebih jenis-jenis produk pertanian Cina untuk masuk ke pasar Taiwan. Di samping itu, produk-produk impor yang berasal dari Cina masih banyak yang dikenakan bea masuk yang tinggi. Namun, tidak berapa lama kemudian Cina menyesuaikan posisinya terhadap Taiwan mengingat keadaan Taiwan yang terkena dampak krisis finansial global.

Cina dengan senang hati merespon positif maksud presiden Ma yang menjadi pemimpin Taiwan untuk mendukung pembangunan ekonomi di Taiwan sebab presiden Ma tidak berkomitmen pada kemerdekaan Taiwan sejak 1996. Respon yang ditunjukkan Cina terhadap inisiatif Taiwan membentuk ECFA kemudian menjadi sangat positif, bahkan Cina berulang kali menyatakan bahwa kesepakatan ekonomi yang akan dibuat harus mendahulukan kepentingan ekonomi Taiwan, khususnya bagi petani kecil dan industry UMKM di Taiwan. Hu Jintao sendiri, seperti yang pernah dikutip di bab sebelumnya, pada awal 2010 pernah mengatakan bahwa selama proses negosiasi ECFA Cina akan memperhitungkan keinginan penuh dari Taiwan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi lintas selat dan mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan.¹³⁴

Cina menganggap posisi Taiwan dalam negosiasi ECFA ini adalah sebagai “Compatriots” atau rekan senegara, sebangsa dan setanah air. Tidak seperti FTA yang ditandatangani Cina dengan Hong Kong, Macau, maupun negara-negara lain, pemerintah Cina diwakili oleh ARATS, sebuah badan khusus yang menangani masalah Taiwan, dalam negosiasi dan penandatanganan ECFA. Sementara pada FTA lainnya, Cina diwakili oleh kementerian perdagangan (Ministry of Commerce). Artinya, Cina sampai saat ini masih menganggap Taiwan sebagai entitas yang tidak

¹³³ “ECFA Makes Taiwan a New Gateway to China” diakses dari http://jonesday.com/ecfa_makes_taiwan/, *Loc.cit.*

¹³⁴ “Live : Premier Wen Gives Online Interview”, *Loc.cit.*

terlepas secara politik dari Cina walaupun sistem administrasi dan ekonomi yang diterapkan oleh Taiwan jauh berbeda dari yang diterapkan di Cina.

Isu pemilihan nama ECFA juga pernah menjadi satu perdebatan tersendiri di Taiwan. Pemerintah Taiwan secara tegas menyatakan bahwa pembentukan ECFA ini murni didasarkan pada kepentingan ekonomi kedua pihak yang tidak ada sangkut paut dengan kepentingan politik dalam hubungan lintas selat. Presiden Ma telah meyakinkan publik di Taiwan, khususnya partai oposisi, Partai Demokrat Progresif yang mencium taktik politik yang dilakukan Cina untuk agar Taiwan bersedia melakukan reunifikasi dengan Cina. Isu ini menimbulkan perdebatan sendiri di publik Taiwan, apalagi sebelumnya presiden Ma menawarkan penamaan Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) pada kesepakatan ekonomi antara Cina – Taiwan. Namun, nama ini ditolak publik Taiwan karena kemiripan nama dengan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang dilakukan antara Cina dan daerah administrasi spesialnya yakni Hong Kong dan Macau. Jika nama CECA jadi dipakai maka konotasi kesepakatan ekonomi yang dihasilkan bukan lagi antara Cina dan Taiwan sebagai entitas ekonomi maupun entitas politik yang setara, melainkan antara Cina dan daerah administrasi khususnya.¹³⁵

Fokus Cina dalam setiap kebijakannya ke Taiwan saat ini tidak lagi pada pencapaian unifikasi secara langsung, tetapi melalui pencegahan Taiwan mendeklarasikan kemerdekaannya. Melalui ECFA, Cina berharap terciptanya kedekatan ekonomi dengan Taiwan sehingga dapat menjadi salah satu upaya mencegah manuver – manuver politik terkait kemerdekaan yang kerap dikemukakan oposisi di Taiwan. Akhirnya, tidak dapat dipungkiri bahwa penandatanganan ECFA merupakan salah satu upaya Cina untuk melakukan reunifikasi secara damai dengan Taiwan dalam jangka panjang.

¹³⁵ Zhao Hong dan Sarah Y. Tong, *Loc.cit.*

IV.2 Kepentingan Ekonomi Cina dalam Penandatanganan ECFA

Pilihan Cina untuk menggunakan instrumen ekonomi melalui penandatanganan ECFA ketimbang menggunakan instrumen militer tentu bukan tanpa alasan. Ketegangan politik antara Cina – Taiwan selama beberapa periode membawa dampak bagi interaksi ekonomi lintas selat. Interaksi ekonomi Cina – Taiwan pasca perang sipil tahun 1949 hingga tahun 1979 sangat minim, sebab pada masa itu Cina di bawah kepemimpinan Mao Zedong dan Taiwan di bawah kepemimpinan Chiang Kai-sek menutup diri satu sama lain. Alih – alih melakukan pertukaran ekonomi, kedua pihak justru melakukan pertukaran kekuatan militer (kontestasi senjata) di selat Taiwan.¹³⁶

Hubungan ekonomi lintas selat mulai terbuka seiring dengan reformasi ekonomi yang dijalankan oleh Deng Xiaoping di Cina dan perubahan kebijakan pemimpin Taiwan setelah tahun 1979. Pada awalnya, Taiwan di bawah kepemimpinan Chiang Ching Kuo pada tahun 1979 mengeluarkan kebijakan “three no’s policy” yang berisi *no contact, no negotiation, no compromise* yang melarang perusahaan-perusahaan di Taiwan melakukan investasi dan perdagangan langsung dengan Cina. Namun, larangan tersebut dirasa tidak efektif karena pemerintah Cina mulai mengeluarkan insentif – insentif serta peluang – peluang baru bagi pembukaan bisnis di Cina.¹³⁷

Chiang Ching Kuo akhirnya memperbolehkan pebisnis Taiwan melakukan kontak ekonomi dengan Cina. Walaupun demikian, hubungan ekonomi ini masih terbatas. Perdagangan antara kedua wilayah dilakukan melalui perantara, yakni Hong Kong dan Macau. Tidak ada perdagangan langsung antara Cina – Taiwan, begitu juga dengan hubungan persuratan dan transportasi.¹³⁸

¹³⁶ *Ibid*, hal. 78 -80.

¹³⁷ Karen M. Sutter, *Loc.cit.*, hal. 524 – 528.

¹³⁸ Peterson Institute for International Economics, “China – Taiwan Economic Relations” diakses dari http://www.piie.com/publications/chapters_preview/5010/01iie5010.pdf pada 18 November 2011 pukul 17.31 WIB, hal. 6

Setelah itu, interaksi ekonomi Cina – Taiwan mengalami perkembangan cukup pesat tahun 1983 – 1986 dan mengalami pertumbuhan yang stabil pada tahun 1986 – 1997. Pada periode ini juga mulai dibuka jalur investasi bagi pengusaha Taiwan ke Cina.¹³⁹ Pada tahun 1983, Beijing mengeluarkan kebijakan “Guidance on Taiwanese Investments in Special Economic Zones and Related Favorable Policies.” Kemudian di bulan Juli 1988, dewan negara Cina mengeluarkan “Regulations for Encouraging Investment by Taiwan Compatriots,” yang diikuti dengan pendirian dua zona investasi khusus bagi perusahaan – perusahaan Taiwan di Provinsi Fujian pada Mei 1989.¹⁴⁰

Fenomena ini cukup menarik untuk dilihat sebab pada masa perkembangan hubungan ekonomi antara Cina – Taiwan, hubungan politik mereka cenderung tidak mengalami ketegangan, sementara pada periode selanjutnya ketika terjadi pertumbuhan yang stabil justru ketegangan politik Cina – Taiwan kembali meningkat hingga Cina mengadakan uji coba misil ke arah Taiwan di tahun 1995. Dampaknya, dengan alasan keamanan, Taiwan membatasi barang-barang impor Cina, sehingga pada periode berikutnya yakni pada tahun 1998 – 2001, hubungan ekonomi kedua entitas ini mengalami penurunan.¹⁴¹ Namun, hubungan perdagangan kembali mengalami peningkatan secara substansial pada tahun 2002 hingga 2008. Periode ini juga cukup unik untuk dilihat sebab pada periode ini Chen Sui Bian yang menjadi presiden Taiwan mengeluarkan beberapa pernyataan konfrontatif terkait Cina. Dinamika hubungan ekonomi Cina – Taiwan secara lebih jelas dapat dilihat dari nilai perdagangan yang mereka lakukan melalui Hong Kong dari tahun 1979 – 2004 pada tabel di halaman berikutnya.

¹³⁹ *Ibid*, hal. 27

¹⁴⁰ Karen M. Sutter, “Business Dynamism Across The Taiwan Strait : The Implications for Cross-Strait Relations” dalam *Asian Survey*, Vol. 42, No. 3 (2002), hal. 530 – 534.

¹⁴¹ Zhang Linzeng, *Op.cit*.

Tabel IV.1. Nilai Perdagangan Cina – Taiwan melalui Hong Kong tahun 1979 - 2004

Year	Total Trade		Taiwan's Exports to Mainland China through Hong Kong			Mainland China's Exports to Taiwan through Hong Kong			Trade Balance of Taiwan
	Amount	Annual Growth Rate (%)	Amount	Annual Growth Rate (%)	% of Taiwan's Exports	Amount	Annual % of Growth Rate (%)	Taiwan's Imports	
1970	1.80	—	—	—	—	1.80	—	0.11	-1.80
1971	2.52	40.00	—	—	—	2.52	40.00	0.13	-2.52
1972	7.94	215.08	—	—	—	7.94	215.08	0.31	-7.94
1973	16.77	111.21	—	—	—	16.77	111.21	0.44	-16.77
1974	21.41	27.67	0.01	—	a	21.40	27.61	0.30	-21.39
1975	25.68	19.94	0.01	0	a	25.67	19.95	0.43	-25.66
1976	41.09	60.01	0.02	100.00	a	41.07	59.99	0.54	-41.05
1977	30.65	-25.41	0.03	50.00	a	30.62	-25.44	0.35	-30.59
1978	46.77	52.59	0.05	66.67	a	46.72	52.58	0.42	-46.67
1979	77.80	66.35	21.50	42,900.00	0.13	56.30	20.51	0.38	-34.80
1980	311.20	300.00	235.00	993.02	1.19	76.20	35.35	0.39	158.80
1981	459.30	47.59	384.20	63.49	1.70	75.20	-1.31	0.35	309.00
1982	278.50	-39.36	194.50	-49.38	0.88	84.00	11.70	0.44	110.50
1983	247.70	-11.06	157.90	-18.82	0.63	89.90	7.02	0.44	68.00
1984	558.20	123.33	425.50	169.47	1.40	127.80	42.16	0.58	297.70
1985	1,102.70	99.33	986.90	131.94	2.21	115.90	-9.31	0.58	871.00
1986	955.60	-13.34	811.20	-17.80	2.04	144.20	24.42	0.60	667.00
1987	1,515.50	58.59	1,226.50	51.20	2.30	288.90	100.35	0.83	937.60
1988	2,720.90	79.54	2,242.20	82.31	3.70	478.70	65.70	0.96	1,763.50
1989	3,483.40	28.02	2,896.50	29.18	4.38	586.90	22.60	1.12	2,309.60
1990	4,043.60	16.08	3,278.30	13.18	4.88	765.40	30.41	1.40	2,512.90
1991	5,793.10	43.27	4,667.20	42.37	6.12	1,126.00	47.11	1.79	3,541.20
1992	7,406.90	27.86	6,287.90	34.73	7.72	1,119.00	-0.62	1.55	5,168.90
1993	8,689.00	17.31	7,585.40	20.63	8.93	1,103.60	-1.38	1.43	6,481.80
1994	9,809.50	12.90	8,517.20	12.28	9.15	1,292.30	17.10	1.51	7,224.90
1995	11,457.00	16.79	9,882.80	16.03	8.84	1,574.20	21.81	1.51	8,308.60
1996	11,300.00	-1.37	9,717.60	-1.67	8.38	1,582.40	0.52	1.56	8,135.20
1997	11,458.90	1.41	9,715.08	-0.03	7.95	1,743.82	10.20	1.52	7,971.26
1998	10,018.97	-12.57	8,364.10	-13.91	7.56	1,654.87	-5.10	1.58	6,709.23
1999	9,803.07	-2.15	8,174.87	-2.26	6.72	1,628.20	-1.61	1.47	6,546.67
2000	11,573.70	18.06	9,593.10	17.35	6.47	1,980.50	21.64	1.41	7,612.60
2001	10,504.80	-9.24	8,811.50	-8.15	7.17	1,693.30	-14.50	1.58	7,118.20
2002	12,019.80	14.42	10,311.8	17.03	7.90	1,708.10	0.87	1.52	8,603.70
2003	13,950.40	16.06	11,789.4	14.33	8.17	2,161.10	26.52	1.70	9,628.30
2004	17,247.28	23.63	14,761.9	25.21	8.48	2,485.38	15.01	1.48	12,276.52

Sumber : Departemen Sensus dan Statistik Daerah Administratif Khusus Hong Kong serta Kementerian Keuangan Taiwan¹⁴²

Dari data di atas terlihat nilai perdagangan Cina – Taiwan yang cenderung meningkat kecuali di periode yang disebutkan di atas. Sebelum tahun 1979 sangat kecil sekali nilai perdagangan antara Cina – Taiwan, bahkan tidak ada ekspor dari Taiwan ke Cina hingga tahun 1979, sehingga neraca perdagangan Taiwan terhadap Cina nilainya selalu negatif. Namun, setelah Taiwan membuka ekspornya ke Cina, neraca perdagangannya justru jauh lebih besar dari Cina dan semakin meingkat

¹⁴² *Ibid*, hal. 76 – 77.

walaupun hubungan kedua negara mengalami ketegangan politik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan anomali antara ekonomi dan politik Cina – Taiwan terutama pada masa krisis 1995 dan pada periode kepemimpinan Chen Sui Bian yang dianggap melanggar prinsip “One China”.

Memang, setelah uji coba misil pada tahun 1995, kepercayaan investor Taiwan cenderung menurun sebab mereka percaya bahwa konflik politik akan membawa dampak negatif bagi investasi mereka.¹⁴³ Oleh sebab itu, pemerintah Cina terus membuat beberapa kemudahan bagi investor Taiwan yang menanamkan modalnya di Cina dan meyakinkan bahwa uji coba misil tidak diperuntukan bagi orang – orang Taiwan yang biasa, tetapi bagi mereka yang berusaha memisahkan diri dari Cina.¹⁴⁴

Taiwan cenderung berhati-hati dalam membuka hubungan ekonomi dengan Cina. Hal ini dapat dilihat dari minimnya nilai ekspor Taiwan ke Cina pada periode pertama dan pembatasan barang-barang impor Cina yang masuk ke Taiwan. Walaupun demikian, para pengusaha Taiwan tetap menjadikan Cina sebagai tempat pilihan investasi. Cina merupakan salah satu tujuan utama investor Taiwan setelah pemerintah Taiwan pada tahun 1987 membolehkan orang – orang Taiwan mengunjungi kerabatnya di Cina. Investasi Taiwan di Cina juga didukung dengan adanya peraturan “Regulations Encouraging Investment by Taiwan Compatriots” yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina pada juli 1988 hingga memunculkan lebih dari 30.000 jenis usaha dan mempekerjakan sekitar 5 juta penduduk Cina saat ini.¹⁴⁵

Data lain menunjukkan investasi Taiwan di Cina pada akhir tahun 2009 bernilai lebih dari US\$ 49 milyar atau setara 5% dari jumlah total FDI yang masuk ke Cina. Bahkan nilai investasi Cina di Taiwan saat ini diperkirakan telah lebih dari

¹⁴³ Tse – Kang Leng, *Loc.cit*, hal. 7

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Tse – Kang Leng, “Dynamics of Taiwan-Mainland China Economic Relations: the Role of Private Firms”, diakses dari <http://www.asianperspective.org/articles/v29n2-b.pdf> pada 18 November 2011 pukul 17.31 WIB, hal. 10.

US\$ 150 milyar.¹⁴⁶ Padahal di Tahun 2003, nilai FDI dari Taiwan ke Cina hanya sebesar US\$ 3,38 milyar. Tingginya jumlah investasi dari Taiwan ke Cina menjadikan Cina sebagai negara tujuan FDI terbesar Taiwan. Akibatnya sekitar satu juta penduduk Taiwan saat ini bermukim di Cina untuk berbisnis, ditambah lebih dari satu juta orang lainnya bepergian bolak balik dari Taiwan ke Cina untuk tujuan yang sama. Investor Taiwan saat ini juga menguasai 50 besar perusahaan manufaktur ekspor di Cina.¹⁴⁷

Tentu saja hal ini merupakan jumlah yang cukup signifikan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Cina. Pemerintah Cina memiliki kepentingan untuk menjaga aliran dana dari investor Taiwan tetap bebas masuk ke Cina. Oleh sebab itu, ECFA di satu sisi juga membawa keuntungan ekonomi bagi Cina dengan adanya peningkatan fasilitas dan promosi investasi antara kedua belah pihak. Inilah yang merupakan kepentingan ekonomi Cina dalam penandatanganan ECFA. Walaupun secara agregat Taiwan jauh lebih diuntungkan daripada Cina dalam konsesi jumlah penurunan tarif produk ekspor, Cina juga memiliki keuntungan untuk menjaga dan meningkatkan jumlah FDI yang masuk dari Taiwan.

IV.3. ECFA sebagai Upaya *Peaceful Development* Cina di Kawasan Asia Timur

IV.3.1. Terminologi *Peaceful Development*

Peaceful Development, merupakan terminologi yang sering diasosiasikan dengan kebangkitan Cina di dunia internasional maupun di kawasan Asia Timur. Baru – baru ini, tepatnya pada tanggal 6 September 2011, Kantor Informasi Dewan Negara Republik Rakyat Cina mengeluarkan *White Book on China's Peaceful Development* atau Buku Putih tentang Pembangunan Cina secara Damai. Buku

¹⁴⁶ Diakses dari <http://www.winklerpartners.com/a/comment/taiwanese-investment-in-china.php> pada 17 Januari 2012 pukul 19.00 WIB.

¹⁴⁷ *Ibid.*

putih itu terdiri dari 6 bagian, yakni tentang definisi, tujuan, kebijakan, alur dan arti *peaceful development* yang dilakukan Cina bagi dunia internasional.¹⁴⁸

Dalam buku putih tersebut, Cina mendefinisikan *peaceful development* sebagai alur pembangunan di mana China membangun dirinya sendiri dengan memegang teguh perdamaian dunia dan berkontribusi untuk perdamaian dunia melalui pembangunannya. Cina harus mencapai pembangunan dengan usahanya sendiri melalui reformasi dan inovasi serta membuka diri dan belajar dari negara – negara lain. Cina juga harus bekerja sama dengan negara – negara lain untuk menciptakan dunia yang harmonis dengan perdamaian abadi dan kemakmuran bersama. Dalam konteksnya, *peaceful development* juga menjadi pedoman Cina untuk tetap mengikuti tren globalisasi ekonomi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara lain.

Secara khusus, dalam buku putih tersebut pemerintah Cina memberikan alasan mengapa mereka berpegang pada alur *peaceful development*. Cina mengklaim dirinya sebagai negara yang cinta damai. Kebutuhan akan pembangunan dan perdamaian menjadi hal utama bagi rakyat Cina melihat penderitaan mereka akibat perang dan kemiskinan di masa lalu. Mereka melihat hanya perdamaian yang akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu, tujuan utama dari diplomasi Cina adalah untuk menciptakan lingkungan internasional yang damai dan stabil bagi pembangunannya. Dalam buku putih itu juga disebutkan bahwa Cina tidak pernah mengejar status hegemon dan akan selalu berusaha menjaga stabilitas dan perdamaian bagi dunia dan kawasan.

Adapun tujuan Cina dalam melaksanakan *peaceful development* ialah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya agar tercapai kemakmuran dan mencapai status sebagai negara dengan tingkat kemajuan ekonomi mengah.Salah satu cara untuk mencapai tujuan itu adalah dengan mengimplementasikan strategi pembukaan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dengan negara lain.

¹⁴⁸ Teks lengkap *White Book : China's Peaceful Development* dapat diakses melalui http://www.gov.cn/english/official/2011-09/06/content_1941354.htm.

Cina akan terus berusaha menciptakan kondisi yang mendukung terciptanya globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi regional. Cina berjanji akan meningkatkan kualitas dan efisiensi perdagangan, meningkatkan tingkat kompetisi barang eksportnya dalam perdagangan asing serta tidak lagi bersandar pada ongkos produksi yang rendah. Cina juga berjanji akan mempromosikan perdagangan jasa, meningkatkan impor dan melawan proteksi dalam perdagangan internasional. Di sisi lain Cina akan berusaha menggunakan investasi asing yang masuk untuk meningkatkan infrastrukturnya. Cina berjanji akan menyeimbangkan ekspor dan penerimaan investasi asingnya dengan fokus kepada impor dan membuat investasi di luar negeri. Salah satu cara Cina untuk memenuhi janji – janji tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuannya dalam perdagangan luar negeri dan berpartisipasi aktif dalam pembagian kerja di tingkat internasional.

Salah satu cara Cina dalam melakukan *peaceful development* adalah dengan mempromosikan kerjasama intra regional (dalam kawasan) dan hubungan yang baik dengan negara tetangga. Menurut Cina, negara – negara harus meningkatkan perdagangan dan kerjasama yang saling menguntungkan, mempromosikan integrasi ekonomi regional dan meningkatkan mekanisme kerjasama yang telah ada baik dalam kawasan maupun sub-kawasan. Dalam konteks promosi kerjasama regional. Cina kembali menegaskan bahwa mereka tidak ingin mencari status hegemon regional atau mengucilkan satu negara pun dalam kerjasama regional. Cina berjanji akan tetap menjadi tetangga yang baik, teman, dan partner negara – negara Asia lainnya.

Melalui kerangka *peaceful development*, Cina berusaha mengubah persepsi dunia internasional dari negara yang berusaha mencapai status hegemon dunia dengan *peaceful rising* menjadi negara yang harmonis dan mendukung kesejahteraan serta perdamaian dunia. Cina tidak ingin dianggap sebagai ancaman atau musuh negara manapun. Sebaliknya, Cina berusaha menggandeng negara – negara yang pernah berselisih paham untuk menjadi teman yang baik.

Tentu saja buku putih yang dibuat oleh Cina tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat internasional. Beberapa pengamat menyatakan kepesimisannya terhadap buku putih yang dikeluarkan. Menurut Shantanu, walaupun Cina menggunakan terminologi *peaceful development* di sini, tidak berarti Cina akan menghentikan peningkatan kapabilitas militernya ketika ada potensi konflik dengan negara – negara tetangganya.¹⁴⁹ Sementara itu, menurut Chengxin Pan, konsep *peaceful development* yang menggantikan konsep *peaceful rise* merepresentasikan kontrak sosial baru antara Cina dan aktor – aktor internasional lain. Dengan konsep baru ini, Cina mendefinisikan tanggung jawabnya dalam konteks baru untuk melegitimasi seluruh kebijakan luar negeri yang dilakukannya. Artinya, dengan mendeklarasikan dirinya yang terikat prinsip *peaceful development*, Cina memiliki tanggung jawab baru sebagai aktor internasional yang harus senantiasa mempromosikan perdamaian dan kemajuan dunia.¹⁵⁰

IV.3.2. ECFA dan *Peaceful Development* di Kawasan Asia Timur

Penandatanganan ECFA dalam konteksnya sebagai perjanjian kerjasama ekonomi di tingkat regional mempromosikan usaha Cina dalam melakukan *peaceful development*, khususnya di kawasan Asia Timur. Seperti yang telah dikatakan oleh Hu Jintao, pada pidato peringatan 90 tahun berdirinya Partai Komunis Cina, bahwa Cina berusaha mempromosikan *peaceful development* dalam hubungan lintas selat dengan Taiwan. Caranya melalui peningkatan pertukaran dan kerjasama di semua area. Artinya, ECFA yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Cina dan Taiwan dalam bidang ekonomi, termasuk salah satu cara Cina dalam melakukan *peaceful development*.

Penandatanganan ECFA juga menunjukkan bahwa Cina ingin

¹⁴⁹ Shantanu Chakrabarti, "The Chinese White Paper on 'Peaceful Development': Worth a Second Glance?", diakses dari <http://www.caluniv.ac.in/ifps/Shantanu.pdf> pada 15 Desember 2011 pukul 20.00 WIB.

¹⁵⁰ Chengxin Pan, "Peaceful Rise & China's new International Contract: The state in change in transnational society," dalam Linda Chelan Li(ed.), *The Chinese state in transition: Processes and Contests in Local China*(UK: Routledge, 2009), hal. 143

menyelesaikan persoalan dengan Taiwan secara damai. Cina berusaha membangun *image* positif dalam penyelesaian permasalahan dengan Taiwan. Para pemimpin Cina menyadari betul bahwa konflik dengan Taiwan akan membawa keburukan – keburukan bagi hubungan luar negerinya, terutama hubungannya dengan Amerika Serikat dan Asia Tenggara.¹⁵¹ ECFA dilihat sebagai suatu upaya untuk meredakan ketegangan dengan Taiwan dan membantu Cina mempromosikan strategi *peaceful development* khususnya ketika saat ini Cina sedang terlibat ketegangan dengan negara – negara Asia dalam sengketa Laut Cina Selatan. Kebijakan akomodatif Cina terhadap Taiwan dalam penandatanganan ECFA dilakukan sebab pembangunan ekonomi domestik Cina, seperti yang telah dijelaskan dalam buku putih, memerlukan syarat terciptanya perdamaian di kawasan.

Keinginan Cina untuk menjaga tren globalisasi ekonomi dengan mempromosikan kerjasama ekonomi regional juga tergambar jelas melalui penandatanganan ECFA. ECFA merupakan sebuah bentuk kerjasama ekonomi regional di wilayah Asia Timur yang berdampak pada keikutsertaan Taiwan dalam proses integrasi ekonomi regional. Seperti yang telah dijelaskan pada bab dua, Taiwan berusaha mengadakan kerjasama ekonomi dengan Cina sebagai upayanya lepas dari eksklusi integrasi ekonomi regional. Dengan adanya ECFA, status barang – barang Taiwan dengan status barang – barang Asia Tenggara dan negara – negara yang menandatangani FTA dengan Cina akan sama.¹⁵²

Jika sebelum ECFA diimplementasikan, Cina menerapkan tarif tertentu kepada barang – barang yang berasal dari Taiwan, setelah penandatanganan ECFA barang – barang Taiwan yang masuk ke Cina tidak akan mendapatkan diskriminasi berupa hambatan tarif. Selain itu, penandatanganan ECFA, membuka peluang Taiwan menandatangani FTA dengan negara lain. Saat ini, sudah ada beberapa negara yang tertarik untuk menandatangani FTA dengan Taiwan seperti Amerika Serikat, Jepang dan Selandia Baru. Dapat dikatakan, keinginan Cina agar tidak ada

¹⁵¹ John F. Copper, *Loc.cit.*

¹⁵² *Ibid.*

negara yang tereksklusi dari proses integrasi regional juga tergambar dari keputusannya menandatangani ECFA dengan Taiwan.

IV.4. Kepentingan Cina dalam Penandatanganan ECFA : Analisa *Economic Statecraft* Cina terhadap Taiwan

Esensi dari *economic statecraft* adalah penggunaan instrumen kebijakan ekonomi untuk tujuan – tujuan politik. Menurut Baldwin, *economic statecraft* merupakan suatu tindakan politik yang menggunakan cara – cara ekonomi untuk mengubah perilaku target dalam segala dimensi.¹⁵³ Konsep *economic statecraft* kemudian diturunkan ke dalam tiga komponen dasar, yakni : 1) tipe instrumen kebijakan yang dipilih, 2) target (sasaran) dari kebijakan yang dipilih) dan 3) tujuan dari kebijakan yang dijalankan. Suatu kebijakan dikategorikan sebagai *economic statecraft* menurut Baldwin harus memenuhi syarat ketiga komponen di atas. Instrumen kebijakan yang dipilih dalam *economic statecraft* haruslah merupakan instrumen ekonomi, ditargetkan untuk aktor internasional lain dan untuk mengubah perilaku target tersebut.

Dari paparan pada bab III, telah dibuktikan bahwa penandatanganan ECFA yang dilakukan oleh Cina merupakan bentuk *economic statecraft* yang dilakukan terhadap Taiwan. Hal tersebut dibuktikan dari analisa komponen – komponen dasar *economic statecraft* yang ada dalam ECFA. Pertama, penandatanganan ECFA merupakan sebuah instrumen kebijakan ekonomi yang berupa *positive sanction*. Kedua, penandatanganan ECFA ditujukan untuk mengubah perilaku Taiwan sebagai aktor internasional, khususnya mengubah persepsi publik tentang Cina. Ketiga, penandatanganan ECFA memiliki tujuan untuk mempengaruhi Taiwan secara umum dan secara khusus.

Cina memiliki kepentingan politik dalam penandatanganan ECFA yakni sebagai usaha untuk melakukan reunifikasi secara damai dengan Taiwan serta membuktikan upayanya dalam melakukan *peaceful development* di kawasan Asia

¹⁵³ David Baldwin, *Op.cit*, hal. 33

Timur. Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga aliran dana investasi yang masuk dari Taiwan.

Reunifikasi dengan Taiwan merupakan tujuan utama dari setiap kebijakan luar negeri Cina ke Taiwan. Namun, sejak dikeluarkannya “A Message to Compatriots in Taiwan” pada tahun 1979, tujuan utama tersebut sebisa mungkin dicapai dengan cara – cara damai (tanpa perang). Reunifikasi secara damai kemudian menjadi basis utama kebijakan Cina terhadap Taiwan.

Tentu saja, reunifikasi dengan Taiwan tidak bisa dilakukan oleh Cina secara langsung, tanpa menggunakan kekuatan militer. Pada tahun 1995, tujuan reunifikasi tersebut diturunkan menjadi “pencegahan kemerdekaan Taiwan”. Namun, terjadi ketegangan militer antara Cina dan Taiwan selama dua tahun kemudian, sehingga hubungan politik antara Cina dan Taiwan semakin memanas. Akibat ketegangan politik tersebut, Cina menurunkan tujuannya kembali untuk mendekati Taiwan melalui dialog – dialog ekonomi yang diharapkan membawa kedua pihak pada dialog politik mengenai status Taiwan. Inilah yang ingin dicapai Cina melalui dialog – dialog yang dilakukan terkait pembentukan dan implementasi ECFA.

Meskipun tidak memberikan keuntungan ekonomi yang maksimal, penandatanganan ECFA tetap memberikan keuntungan ekonomi bagi Cina yakni untuk memastikan aliran dana investasi dari Taiwan tetap berjalan. Jumlah FDI dari Taiwan yang cukup besar membuat Cina sangat berhati – hati untuk melakukan *negative sanctions* ke Taiwan. Dapat dikatakan selain kepentingan politik, Cina juga memiliki kepentingan ekonomi dalam penandatanganan ECFA, yakni untuk menjaga aliran dana investasi dari Taiwan ke Cina.

Dalam konteks geopolitik, kebijakan penandatanganan ECFA merupakan suatu bentuk upaya Cina menunjukkan *peaceful development* di Selat Taiwan. Cina ingin dilihat sebagai negara yang tidak ambisius mencari status hegemon di kawasan. Cina ingin dilihat oleh dunia internasional sebagai negara yang tumbuh secara damai dan tidak mengancam keberadaan negara lain. Melalui

penandatanganan ECFA, Cina juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka dapat menyelesaikan permasalahan dengan Taiwan secara damai, sehingga kekhawatiran masyarakat internasional akan terjadinya perang terbuka di Selat Taiwan dapat dipatahkan. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa Cina memilih *economic statecraft* daripada *military statecraft* sebagai usahanya untuk mencapai reunifikasi dengan Taiwan.

Dengan demikian, pertanyaan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dapat terjawab. Cina memiliki kepentingan dalam penandatanganan perjanjian ECFA yang berupa kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Dari analisa kepentingan nasional dan konsep *economic statecraft* didapatkan bahwa Cina memiliki kepentingan untuk mencapai reunifikasi dengan Taiwan dalam jangka panjang, menjaga aliran dana investasi dari Taiwan serta sebagai pembuktian Cina yang sedang menerapkan *peaceful development* di kawasan Asia Timur.

BAB V

KESIMPULAN

Isu hubungan lintas selat antara Cina dan Taiwan akan selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas sebelum Cina berhasil melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Kenyataannya, jalan menuju reunifikasi antara Cina dan Taiwan masih sangat panjang. Terdapat berbagai hal yang menjadi halangan kedua entitas bangsa Cina tersebut untuk bersatu dalam wadah “One China”. Belum lagi keterlibatan Amerika Serikat di Selat Taiwan menambah dinamika hubungan lintas selat.

Penandatanganan *Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) merupakan suatu kemajuan dalam hubungan lintas selat, setelah 60 tahun terakhir hubungan ini selalu diwarnai dinamika ketegangan politik dan pembatasan kontak ekonomi. ECFA merupakan kesepakatan ekonomi formal pertama yang berhasil dicapai kedua pihak. Kedua pihak sepakat untuk bekerjasama meningkatkan interaksi ekonomi lintas selat melalui pemotongan tarif perdagangan hingga 0%, melakukan liberalisasi sektor jasa dan membuka keran investasi. Padahal, dalam dua dekade terakhir ketegangan politik antara Cina dan Taiwan semakin meningkat. Salah satunya dapat terlihat dari uji coba misil dari Cina yang diarahkan ke Taiwan pada tahun 1995 dan peningkatan anggaran belanja militer Taiwan untuk membeli senjata ke Amerika Serikat. Adanya perjanjian ECFA dapat dianggap sebagai titik balik dalam hubungan lintas selat.

Perjanjian yang dikategorikan sebagai *Preferential Trade Agreement* ini ternyata tidak bersifat resiprokal (seimbang) secara ekonomi. Dari segi perdagangan, Taiwan hanya bersedia menurunkan tarif bagi 267 jenis produk dari Cina, sementara Cina memperbolehkan 539 jenis produk Taiwan untuk dibebaskan dari tarif. Selain itu, Cina bersedia membuka 11 jenis sektor jasa untuk pengusaha Taiwan, sementara Taiwan hanya membuka 9 jenis sektor jasa untuk pengusaha Cina. Dari isi perjanjian tersebut, jelas Taiwan jauh lebih diuntungkan daripada

Cina. Cina sendiri sadar bahwa perjanjian tersebut tidak menguntungkan secara ekonomi. Namun, Cina memiliki kepentingan yang lebih jauh daripada sekedar keuntungan ekonomi jangka pendek. Kepentingan Cina dalam penandatanganan ECFA inilah yang kemudian berusaha diidentifikasi melalui penelitian.

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang tercermin dari tujuan kebijakan luar negerinya masing – masing. Dalam konteks nasionalisme ekonomi, usaha pencapaian kepentingan nasional suatu negara dilakukan melalui aktivitas ekonomi yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan-tujuan nasionalis seperti mempromosikan kesatuan, identitas, dan otonomi dari sebuah bangsa dapat dicapai melalui berbagai kebijakan ekonomi. Penandatanganan ECFA dalam konteks ini dapat diidentifikasi sebagai salah satu cara mencapai tujuan nasional Cina, yakni reunifikasi.

Penandatanganan ECFA dilihat sebagai *economic statecraft* yakni suatu teknik penggunaan instrumen kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dan bertujuan untuk mengubah perilaku aktor internasional lain, baik yang merupakan aktor negara maupun aktor non-negara, agar sesuai dengan kepentingan negara tersebut. Terdapat tiga komponen dasar dari *economic statecraft* yakni tipe instrumen kebijakan yang dipilih, sasaran kebijakan yang diambil serta tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Agar suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai *economic statecraft*, kebijakan tersebut harus merupakan tipe instrumen kebijakan ekonomi, memiliki target berupa aktor internasional lain, serta memiliki tujuan untuk mengubah perilaku target dalam dimensi apapun.

Penelitian ini membuktikan bahwa penandatanganan ECFA merupakan bentuk *economic statecraft* yang dilakukan Cina terhadap Taiwan. ECFA merupakan sebuah tipe instrumen kebijakan ekonomi yang bersifat *positive sanction* di mana kedua pihak sepakat untuk menurunkan tarif perdagangan dan memperkuat kerjasama ekonomi dalam negosiasi lanjutan. Penandatanganan ECFA memiliki target untuk mengubah perilaku Taiwan, khususnya masyarakat, kalangan

bisnis dan pemerintah Taiwan agar lebih dekat dengan Cina dan menganggap Cina sebagai “saudara sebangsa”. *Economic statecraft* ini dilakukan oleh Cina dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Adapun kepentingan Cina yang berhasil diidentifikasi dalam penandatanganan ECFA adalah penandatanganan ECFA sebagai upaya untuk melakukan reunifikasi secara damai yang merupakan tujuan utama segala kebijakan Cina terhadap Taiwan. Selain itu, Cina memiliki kepentingan ekonomi untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah investasi dari Taiwan. Terakhir, secara geopolitik Cina ingin membuktikan usahanya dalam melakukan *peaceful development* khususnya di kawasan Asia Timur.

Reunifikasi memang menjadi kepentingan utama Cina dalam penandatanganan ECFA. Namun, kepentingan tersebut merupakan kepentingan jangka panjang yang masih sulit dicapai dalam waktu dekat. Cina berusaha memperbaiki hubungan politik dengan Taiwan melalui negosiasi ekonomi. Inisiatif ECFA yang diajukan Taiwan disambut baik oleh pemerintah Cina sebab mereka menyadari bahwa kesepakatan ekonomi dapat menjadi awal yang baik bagi pembukaan dialog – dialog politik hingga tercapai kesepakatan politik yang menjadi tujuan utama Cina. Penulis melakukan proyeksi bagi model reunifikasi yang ingin dicapai oleh Cina melalui penandatanganan ECFA.

ECFA merupakan tahap awal usaha Cina melakukan reunifikasi, di mana kedua entitas berusaha menormalisasikan hubungan ekonomi dengan negosiasi – negosiasi ekonomi yang intens hingga akhirnya bersepakat untuk melakukan kerjasama ekonomis. Tahap kedua adalah pengintensifan dialog - dialog ekonomi sehingga memungkinkan Cina – Taiwan membentuk sebuah area perdagangan bebas (*free trade area*) dan pasar bersama (*common market*) sehingga kedua entitas sudah berhubungan erat dengan adanya integrasi ekonomi. Tahap ketiga yang mungkin terjadi adalah *spillover effect* dari negosiasi – negosiasi dan kerjasama ekonomi ke negosiasi – negosiasi politik. Negosiasi – negosiasi politik inilah yang kemudian akan membawa Cina dan Taiwan duduk bersama untuk menyepakati

status politik Taiwan, di mana Cina akan berusaha sedapat mungkin mencapai kata “reunifikasi” dengan Taiwan melalui negosiasi – negosiasi tersebut.

Namun, tentunya model reunifikasi yang dipaparkan tidak akan semudah itu terjadi. Peta kekuatan politik domestik Taiwan di mana saat ini sebagian besar masyarakatnya lebih menginginkan *status quo* dan masih kuatnya gerakan – gerakan pro kemerdekaan membuat jalan Cina untuk mencapai reunifikasi masih sangat panjang. ECFA ditengarai banyak pihak yang pro kemerdekaan di Taiwan sebagai upaya Cina melakukan reunifikasi politik. Mereka mengemukakan keras penandatanganan ECFA yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan sebab mereka menganggap hal tersebut sebagai penjualan kedaulatan Taiwan kepada Cina secara tidak langsung. Selain itu, kehadiran Amerika Serikat dalam hubungan lintas selat nampaknya masih akan menjadi penghalang bagi Cina untuk mencapai tujuannya dalam reunifikasi dengan Taiwan.

Selain kepentingan politik, Cina juga memiliki kepentingan ekonomi dalam penandatanganan ECFA. Dilihat dari isi perjanjian ECFA, Cina memang tidak terlalu diuntungkan dalam jumlah produk ekspor yang sepakat untuk diturunkan tarifnya. Namun, dari segi peningkatan promosi dan fasilitasi investasi, perjanjian ini cukup membantu Cina untuk menjaga bahkan meningkatkan aliran FDI dari Taiwan. Di mana, saat ini Taiwan menjadi salah satu pemberi FDI terbesar di Cina. FDI sendiri berpengaruh dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Cina agar tetap stabil. Dengan demikian, Cina tetap memiliki kepentingan ekonomi dalam penandatanganan ECFA.

Terakhir, kepentingan Cina yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini adalah upayanya melakukan *peaceful development*. Cina selalu berupaya menunjukkan sisi baiknya terhadap Taiwan maupun dunia internasional melalui *peaceful development*. Melalui penandatanganan ECFA, Cina menunjukkan usahanya pada dunia internasional, khususnya bagi negara – negara yang berada di kawasan Asia Timur bahwa mereka mendukung upaya integrasi ekonomi regional

dan mendorong upaya tersebut lebih luas lagi dengan membuka jalan bagi Taiwan untuk terlibat dalam integrasi ekonomi tersebut. Selain itu, Cina ingin menunjukkan kepada Amerika Serikat yang selama ini khawatir terhadap masa depan Taiwan yang jatuh ke tangan Cina melalui penggunaan kekuatan militer, bahwa Cina dapat mencapai reunifikasi secara damai dengan Taiwan. Penandatanganan ECFA yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Amerika Serikat menunjukkan sikap positifnya terhadap upaya Cina melakukan reunifikasi secara damai.

Dapat disimpulkan bahwa alasan Cina mau menandatangani perjanjian ECFA dengan Taiwan adalah untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan Cina yang utama terhadap Taiwan adalah reunifikasi, sementara di sisi lain Cina juga memiliki kepentingan untuk menunjukkan usaha *peaceful development* yang dilakukan di kawasan. Tentu saja, Cina juga memiliki kepentingan ekonomi dalam perjanjian ECFA untuk menjaga aliran dana investasi asing langsung dari Taiwan.

Reunifikasi merupakan tujuan yang masih sangat panjang bagi Cina dan Taiwan. ECFA dapat menjadi langkah awal bagi Cina untuk mendekatkan tujuan tersebut. Namun, bisa jadi cara ini gagal menormalisasikan dan mendekatkan hubungan Cina – Taiwan . Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan apakah penggunaan cara ekonomi seperti penandatanganan ECFA akan efektif untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan Cina terhadap Taiwan yakni reunifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Baldwin, David. *Economic Statecraft*. New Jersey : Princeton University Press, 1985.
- Chelan Li, Linda (ed.). *The Chinese state in transition: Processes and Contests in Local China*. UK: Routledge, 2009.
- Cini, Michael. *The European Union politics*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Copper, John F. *Taiwan's 2008 Presidential and Vice Presidential Election: Maturing Democracy*. Baltimore: University of Maryland School of Law, 2008.
- Copper, John Franklin. *Words Across the Taiwan Strait : a Critique of Beijing's "White Paper"*. USA : East Asia Research Institute, 1995.
- Coulombus, Theodore dan James Wolfe. *Introduction to International Relations*. New Jersey : Prentice Hall, 1986.
- Gilpin, Robert. *Global Political Economy*. New Jersey : Princeton University Press, 2001.
- Gilpin, Robert. *The Political Economy of International Relations*. New Jersey : Princeton University Press, 1987.
- Hua, Shiping (ed.). *Reflection on Triangular Relations of Beijing – Taipei – Washington since 1995*. New York : Palgrave Macmillan, 2005.
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, 2006.
- Lasater, Martin L. *The Changing of the Guard: President Clinton and the Security of Taiwan*. Boulder, CO: Westview Press, 1995.
- Neuman, Lawrence. *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Inc., 2004.

Papp, Daniel S. *Contemporary International Relations : Framework for Understanding*, (Madison, USA : Allyn dan Bacon, 1997).

Rossenau, James N., Kenneth Waltz dan Gavin Boyd (ed.). *World Politics*. New York : Free Press, 1973.

Sutter, Robert G *Chinese Foreign Relations: Power and Policy since the Cold War*. Lanham,

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. New York: Macmillan Publishing Company, 1993.

ARTKEL JURNAL

Chao, Chien-Min. “Will Economic Integration Between Mainland China and Taiwan Lead to a Congenial Political Culture?”. *Asian Survey*, Vol. 43, No. 2 (Maret/April 2003) : 280-304.

Chen, Ching-Chang. “Understanding the Political Economy of Cross-Strait Security: A Missing Link”. *Journal of Chinese Political Science* No. 15, (September 2010) : 391 - 412.

Helleiner, Eric. “Economic Nationalism as a Challenge to Economic Realism”. *International Studies Quarterly*, Vol. 46 (2002) : 307 – 329.

Hsiung, James C. “The Age of Geoeconomics, Cina’s Global Role, and Prospects of Cross-Strait Integration”. *Journal of Chinese Political Science* No. 14, (Maret 2009) : 113 – 133.

Kahler, Miles dan Scott L. Kastner, ”Strategic Uses Of Economic Interdependence: Engagement Policies in South Korea, Singapore, and Taiwan”. *Journal of Peace Research*, Vol. 43 No. 5 (2006) : 523 – 541.

Kastner, Scott L. “When Do Conflicting Political Relations Affect International Trade?”. *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 51, No. 4 (Agustus 2007) : 664-688.

Kennedy, Andrew Bingham. “China's Perceptions of U.S. Intentions toward Taiwan: How Hostile a Hegemon?”. *Asian Survey*, Vol. 47, No. 2 (Maret/April 2007) : 268-287.

Shulman, S. “National Sources of International Economic Integration”. *International Studies Quarterly*, Vol.44 (2000: 365 – 390).

Sutter, Karen M. "Business Dynamism Across The Taiwan Strait : The Implications for Cross-Strait Relations". *Asian Survey*, Vol. 42, No. 3 (2002) : 522 – 540.

ARTIKEL ILMIAH LAINNYA

Armstrong, Shiro. "Taiwan's Asia Pacific Economic Strategies Post-Economic Cooperation Framework Agreement". *EABER Working Paper Series Paper No. 63* (Agustus 2010).

Barfield, Claude. "US Trade Policy : The Emergence of Regional and Bilateral Alternatives to Multilateralism". *Competing Regionalism – Patterns, Economic Impact and Implications for the Multilateral Trading System*, Intereconomics Forum, September/Oktober 2007.

Copper, John F. "The China-Taiwan Economic Cooperation Framework Agreement: Politics, Not Just Economics". *EAI Background Brief No. 548*, 6 Agustus 2010.

Hong, Zhao dan Sarah Y. Tong. "Taiwan-Mainland Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) : Implications for Cross-Strait Relations". *EAI Background Brief No. 452*. 2009.

Rosen, Daniel H. dan Zhi Wang. "Deepening Cina-Taiwan Relations through the Economic Cooperation Framework Agreement". *Policy Brief Number PB 10 – 16*, Peterson Institute for International Economics. 2010.

DOKUMEN RESMI PEMERINTAH

China Communist Party, "Message to Compatriots in Taiwan", diakses dari <http://www.china.org.cn/english/7943.htm>.

Mainland Affairs Council The Executive Yuan Republic of China, "Relations Across the Taiwan Straits", Juli 1994.

Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), "Foreign Missions in the ROC (Taiwan)", diakses dari <http://www.mofa.gov.tw/webapp/lp.asp?ctNode=1868&CtUnit=30&BaseDSD=30&mp=6>.

Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), “Intergovernmental Organizations (IGOs) in which we participate”, diakses dari <http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem=51335&CtNode=2254&mp=6>.

Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), “List of Embassies & Missions Abroad”, diakses dari <http://www.mofa.gov.tw/webapp/lp.asp?ctnode=1864&ctunit=30&basedsd=30&mp=6>.

Pidato Hu Jintao dalam Peringatan 90 Tahun Partai Komunis Cina, dapat diakses melalui http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-07/01/c_13960505.htm.

Taiwan Affairs Office and Information Office State Council The People’s Republic of China, “The Taiwan Question and the Reunification of China”, Beijing, Agustus 1993.

White Book : China’s Peaceful Development dapat diakses melalui http://www.gov.cn/english/official/2011-09/06/content_1941354.htm.

ARTIKEL SURAT KABAR DAN MAJALAH

“Live : Premier Wen Gives Online Interview”. *Xinhua*, 27 Februari 2010.

“Mainland, Taiwan Ready to Sign ECFA”. *Xinhua*, 29 Juni 2010.

“Taiwan-China trade No such thing as a free trade”. *The Economist*, Juni 2010.

“Taiwan-mainland ECFA Formally Takes Effect”, *The China Post*, 12 September 2010.

“WIKILEAKS : China Using ECFA to Push Unification”, *Taipei Times*, 9 September 2011.

Cole, J. Michael. “China lobbying provokes freeze on US arms sales”. *Taipei Times*, 30 Juni 2010.

Xu, Xinpeng. “A deal that will shape Taiwan’s economic future in Asia”. *East Asia Forum*, 4 Agustus 2010.

MAKALAH DAN SKRIPSI

Damayanti, Lestari Aysha. *Kepentingan Cina dalam Penandatanganan Bilateral Currency Swap Agreement Cina – Indonesia Tahun 2009*. Skripsi. Depok : Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, 2010.

George Lin, Y.C. “The Background and Impacts of ECFA on China and Taiwan”. Makalah dipresentasikan di National Chung Cheng University, Taiwan pada 19 Maret 2011.

Leng, Tse – Kang. “Dynamics of Taiwan-Mainland China Economic Relations: the Role of Private Firms”. Makalah dipresentasikan di Woodrow Wilson Center for International Scholars, Washington D.C. pada 10 September 1997.

O’ Farill, dkk., Enrique “Economic Cooperation”. Makalah. AGCI Task Force, Desember 1999.

Sari, Dyana Novita. *Economic statecraft Cina dalam pembentukan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*. Skripsi. Depok : Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, 2010.

Wahyunnisa, Rinnay Nitrabening. *Kepentingan Cina dalam Kesepakatan Kemitraan Strategis dengan Indonesia tahun 2005*. Skripsi. Depok : Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, 2009.

INTERNET

“All Cross Straits Issues Can Be Discussed Under One China Principle”, diakses dari <http://www.china.org.cn/english/48450.htm> pada 19 Desember 2010 pukul 20.30 WIB.

“ECFA Makes Taiwan a New Gateway to China” diakses dari http://jonesday.com/ecfa_makes_taiwan/.

“ECFA signing scheduled for June 29” diakses dari http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=1299089&lang=eng_news&cate_img=83.jpg&cate_rss=news_Politics_TAIWAN”.

Ariana, Eunjung Cha. “*Taiwan, China Negotiating a Landmark Free-Trade Agreement*” diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/20/AR2009022003388.html>

- Chakrabarti, Shantanu. "The Chinese White Paper on 'Peaceful Development': Worth a Second Glance?", diakses dari <http://www.caluniv.ac.in/ifps/Shantanu.pdf>.
- Chen, Chien-Kai. "China and Taiwan: A Future of Peace? A Study Of Economic Interdependence, Taiwanese Domestic Politics and Cross-Strait Relations" diakses dari Http://www.du.edu/Korbel/Jais/Journal/Volume1/Volume1_Chen.Pdf.
- Chi, Su. "The history of the "One China with varying definitions" Consensus" diakses dari <http://old.npf.org.tw/PUBLICATION/NS/091/NS-B-091-023.htm>.
- Gao, Henry. "Cina's Strategy for Free Trade Agreements : Political Battle in the Name of Trade", diakses dari http://www.ideaswebsite.org/ideasact/dec09/pdf/Henry_Gao.pdf.
- Hong, Tsai-Lung. "ECFA: A Pending Trade Agreement ? Also a Comparison to CEPA", diakses dari http://www.apeaweb.org/confer/bus11/papers/Hong_h.pdf.
- Kan, Shirley A. "China/Taiwan: Evolution of the "One China" Policy—Key Statements from Washington, Beijing, and Taipei" diakses dari <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30341.pdf>.
- Kementrian Perdagangan Republik Rakyat Cina, "ECFA Makes a Good Start to Implement Early Harvest", diakses dari <http://tga.mofcom.gov.cn/aarticle/e/201105/20110507569468.html>.
- Mainland Affairs Council, "Economic Cooperation Framework Agreement Background", diakses dari www.mac.gov.tw/public/data/051116322071.pdf.
- Pan, Esther. and Youkyung Lee, "China-Taiwan Relations" diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/15/AR2008011501347.html>.
- Peterson Institute for International Economics, "China – Taiwan Economic Relations" diakses dari http://www.piie.com/publications/chapters_preview/5010/01ie5010.pdf.
- Romberg, Alan D. "Cross-Strait Relations: First the East, Now the Hard", diakses dari www.hoover.org/publications/china-leadership-monitor/article/5595 pada 20 Desember 2011 pukul 21.30 WIB.

Shear, David B. “China-Taiwan: Recent Economic, Political and Military Developments Across the Strait and Implications for the United States,” diakses dari www.state.gov/p/eap/rls/rm/2010/03/138547.htm.

U.S. Department of State, “Overview of U.S. Policy Towards Taiwan” diakses dari <http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2004/31649.htm>

Winkler, Sigrid. “Biding Time: The Challenge of Taiwan’s International Status”, diakses dari http://www.brookings.edu/papers/2011/1117_taiwan_international_status_winkler.aspx.

http://itemsweb.esade.edu/research/esadegeo/DIALOGUE%20CHINA%20TAIWAN_GINE_E.pdf.

<http://www.icrier.org/pdf/Session%20IV-Kristy%20Hsu-Presentation.pdf>.

<https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/tw.html>

<http://www.winklerpartners.com/a/comment/taiwanese-investment-in-china.php>



LAMPIRAN :
NASKAH PERJANJIAN *CROSS STRAIT ECONOMIC COOPERATION FRAMEWORK*
***AGREEMENT* CINA – TAIWAN (DALAM BAHASA INGGRIS)**

[This translation is for reference only. The interpretation of the Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement shall be based solely on the authentic copy in the Chinese language.]

Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement

Preamble

The Straits Exchange Foundation and the Association for Relations Across the Taiwan Straits, adhering to the principles of equality, reciprocity and progressiveness and with a view to strengthening cross-Straits trade and economic relations,

Have agreed, in line with the basic principles of the World Trade Organization (WTO) and in consideration of the economic conditions of the two Parties, to gradually reduce or eliminate barriers to trade and investment for each other, create a fair trade and investment environment, further advance cross-Straits trade and investment relations by signing the *Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement* (hereinafter referred to as this Agreement), and establish a cooperation mechanism beneficial to economic prosperity and development across the Straits.

The two Parties have agreed through consultations to the following:

Chapter 1 General Principles

Article 1 Objectives

The objectives of this Agreement are:

1. To strengthen and advance the economic, trade and investment cooperation between the two Parties;
2. To promote further liberalization of trade in goods and services between the two Parties and gradually establish fair, transparent and facilitative investment and investment protection mechanisms;
3. To expand areas of economic cooperation and establish a cooperation mechanism.

Article 2 Cooperation Measures

The two Parties have agreed, in consideration of their economic conditions, to take measures including but not limited to the following, in order to strengthen cross-Straits economic exchange and cooperation:

1. Gradually reducing or eliminating tariff and non-tariff barriers to trade in a substantial majority of goods between the two Parties;

2. Gradually reducing or eliminating restrictions on a large number of sectors in trade in services between the two Parties;
3. Providing investment protection and promoting two-way investment;
4. Promoting trade and investment facilitation and industry exchanges and cooperation.

Chapter 2 Trade and Investment

Article 3 Trade in Goods

1. The two Parties have agreed, on the basis of the Early Harvest for Trade in Goods as stipulated in Article 7 of this Agreement, to conduct consultations on an agreement on trade in goods no later than six months after the entry into force of this Agreement, and expeditiously conclude such consultations.
2. The consultations on the agreement on trade in goods shall include, but not be limited to:
 - (1) modalities for tariff reduction or elimination;
 - (2) rules of origin;
 - (3) customs procedures;
 - (4) non-tariff measures, including but not limited to technical barriers to trade (TBT) and sanitary and phytosanitary (SPS) measures;
 - (5) trade remedy measures, including measures set forth in the *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, the *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* and the *Agreement on Safeguards* of the World Trade Organization, and the safeguard measures between the two Parties applicable to the trade in goods between the two Parties.
3. Goods included in the agreement on trade in goods pursuant to this Article shall be divided into three categories: goods subject to immediate tariff elimination, goods subject to phased tariff reduction, and exceptions or others.
4. Either Party may accelerate the implementation of tariff reduction at its discretion on the basis of the commitments to tariff concessions in the agreement on trade in goods.

Article 4 Trade in Services

1. The two Parties have agreed, on the basis of the Early Harvest for Trade in Services as stipulated in Article 8, to conduct consultations on an agreement on trade in services no later than six months after the entry into force of this Agreement, and expeditiously conclude such consultations.
2. The consultations on the agreement on trade in services shall seek to:

- (1) gradually reduce or eliminate restrictions on a large number of sectors in trade in services between the two Parties;
 - (2) further increase the breadth and depth of trade in services;
 - (3) enhance cooperation in trade in services between the two Parties.
3. Either Party may accelerate the liberalization or elimination of restrictive measures at its discretion on the basis of the commitments to liberalization in the agreement on trade in services.

Article 5 Investment

1. The two Parties have agreed to conduct consultations on the matters referred to in paragraph 2 of this Article within six months after the entry into force of this Agreement, and expeditiously reach an agreement.
2. Such an agreement shall include, but not be limited to, the following:
 - (1) establishing an investment protection mechanism;
 - (2) increasing transparency on investment-related regulations;
 - (3) gradually reducing restrictions on mutual investments between the two Parties;
 - (4) promoting investment facilitation.

Chapter 3 Economic Cooperation

Article 6 Economic Cooperation

1. To enhance and expand the benefits of this Agreement, the two Parties have agreed to strengthen cooperation in areas including, but not limited to, the following:
 - (1) intellectual property rights protection and cooperation;
 - (2) financial cooperation;
 - (3) trade promotion and facilitation;
 - (4) customs cooperation;
 - (5) e-commerce cooperation;
 - (6) discussion on the overall arrangements and key areas for industrial cooperation, promotion of cooperation in major projects, and coordination of the resolution of issues that may arise in the course of industrial cooperation between the two Parties;
 - (7) promotion of small and medium-sized enterprises cooperation between the two Parties, and enhancement of the competitiveness of these enterprises;
 - (8) promotion of the mutual establishment of offices by economic and trade bodies of the two Parties.
2. The two Parties shall expeditiously conduct consultations on the specific programs and contents of the cooperation matters listed in this Article.

Chapter 4 Early Harvest

Article 7 Early Harvest for Trade in Goods

1. To accelerate the realization of the objectives of this Agreement, the two Parties have agreed to implement the Early Harvest Program with respect to the goods listed in Annex I. The Early Harvest Program shall start to be implemented within six months after the entry into force of this Agreement.
2. The Early Harvest Program for trade in goods shall be implemented in accordance with the following rules:
 - (1) the two Parties shall implement the tariff reductions in accordance with the product list and tariff reduction arrangements under the Early Harvest stipulated in Annex I, unless their respective non-interim tariff rates generally applied on imports from all other WTO members are lower, in which case such rates shall apply;
 - (2) the products listed in Annex I of this Agreement shall be subject to the Provisional Rules of Origin stipulated in Annex II. Each Party shall accord preferential tariff treatment to the above-mentioned products that are determined, pursuant to such Rules, as originating in the other Party upon importation;
 - (3) the provisional trade remedy measures applicable to the products listed in Annex I of this Agreement refer to measures provided for in subparagraph (5) of paragraph 2 of Article 3 of this Agreement. The safeguard measures between the two Parties are specified in Annex III of this Agreement.
3. As of the date of the entry into force of the agreement on trade in goods to be reached by the two Parties pursuant to Article 3 of this Agreement, the Provisional Rules of Origin stipulated in Annex II and the provisional trade remedy measures provided for in subparagraph (3) of paragraph 2 of this Article shall cease to apply.

Article 8 Early Harvest for Trade in Services

1. To accelerate the realization of the objectives of this Agreement, the two Parties have agreed to implement the Early Harvest Program on the sectors and liberalization measures listed in Annex IV. The Early Harvest Program shall be implemented expeditiously after the entry into force of this Agreement.
2. The Early Harvest Program for Trade in Services shall be implemented in accordance with the following rules:
 - (1) each Party shall, in accordance with the Sectors and Liberalization Measures Under the Early Harvest for Trade in Services in Annex IV, reduce or eliminate the restrictive measures in force affecting the services and service suppliers of the other Party;

- (2) the definition of service suppliers stipulated in Annex V applies to the sectors and liberalization measures with respect to trade in services in Annex IV of this Agreement;
- (3) as of the date of the entry into force of the agreement on trade in services to be reached by the two Parties pursuant to Article 4 of this Agreement, the definitions of service suppliers stipulated in Annex V of this Agreement shall cease to apply;
- (4) in the event that the implementation of the Early Harvest Program for Trade in Services has caused a material adverse impact on the services sectors of one Party, the affected Party may request consultations with the other Party to seek a solution.

Chapter 5 Other Provisions

Article 9 Exceptions

No provision in this Agreement shall be interpreted to prevent either Party from adopting or maintaining exception measures consistent with the rules of the World Trade Organization.

Article 10 Dispute Settlement

1. The two Parties shall engage in consultations on the establishment of appropriate dispute settlement procedures no later than six months after the entry into force of this Agreement, and expeditiously reach an agreement in order to settle any dispute arising from the interpretation, implementation and application of this Agreement.
2. Any dispute over the interpretation, implementation and application of this Agreement prior to the date the dispute settlement agreement mentioned in paragraph 1 of this Article enters into force shall be resolved through consultations by the two Parties or in an appropriate manner by the Cross-Straits Economic Cooperation Committee to be established in accordance with Article 11 of this Agreement.

Article 11 Institutional Arrangements

1. The two Parties shall establish a Cross-Straits Economic Cooperation Committee (hereinafter referred to as the Committee), which consists of representatives designated by the two Parties. The Committee shall be responsible for handling matters relating to this Agreement, including but not limited to:
 - (1) concluding consultations necessary for the attainment of the objectives of this Agreement;
 - (2) monitoring and evaluating the implementation of this Agreement;

- (3) interpreting the provisions of this Agreement;
 - (4) notifying important economic and trade information;
 - (5) settling any dispute over the interpretation, implementation and application of this Agreement in accordance with Article 10 of this Agreement.
2. The Committee may set up working group(s) as needed to handle matters in specific areas pertaining to this Agreement, under the supervision of the Committee.
 3. The Committee will convene a regular meeting on a semi-annual basis and may call *ad hoc* meeting(s) when necessary with consent of the two Parties.
 4. Matters related to this Agreement shall be communicated through contact persons designated by the competent authorities of the two Parties.

Article 12 Documentation Formats

The two Parties shall use the agreed documentation formats for communication of matters arising from this Agreement.

Article 13 Annexes and Subsequent Agreements

All annexes to this Agreement and subsequent agreements signed in accordance with this Agreement shall be parts of this Agreement.

Article 14 Amendments

Amendments to this Agreement shall be subject to consent through consultations between, and confirmation in writing by, the two Parties.

Article 15 Entry into Force

After the signing of this Agreement, the two Parties shall complete the relevant procedures respectively and notify each other in writing. This Agreement shall enter into force as of the day following the date that both Parties have received such notification from each other.

Article 16 Termination

1. The Party terminating this Agreement shall notify the other Party in writing. The two Parties shall start consultations within 30 days from the date the termination notice is issued. In case the consultations fail to reach a consensus, this Agreement shall be terminated on the 180th day from the date the termination notice is issued by the notifying Party.
2. Within 30 days from the date of termination of this Agreement, the two Parties shall engage in consultations on issues arising from the termination.

This Agreement is signed in quadruplicate on this 29th day of June [2010] with each Party retaining two copies. The different wording of the corresponding text of this Agreement shall carry the same meaning, and all four copies are equally authentic.

Annex I: Product List and Tariff Reduction Arrangements Under the Early Harvest for Trade in Goods

Annex II: Provisional Rules of Origin Applicable to Products Under the Early Harvest for Trade in Goods

Annex III: Safeguard Measures Between the Two Parties Applicable to Products Under the Early Harvest for Trade in Goods

Annex IV: Sectors and Liberalization Measures Under the Early Harvest for Trade in Services

Annex V: Definitions of Service Suppliers Applicable to Sectors and Liberalization Measures Under the Early Harvest for Trade in Services

Chairman
Straits Exchange Foundation

President
Association for Relations
Across the Taiwan Straits

Annex I

Product List and Tariff Reduction Arrangements Under the Early Harvest for Trade in Goods

Product List Under the Early Harvest on the Taiwan Side

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
1	27079100	Creosote oils	1.0
2	27101941	Fuel oil, at 15 degrees C, over 0.93 specific gravity	5.0
3	27111990	Other liquefied gases hydrocarbons	5.0
4	27131200	Petroleum coke, calcined	1.0
5	28030010	Carbon black	2.5
6	28121010	Phosphorus trichloride	5.0
7	28151200	Sodium hydroxide, in aqueous solution (soda lye or liquid soda)	2.5
8	28161010	Magnesium hydroxide	5.0
9	28230090	Other titanium oxides	2.0
10	28258000	Antimony oxides	2.5
11	28273990	Other metal chlorides (sodium chloride classified in heading 2501)	3.4
12	28332400	Sulphates of nickel	2.7
13	28352500	Calcium hydrogenorthophosphate (dicalcium phosphate)	5.0
14	28362010	Soda crystal (washing soda)	5.5
15	28362090	Disodium carbonate	3.5
16	28419090	Other salts of oxometallic or peroxometallic acids	5.0
17	29033990	Other fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons	5.0
18	29034900	Other halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens	5.5
19	29055990	Other halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols	2.5
20	29094999	Other ether alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	5.0
21	29103000	1-Chloro-2, 3-epoxypropane (epichlorohydrin)	1.0
22	29124990	Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes with other oxygen function	2.5
23	29145000	Ketone-phenols and ketones with other oxygen function	2.5

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
24	29151100	Formic acid	2.5
25	29152100	Acetic acid	1.0
26	29153100	Ethyl acetate	2.5
27	29153900	Other esters of acetic acid	2.5
28	29159090	Other saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	4.0
29	29161200	Esters of acrylic acid	2.5
30	29161410	Methyl methacrylate	2.5
31	29163990	Other aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives	5.0
32	29181400	Citric acid	3.5
33	29182900	Other carboxylic acids with phenol function but without etheroxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives	5.0
34	29209049	Other phosphorous ester and their salts, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	5.0
35	29211900	other acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof	1.0
36	29214200	Aniline derivatives and their salts	2.5
37	29215990	Other aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof	5.0
38	29222100	Aminohydroxynaphthalene-sulphonic acids and their salts	5.0
39	29224990	Other amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters; salts thereof	5.0
40	29239000	Other quaternary ammonium salts and hydroxides	5.0
41	29241910	Dimethyl formamide (D.M.F.)	2.5
42	29242990	Other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof	5.0
43	29270010	Azobisformamide	5.0
44	29270090	Other diazo-, azo- or azoxy-compounds	5.0
45	29291020	Diphenylmethane diisocyanate	1.2

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
46	29299000	Compounds with other nitrogen function	4.0
47	29309090	Other organo-sulphur compounds	2.5
48	29310029	Organotin compounds	4.0
49	29321310	Furfuryl alcohol	2.5
50	29321320	Tetrahydrofurfuryl alcohol	5.0
51	29321990	Other compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure	5.0
52	29322900	Other lactones	5.0
53	29329900	Other heterocyclic compound with oxygen hetero-atom(s) only	5.0
54	29333990	Other compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure	5.0
55	29336990	Other compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure	5.0
56	29339990	Other heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only	5.0
57	32041120	Preparations based on disperse dyes	5.0
58	32041210	Acid dyes, whether or not premetallised	5.0
59	32041220	Preparations based on acid dyes	5.0
60	32041230	Mordant dyes	5.0
61	32041240	Preparations based on mordant dyes	5.0
62	32041711	Organic fluorescent pigments	5.0
63	32041719	Other synthetic organic pigments	5.0
64	32041720	Preparations based on synthetic organic pigments	5.0
65	32042000	Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents	5.0
66	32061100	Pigments and preparations, containing 80% or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight	2.0
67	32061900	Other pigments and preparations based on titanium dioxide	2.0
68	32141090	Other glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' filling	5.0
69	33073000	Perfumed bath salts and other bath preparations	5.0
70	33074100	Agarbatti and other odoriferous preparations which operate by burning	5.0

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
71	33074900	Other preparations for perfuming or deodorising rooms, including odoriferous preparations used during religious rites	5.0
72	33079090	Depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included, whether or not perfumed or having disinfectant properties	5.0
73	34021300	Non-ionic organic surface-active agents	4.0
74	34022000	Surface-active preparations, washing preparations and cleaning preparations, put up for retail sale	4.0
75	35061000	products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg	6.5
76	35069110	Hot melt adhesives	6.5
77	35069190	Other adhesives based on polymers of headings 39.01 to 39.13 or on rubber	6.5
78	35069900	Other prepared glues and adhesives	6.5
79	37079030	Toners, for photographic uses	3.5
80	38021000	Activated carbon	6.5
81	38061000	Rosin and resin acids	1.2
82	38069090	Other derivatives of rosin and resin acids	1.2
83	38121000	Prepared rubber accelerators	5.0
84	38123020	Other compound stabilisers for rubber or plastics	5.0
85	38151900	Other supported catalysts	1.0
86	38159019	Other catalytics	1.0
87	38160000	Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 38.01	2.5
88	38243000	Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders	5.0
89	38249099	Other chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural mixed products), not elsewhere specified or included	5.0
90	39029090	Other polymers of other olefins, in primary forms	2.5
91	39039090	Other polymers of styrene, in primary forms	2.5
92	39061010	Polymethyl methacrylate granules, in primary forms	2.5
93	39069010	Other acrylic polymers granules, in primary forms	1.0

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
94	39069090	Other acrylic polymers emulsion, in primary forms	4.0
95	39074000	Polycarbonates, in primary forms	2.5
96	39075000	Alkyd resins, in primary form	5.0
97	39079100	Other polyesters, unsaturated, in primary forms	2.5
98	39091000	Urea resins or thiourea resins, in primary forms	5.0
99	39092000	Melamine resins, in primary forms	5.0
100	39093090	Other amino resins, in primary forms	5.0
101	39094000	Phenolic resins, in primary forms	5.0
102	39095000	Polyurethanes, in primary forms	2.5
103	39100030	Silicone resin	4.0
104	39100040	Silicone rubber	4.0
105	39111010	Petroleum resins	5.0
106	40111000	New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)	10.0
107	40112000	New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on buses or lorries	10.0
108	40115000	New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on bicycles	5.0
109	52054800	Cotton yarn, multiple (folded) or cabled, of combed fibres, measuring per single yarn less than 83.33 decitex(exceeding 120 metric number per single yarn)	4.0
110	52081300	Woven fabrics of cotton, 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/square meter, unbleached	7.5
111	52083200	Woven fabrics of cotton, plain weave, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 100 g/square meter but not more than 200 g/square meter, dyed	10.0
112	52083900	Other woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/square meter, dyed	10.0
113	54021900	Other high tenacity filament yarn of nylon or polyamides, not put up for retail sale	1.5
114	54022000	High tenacity filament yarn of polyesters, not put up for retail sale	1.5

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
115	54024900	Other synthetic filament yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre, not put up for retail sale	1.5
116	55039090	Other synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning	1.5
117	55081000	Sewing thread of synthetic staple fibres, whether or not put up for retail sale	4.0
118	55092200	Multiple (folded) or cabled yarn, containing 85% or more by weight of polyester staple fibres, not put up for retail sale	4.0
119	56031290	Other nonwoven fabrics, whether or not impregnated, coated, covered or laminated	5.0
120	56031390	Other nonwoven fabrics, whether or not impregnated, coated, covered or laminated	5.0
121	56039290	Other nonwoven fabrics, whether or not impregnated, coated, covered or laminated	5.0
122	56039490	Other nonwoven fabrics, whether or not impregnated, coated, covered or laminated	5.0
123	58012300	Other weft pile fabrics, of cotton	10.0
124	59021000	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides	5.0
125	59031010	PVC synthetic leather	5.0
126	59031020	Other fabrics of cotton, impregnated, coated, covered or laminated with polyvinyl chloride, other than those of heading 59.02	8.0
127	59032010	PU synthetic leather	5.0
128	59069990	Other rubberised textile fabrics, of other textile materials	10.0
129	60041010	Knitted or crocheted fabrics, of a width exceeding 30cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn but not containing rubber thread, of silk, other than those of heading 60.01	10.0
130	70139100	Other glassware of lead crystal	6.5
131	70140011	Reflective glass for road marking lines and road signs	10.0
132	70140019	Other signalling glassware, not optically worked	10.0
133	70171090	Other laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated, of fused quartz or	5.0

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
		other fused silica	
134	74111000	Refined copper tubes and pipes	3.0
135	78041900	Lead plates and other lead sheets, strip and foil	1.2
136	82072020	Dies for extruding metal	4.0
137	82073010	Punches and dies for cold pressing and stamping of sheet metal; drop forging dies	10.0
138	82073090	Other interchangeable tools for pressing, stamping or punching	5.0
139	82075010	Interchangeable tools for drilling, hand tools use	4.0
140	82075020	Interchangeable tools for drilling, machines use	5.0
141	82079010	Other interchangeable tools, hand tools use	4.0
142	82089090	Other knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances	5.0
143	84122110	Hydraulic cylinders	5.0
144	84123110	Pneumatic cylinders	5.0
145	84138190	Other pumps for liquids	3.0
146	84139100	Parts of pumps for liquids	3.0
147	84141000	Vacuum pumps	3.0
148	84143010	Compressors, output 600 W and over, but less than 2,000 W, of a kind used in refrigerating equipment	5.0
149	84143020	Other compressors of a kind used in refrigerating equipment	5.0
150	84145900	Other fans	4.7
151	84148011	Centrifugal air compressors	2.5
152	84148019	Other compressors	4.0
153	84148020	Blowers	4.0
154	84148090	Other articles of heading 84.14	4.0
155	84149010	Parts of air pumps and vacuum pumps	3.0
156	84149020	Parts of compressors	3.4
157	84149030	Parts of fans and blowers	3.4
158	84149090	Other parts of articles of heading 84.14	4.0
159	84159000	Parts of air conditioning machines	1.5
160	84178090	Other industrial or laboratory furnaces and ovens, non-electric	4.0
161	84193200	Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard	4.0

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
162	84193900	Other dryers	4.0
163	84195000	Heat exchange units	3.0
164	84212190	Other filtering or purifying machinery and apparatus for water	4.0
165	84212900	Other filtering or purifying machinery and apparatus for liquids	3.0
166	84213990	Other filtering or purifying machinery and apparatus for gases	4.0
167	84219990	Other parts of filtering or purifying machinery and apparatus for liquids or gases	3.0
168	84243000	Steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines	4.0
169	84388000	Other machinery of heading 84.38	4.0
170	84392000	Machinery for making paper or paperboard	4.0
171	84411000	Paper cutting machines	3.0
172	84418090	Other machinery of heading 84.41	4.0
173	84431990	Other printing machines	3.0
174	84440000	Machines for extruding drawing, texturing or cutting man-made textile materials	3.0
175	84471100	Circular knitting machines, with cylinder diameter not exceeding 165 mm	3.0
176	84471200	Circular knitting machines, with cylinder diameter exceeding 165 mm	3.0
177	84472000	Flat knitting machines; stitch-bonding machines	3.0
178	84485900	Other parts and accessories of machines of heading 84.47 or of their auxiliary machinery	2.5
179	84514000	Washing, bleaching or dyeing machines	3.0
180	84515090	Other machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics	4.0
181	84518090	Other machinery of heading 84.51	4.0
182	84522110	Over-lock sewing machines (cock sewing machines)	2.0
183	84529000	Other parts of sewing machines	2.5
184	84729090	Other office machines of heading 84.72	3.5
185	84772090	Other extruders	3.0
186	84774000	Vacuum moulding machines and other thermoforming machines	3.0

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
187	84775900	Other machinery for moulding or otherwise forming	3.0
188	84778000	Other machinery of heading 84.77	3.0
189	84779000	Other parts of machinery of heading 84.77	2.5
190	84798100	Machinery for treating metal, including electric wire coil-winders	3.0
191	84798200	Mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, homogenising, emulsifying or stirring machines	2.5
192	84798990	Other machinery of heading 84.79	4.0
193	84799090	Other parts of machinery of heading 84.79	2.5
194	84804100	Injection or compression moulds for metal or metal carbides	4.0
195	84807900	Other moulds for rubber or plastics	2.5
196	84812000	Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions	3.0
197	84813000	Check (nonreturn) valves	3.0
198	84814000	Safety or relief valves	3.0
199	84818020	Fire-hydrants and fire-sprinkler heads	2.5
200	84819020	Parts of fire-hydrants	2.5
201	84819090	Other parts of articles of heading 84.81	5.0
202	84824090	Other needle roller bearings	10.0
203	84829910	Steel race for bearings (unfinished)	2.5
204	84829920	Holder for bearings	2.5
205	84829990	Parts of other ball or roller bearings	2.5
206	84834090	Other articles of subheading 8483.40	5.0
207	84839090	Other toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately ; and parts for articles of heading 84.83	5.0
208	84841000	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal	5.0
209	85011010	Explosion proof motors, of an output not exceeding 37.5 W	5.0
210	85011090	Other motors of an output not exceeding 37.5 W	5.0
211	85030090	Other parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 85.01 or 85.02	1.0
212	85044091	Other power supply, exchangeable type	5.0
213	85049000	Parts of the articles of heading 85.04	1.7

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
214	85051100	Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation, of metal	2.5
215	85051900	Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation, of other material	1.7
216	85061021	Manganese dioxide dry cells (neutral), of an external volume not exceeding 300 cm ³	7.5
217	85061090	Other manganese dioxide primary cells and primary batteries	2.5
218	85078000	Other accumulators	2.5
219	85129010	Parts of lighting or visual signaling equipment of a kind used on bicycles	5.0
220	85181090	Other line microphones and stands therefor	7.5
221	85184090	Other audio-frequency electric amplifiers	10.0
222	85189090	Other parts of articles of heading 8518	1.0
223	85258010	Television cameras	5.0
224	85285910	Other colour non-cathode-ray tube monitors	10.0
225	85361000	Fuses, for a voltage not exceeding 1,000 V	6.0
226	85371010	Electronics control devices (including digital controllers, programmed controllers, microprocessors and other similar control devices) exclusively for use with machineries, for a voltage not exceeding 1,000 V	1.0
227	85392100	Tungsten halogen lamps	5.0
228	85393920	Cool cathode lamp	1.0
229	85393990	Other discharge lamps	5.0
230	85399000	Parts of articles of heading 85.39	1.7
231	87120010	Bicycles	6.0
232	87120090	Other cycles	5.0
233	87149120	Other frames and forks, and parts thereof	5.0
234	87149200	Wheel rims and spokes	5.0
235	87149310	Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes	5.0
236	87149320	Free-wheel sprocket-wheels	5.0
237	87149410	Caliper brake and parts thereof	5.0
238	87149420	Coaster braking hub and parts thereof	5.0
239	87149490	Other brakes and parts thereof	5.0
240	87149500	Saddles of cycles	5.0

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
241	87149610	Pedals and parts thereof	5.0
242	87149620	Crank-gear and parts thereof	5.0
243	87149910	Parts for side cars	5.0
244	87149920	Reflective sheets and bands, suitable for vehicles use	5.0
245	87149990	Other parts and accessories of vehicles of headings 87.11 to 87.13	5.0
246	87150000	Baby carriages and parts thereof	5.0
247	90015000	Spectacle lenses of other materials	3.0
248	90019090	Other optical elements, unmounted	5.0
249	90021100	Objective lenses, for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers	5.0
250	90021900	Other objective lenses	3.4
251	90029032	Lenses, additional mounted, for television or cinematographic cameras or projectors	3.4
252	90029090	Other optical elements, mounted	5.0
253	90292090	Other articles of subheading 9029.20	7.5
254	90330090	Other parts and accessories (not specified or included elsewhere in this Chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90	1.7
255	91021100	Wrist-watches, electrically operated, with mechanical display only, other than those of heading 91.01	5.0
256	94051000	Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, excluding those of a kind used for lighting public open spaces or thoroughfares	3.4
257	94059900	Parts of other materials, articles of heading 94.05	3.4
258	95063900	Other golf equipment	5.0
259	95066990	Other balls	3.3
260	95069100	Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or athletics	3.0
261	95089000	Other roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements; travelling theatres	5.0
262	96032100	Tooth brushes, including dental-plate brushes	5.0
263	96039090	Other brooms, brushes, hand-operated mechanical floor sweepers, not motorised, mops and feather dusters; squeegees (other than roller squeegees)	3.3
264	96072000	Parts of slide fasteners	2.5

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods	Import Tariff in 2009 (%)
265	96081000	Ball point pens	3.4
266	96091000	Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath	3.4
267	96170000	Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof other than glass inners	5.0

Note: The descriptions of goods in the table are in their shortened forms. The specific product scope shall follow the corresponding tariff lines of Taiwan's Customs Import Tariff in 2009.

Tariff Reduction Arrangement for Products Under the Early Harvest on the Taiwan Side

	Import Tariff in 2009 (X%)	Agreement Tariff Rate		
		The First Year of Implementing the Early Harvest Program	The Second Year of Implementing the Early Harvest Program	The Third Year of Implementing the Early Harvest Program
1	$0 < X \leq 2.5$	0		
2	$2.5 < X \leq 7.5$	2.5	0	
3	$X > 7.5$	5	2.5	0

Notes:

1. Import tariff in 2009 refers to the non-interim import tariff rate that Taiwan generally applied to other members of the World Trade Organization in 2009.
2. If the Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement enters into force in the first half of the year, the Early Harvest Program shall be implemented on July 1st of the same year; if the Agreement enters into force in the second half of the year, the Early Harvest Program shall be implemented on January 1st of the next year.
3. The Agreement Tariff Rate of the products under the Early Harvest Program shall be reduced to zero by a maximum of three installments in no more than two years after the implementation of the Program. The reduction of tariff rates in the first year shall commence on the date of implementing the Early Harvest Program, and the reductions in the second year and the third year shall commence on January 1st of the respective year.

Product List Under the Early Harvest on the Mainland Side

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
1	03019999	Live fish, nes	10.5
2	03026990	Fresh or chilled fish, nes	12
3	03037990	Frozen fish, nes	10
4	03042990	Other frozen fillets	10
5	04100090	Other edible products of animal origin, nes	20
6	06031300	Fresh orchids	10
7	07095930	Winter mushroom, fresh or chilled	13
8	08030000	Bananas, including plantains, fresh or dried	10
9	08051000	Oranges, fresh or dried	11
10	08055000	Lemons and limes, fresh or dried	11
11	08071910	Hami melons, fresh	12
12	08109080	dragon fruit, fresh	20
13	09021090	Unflavoured green tea in immediate packings ≤3kg	15
14	09022090	Unflavoured green tea in immediate packings > 3kg	15
15	09023010	Oolong tea in immediate packings ≤3kg	15
16	09023090	Other black tea & partly fermented tea nes, in immediate packings ≤3kg	15
17	09024010	Oolong tea in immediate packings > 3kg	15
18	09024090	Other black tea & partly fermented tea nes, in immediate packings > 3kg	15
19	25231000	Cement clinkers, whether or not coloured	8
20	25232100	White cement, whether or not artificially coloured	6
21	25232900	Portland cement (excl. white), whether or not coloured	8
22	27101911	Aviation kerosene	9
23	27101919	Kerosene distillages, nes & preparations thereof	6
24	27101993	Basic oils for lubricating oils	6
25	27101994	Liquid paraffin and heavy liquid paraffin	6
26	28030000	Carbon (carbon blacks and other forms of carbon, not elsewhere specified or included)	5.5
27	29012200	Propene (propylene)	2
28	29012400	Buta-1, 3-diene and isoprene	2
29	29024100	o-Xylene	2
30	29024200	m-Xylene	2
31	29024300	p-Xylene	2
32	29024400	Mixed xylene isomers	2
33	29029030	Dodecylbenzene	2
34	29031300	Chloroform (trichloromethane)	10

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
35	29032100	Vinyl chloride (chloroethylene)	5.5
36	29051220	Propan-2-ol (isopropyl alcohol)	5.5
37	29051300	Butan-1-ol (n-butyl alcohol)	5.5
38	29051410	Iso-butyl alcohol	5.5
39	29094100	2,2'-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol)	5.5
40	29094300	Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol	5.5
41	29103000	1-Chloro-2, 3-epoxypropane (epichlorohydrin)	5.5
42	29152110	Acetic acid, glacial	5.5
43	29153200	Vinyl acetate	5.5
44	29161300	Methacrylic acid and its salts	6.5
45	29161400	Esters of methacrylic acid	6.5
46	29173200	Dioctyl orthophthalates	6.5
47	29173300	Dinonyl or didecyl orthophthalates	6.5
48	29173490	Other esters of orthophthalic	6.5
49	29241910	N,N-dimethylformamide	6.5
50	29291010	Toluene diisocyanate	6.5
51	29321100	Tetrahydrofuran	6
52	29333100	Pyridine and its salts	6
53	32041200	Acid dyes, whether or not premetallized, & preparations based thereon whether or not chemically defined; mordant dyes & preparations based thereon whether or not chemically defined	6.5
54	32041400	Direct dyes & preparations based thereon, whether or not chemically defined	6.5
55	32041600	Reactive dyes & preparations based thereon, whether or not chemically defined	6.5
56	32041700	Pigments & preparations based thereon, whether or not chemically defined	6.5
57	32041990	Synthetic organic colouring matters, incl. mixtures of colouring matter of two or more of the subheadings Nos.3204.11 to 3204.19, whether or not chemically defined	6.5
58	32042000	Synthetic organic products used as fluorescent brightening agents, whether or not chemically defined	6.5
59	32061110	Titanium white	6.5
60	32061900	Pigments & preparations based on titanium dioxide, containing <80% by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight	10
61	32064900	Colouring matter, nes; preparations as specified in Note 3 to chapter 32, other than those of heading 32.03, 32.04 or 32.05, nes	6.5

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
62	32081000	Paints & vanishes based on polyesters, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium	10
63	32082010	Paints & vanishes based on acrylic polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium	10
64	32089090	Paints & varnishes, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium, nes	10
65	32099010	Paints & varnishes based on epoxy resin	10
66	32099090	Other Paints & varnishes	10
67	32100000	Paints and varnishes (incl. enamels, lacquers & distemper), nes; prepared water pigments for leather finishing	10
68	32151900	Printing ink, whether or not concentrated or solid (excl. black)	6.5
69	34021300	Non-ionic surface-active agents, (excl. soap), whether or not put up for retail sale	6.5
70	35061000	Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale, net weight \leq 1kg	10
71	35069110	Adhesives based on polyamide	10
72	35069120	Adhesives based on epoxy resin	10
73	35069190	Adhesives based on rubber or plastic ,nes	10
74	35069900	Prepared glues & other prepared adhesives, nes	10
75	38170000	Mixed alkylbenzenes and mixed alkyl naphthalenes, other than those of heading 27.07 or 29.02	6.5
76	39023010	Ethylene-propylene copolymers, in primary forms, monomer of propylene by weight more than of ethylene	6.5
77	39029000	Polymers of propylene or other olefins, in primary forms, nes	6.5
78	39032000	Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers, in primary forms	12
79	39039000	Polymers of styrene, in primary forms, nes	6.5
80	39052100	Vinyl acetate copolymers, in aqueous dispersion	10
81	39053000	Polyvinyl alcohols, in primary forms, whether or not containing unhydrolyzed acetate groups	14
82	39061000	Polymethyl methacrylate, in primary forms	6.5
83	39069010	Polyacrylamide	6.5
84	39069090	Acrylic polymers, in primary forms, nes	6.5
85	39071010	Polyoxymethylene in primary forms	6.5
86	39072010	Polytetramethylene Ether Glycol	6.5
87	39073000	Epoxide resins, in primary forms	6.5
88	39074000	Polycarbonates, in primary forms	6.5
89	39075000	Alkyd resins, in primary forms	10
90	39079100	Unsaturated polyesters, in primary forms, nes	6.5
91	39079990	Other polyesters in primary forms, other than unsaturated	6.5

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
92	39091000	Urea resins; thiourea resins, in primary forms	6.5
93	39092000	Melamine resins, in primary forms	6.5
94	39093090	Other amino-resins in primary forms other than poly	6.5
95	39094000	Phenolic resins, in primary forms	6.5
96	39095000	Polyurethanes, in primary forms	6.5
97	39100000	Silicones in primary forms	6.5
98	39111000	Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins & polyterpenes in primary forms	6.5
99	39191099	Self-adhesive tape, plates, strip, sheet, film, foil & other flat shapes, of plastics, in rolls, width ≤ 20 cm, nes	6.5
100	39199090	Self-adhesive plates, tape, strip, sheet, film, foil & other flat shapes of plastics, nes	6.5
101	39201090	Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of ethylene, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, non-cellular, others	6.5
102	39202090	Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of propylene, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, non-cellular others	6.5
103	39203000	Plate/foil/strip/sheet/film of polymers of styrene, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, non-cellular	6.5
104	39204300	Plate/foil/strip/sheet/film of PVC, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, non-cellular, containing by weight $\geq 6\%$ of plasticisers	6.5
105	39204900	Plate/foil/strip/sheet/film of PVC, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, non-cellular, containing by weight $< 6\%$ of plasticisers	6.5
106	39205100	Plate/foil/strip/sheet/film of polymethyl methacrylate, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, non-cellular	6.5
107	39206100	Plate/foil/strip/sheet/film of polycarbonates, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, non-cellular	6.5
108	39206200	Plate/foil/strip/sheet/film of polyethylene terephthalate, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, non-cellular	6.5
109	39206900	Plate/foil/strip/sheet/film of other polyesters, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, non-cellular, nes	10

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
110	39209990	Plate/foil/strip/sheet/film of other plastics, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, non-cellular, nes	6.5
111	39211210	Cellular plates, strips, sheet, film of PVC combined with textile fabrics	9
112	39211310	Cellular plates, strips, sheet, film of polyurethanes with textile fabrics	9
113	39211990	Cellular plates, strips, sheet, film of plastics, nes	6.5
114	39219090	Other plates, strips, sheet, film of plastics, nes	6.5
115	39231000	Boxes, cases, crates & similar articles of plastics	10
116	39235000	Stoppers, lids, caps & other closures of plastics	10
117	39239000	Articles for conveyance or packing of goods, of plastics, nes	10
118	39269010	Machine or instruments parts of plastics	10
119	39269090	Articles of plastics, nes	10
120	40029911	Synthetic rubber, in primary forms, nes	7.5
121	40111000	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on motor cars	10
122	40112000	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on buses or lorries	10
123	40114000	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on motorcycles	15
124	40115000	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on bicycles	20
125	40116100	New pneumatic tyres, of rubber, nes, of herring-bone or similar tread, of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines	17.5
126	40116900	New pneumatic tyres, of rubber, of herring-bone or similar tread, nes	17.5
127	40119200	New pneumatic tyres, of rubber, nes, (excl.of herring-bone or similar tread), of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines	25
128	42021210	Trunks and suitcases with outer surface of plastics or textile materials	20
129	42021290	Vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers nes, with outer surface of plastics or of textile materials	20
130	42021900	Trunks, suitcases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers, nes (for example, with outer surface of vulcanized fibre or of paperboard)	20

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
131	42022200	Handbags, whether or not with shoulder strap, incl. those without handle, with outer surface of plastic sheeting or of textile materials	10
132	52051100	Uncombed single cotton yarn, with $\geq 85\%$ cotton, nprs, $\leq 14\text{mn}$, not put up for retail sale	5
133	52051200	Uncombed single cotton yarn, with $\geq 85\%$ cotton, nprs, $>14\text{mn}$ but $\leq 43\text{mn}$, not put up for retail sale	5
134	52061200	Uncombed single cotton yarn, with $<85\%$ cotton, nprs, $>14\text{mn}$ but $\leq 43\text{mn}$, not put up for retail sale	5
135	52062200	Combed single cotton yarn, with $<85\%$ cotton, nprs, $>14\text{mn}$ but $\leq 43\text{mn}$, not put up for retail sale	5
136	52062400	Combed single cotton yarn, with $<85\%$ cotton, nprs, $>52\text{mn}$ but $\leq 80\text{mn}$, not put up for retail sale	5
137	52083100	Dyed plain cotton weave, with $\geq 85\%$ cotton, $\leq 100\text{g/m}^2$	10
138	52083200	Dyed plain cotton weave, with $\geq 85\%$ cotton, $>100\text{g/m}^2$, $\leq 200\text{g/m}^2$	10
139	52083900	Dyed woven cotton fabrics, with $\geq 85\%$ cotton, nes	10
140	52084200	Coloured plain cotton weave, with $\geq 85\%$ cotton, $>100\text{g/m}^2$, $\leq 200\text{g/m}^2$	10
141	52085990	Other printed fabrics, with $\geq 85\%$ cotton	10
142	52093100	Dyed plain cotton weave, with $\geq 85\%$ cotton, $>200\text{g/m}^2$	10
143	52093200	Dyed 3 or 4-thread twill (incl. cross twill), with $\geq 85\%$ cotton, $>200\text{g/m}^2$	10
144	52093900	Dyed woven cotton fabrics, with $\geq 85\%$ cotton, $>200\text{g/m}^2$, nes	10
145	52094100	Coloured plain cotton weave, with $\geq 85\%$ cotton, $>200\text{g/m}^2$	10
146	52094200	Denim, with $\geq 85\%$ cotton, $>200\text{g/m}^2$	10
147	52103100	Dyed plain cotton weave, with $<85\%$ cotton, $\leq 200\text{g/m}^2$	10
148	52103900	Dyed woven cotton fabrics, nes, with $<85\%$ cotton, $\leq 200\text{g/m}^2$	10
149	52104100	Coloured plain cotton weave, with $<85\%$ cotton, $\leq 200\text{g/m}^2$	10
150	52104990	Woven fabrics of yarns of different colours, mixed mainly or solely with man-made fibres, with $<85\%$ cotton, $\leq 200\text{g/m}^2$	10
151	52113900	Dyed woven cotton fabrics, nes, with $<85\%$ cotton, $>200\text{g/m}^2$	10
152	54011010	Sewing thread of synthetic filaments, not for retail sale	5
153	54022000	High tenacity filaments yarn of polyesters, nprs, not put up for retail sale	5
154	54023310	Elastic filament of polyesters, not put up for retail sale	5

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
155	54026200	Multiple or cabled yarn of polyesters, nprs, not put up for retail sale	5
156	54071010	Woven fabrics of high tenacity yarn of nylon.or othr polyamides	10
157	54071020	Woven fabrics of high tenacity yarn of polyesters	10
158	54074100	Unbleached or bleached woven fabrics, ≥85% nylon...	10
159	54074200	Dyed woven fabrics of synthetic filament yarn, ≥85% nylon...	10
160	54074300	Coloured woven fabrics of synthetic filament yarn, ≥85% nylon...	10
161	54075100	Unbleached or bleached woven fabrics, ≥85% textured polyester	10
162	54075200	Dyed woven fabrics of synthetic filament yarn, ≥85% texturd polyester	10
163	54075300	Coloured woven fabrics of synthetic yarn, ≥85% textured polyester	10
164	54075400	Printed woven fabrics of synthetic yarn, ≥85% textured polyester	10
165	54076100	Other woven fabrics of synthetic yarn, ≥85% non-textured polyester	10
166	54076900	Other woven fabrics of synthetic yarn, ≥85% polyester, nes	10
167	54077100	Unbleached or bleached woven fabrics, ≥85% synthetic filaments, nes	10
168	54077200	Dyed woven fabrics, ≥85% synthetic filaments, nes	10
169	54078200	Dyed woven fabrics, <85% synthetic filaments, mixed with cotton	10
170	54078300	Coloured woven fabrics, <85% synthetic filaments, mixed with cotton	10
171	54079200	Dyed woven fabrics of synthetic filament yarn, nes	10
172	54079300	Coloured woven fabrics of synthetic filament yarn, nes	10
173	54082220	Dyed woven fabrics, ≥85% of cellulose acetate filament	10
174	54082290	Dyed woven fabrics, ≥85% of other artificial filaments	10
175	54082390	Coloured woven fabrics, ≥85% of other artificial filaments	10
176	54083200	Dyed woven fabrics of artificial filament yarn, nes	10
177	55039000	Synthetic staple fibres, nes, not carded, etc	5
178	55049000	Artificial staple fibres, (excl. viscose), not carded, etc	5
179	55093200	Multiple or cabled yarn, ≥85% acrylic/modacrylic staple fibres, nprs, not put up for retail sale	5
180	55095300	Yarn, <85% polyester staple fibres, mixed with cotton, nprs, not put up for retail sale	5

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
181	55099200	Yarn,<85% synthetic staple fibres, nes, mixed with cotton, nprs, not put up for retail sale	5
182	55101100	Single yarn, with \geq 85% artificial staple fibres, nprs, not put up for retail sale	5
183	55101200	Multiple or cabled yarn, with \geq 85% artificial staple fibres, nprs, not put up for retail sale	5
184	55103000	Yarn, with<85% artificial staple fibres, mixed with cotton, nprs, not put up for retail sale	5
185	55121100	Unbleached or bleached woven fabrics, \geq 85% polyester staple fibres	16.9
186	55121900	Printed, dyed or coloured woven fabrics, \geq 85% polyester staple fibres	10
187	55129900	Printed, dyed, coloured woven fabrics, \geq 85% synthetic fibres, nes	10
188	55132100	Dyed plain weave fabrics,<85% polyester fibres + cotton, \leq 170g/m ²	10
189	55151100	Woven fabrics,<85% polyester staple fibres with viscose rayon fibres	10
190	55151200	Woven fabrics of polyester staple fibres mixed with man-made filaments	10
191	55161200	Dyed woven fabrics, \geq 85% artificial staple fibres	10
192	55162200	Dyed woven fabrics,<85% artificial fibres, with man-made filaments	10
193	56012290	Other wadding of man-made fibres & articles thereof, nes	12
194	56031110	Nonwovens of man-made filament, \leq 25g/m ² , coated, etc.	10
195	56031290	Nonwovens of man-made filament,>25g/m ² but \leq 70g/m ² , not coated, etc.	10
196	56031310	Nonwovens of man-made filament,>70g/m ² but \leq 150g/m ² , coated, etc.	10
197	56031390	Nonwovens of man-made filament,>70g/m ² but \leq 150g/m ² , not coated, etc.	10
198	56031410	Nonwovens of man-made filament,>150g/m ² , coated, etc.	10
199	56031490	Nonwovens of man-made filament,>150g/m ² , not coated, etc.	10
200	56039290	Nonwovens of other materials,>25g/m ² but \leq 70g/m ² , not coated, etc.	10
201	56039390	Nonwovens of other materials,>70g/m ² but \leq 150g/m ² , not coated, etc.	10
202	56039410	Nonwovens of other materials,>150g/m ² , coated, etc.	10
203	56039490	Nonwovens of other materials,>150g/m ² , not coated, etc.	10
204	56075000	Twine, cordage, ropes & cables, of synthetic fibres, nes	5

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
205	56081900	Knotted netting of man-made textile materials (excl. fishing nets)	12
206	58012200	Cut corduroy of cotton	10
207	58013300	Weft pile fabrics of man-made fibres, nes	10
208	58041030	Tulles & other net fabrics of man-made fibres	12
209	58041090	Tulles & other net fabrics of other textile materials, nes	10
210	58042100	Lace of man-made fibres in piece/strips/motifs, machine made	10
211	58061090	Narrow woven pile/chenille fabrics of other textl materials, nes	10
212	58062000	Narrow woven fabrics, with $\geq 5\%$ elastomeric yarn or rubber thread	10
213	58063200	Narrow woven fabrics of man-made fibres, nes	10
214	58071000	Labels, badges... of textiles, woven, in piece..., not embroidered	10
215	58109200	Embroidery of man-made fibres, in the piece, in strips or in motifs	10
216	59031020	Textile imitation leather treated with polyvinyl chloride	10
217	59031090	Other textile fabrics treated with polyvinyl chloride	10
218	59032020	Textile imitation leather treated with polyurethane	10
219	59032090	Other textile fabrics treated with polyurethane	10
220	59039020	Textile imitation leater treated with other plastics, nes	10
221	59039090	Other textile fabrics treated with other plastics, nes	10
222	59069100	Rubberized textile fabrics, knitted or crocheted	10
223	59069990	Other rubberized textile fabrics, not knitted or crocheted, nes	10
224	59100000	Transmission or conveyor belts or belting, of textile material	8
225	60019200	Pile fabrics of man-made fibres, nes, knitted or crocheted	10
226	60041030	Knitted/crochetd fabrics of synthetic fibres, wid>30cm,elastomeric yarn $\geq 5\%$	10
227	60041090	Other knitted/crochetd fabrics, wid>30cm,elastomeric yarn $\geq 5\%$	10
228	60049030	Knitted/crochetd fabrics of synthetic fibres, wid>30cm, $\geq 5\%$, elastomeric rubber thread	10
229	60049090	Other knitted/crochetd fabrics, wid>30cm, $\geq 5\%$, elastomeric rubber thread	10
230	60053100	Other warp knit fabrics of unbleached or bleached synthetic fibres	10
231	60053200	Other warp knit fabrics of dyed synthetic fibres	10
232	60062400	Other knitted/crocheted fabrics of printed cotton, nes	10

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
233	60063100	Other knitted/crocheted fabrics of unbleached/bleached synthetic fibres	10
234	60063200	Other knitted/crocheted fabrics of dyed synthetic fibres, nes	10
235	60063300	Other knitted/crocheted fabrics of synthetic fibres of different colors	10
236	60063400	Other knitted/crocheted fabrics of printed synthetic fibres, nes	10
237	60064200	Other knitted/crocheted fabrics of dyed artificial fibres, nes	10
238	61051000	Men's or boys' shirts of cotton, knitted or crocheted	16
239	61069000	Women's or girls' blouses, etc, of other textiles, knitted/crocheted	16
240	61101100	Jerseys, pullovers, etc, of wool, knitted or crocheted	14
241	61102000	Jerseys, pullovers, etc, of cotton, knitted or crocheted	14
242	61103000	Jerseys, pullovers, etc, of man-made fibres, knitted or crocheted	16
243	61124100	Women's or girls' swimwear of synthetic fibres, knitted or crocheted	17.5
244	61152200	Panty hose and tights of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more	16
245	61152990	Panty hose and tights of other textile materials, knitted or crocheted	14
246	61159900	Hosiery & footwear, of other textiles, knitted or crocheted, nes	14
247	61178010	Ties, bow ties and cravats, knitted or crocheted	14
248	61178090	Other parts of garments or of clothing accessories, knitted or crocheted	14
249	61179000	Parts of garments or clothing accessories, knitted or crocheted	14
250	62089200	Women's or girls' dressing gowns, panties, etc, of man-made fibres	16
251	62121010	Brassieres, of man-made fibres	16
252	62121090	Brassieres, of other textiles	14
253	62122010	Girdles & panty-girdles, of man-made fibres	16
254	62122090	Girdles & panty-girdles, of other textiles	14
255	62129010	Braces, suspenders and the like, of man-made fibres	16
256	62129090	Braces, suspenders and the like, of other textiles, nes	14
257	62171010	Stocking, socks and sockettes	14
258	62171020	Kimono belts	14
259	62171090	Other made up clothing accessories, nes	14
260	62179000	Parts of garments or of clothing accessories, nes	14
261	63019000	Other blankets & travelling rugs, nes	16

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
262	63026010	Bath towels of cotton terry fabrics	14
263	63026090	Other toilet linen & kitchen linen of cotton terry fabrics	14
264	63071000	Floor-cloths, dish-cloths, dusters & similar cleaning cloths	14
265	64061000	Uppers & parts thereof (excl. stiffeners)	15
266	64062010	Outer soles & heels of rubber	15
267	64069900	Non-wood parts of footwear (excl. uppers, outer soles & heels)	15
268	70031900	Cast glass sheets non-wired nes	17.5
269	70060000	Glass of 70.03, 70.04, 70.05 bent, edge-worked etc not framed etc	15
270	70091000	Rear-view mirrors for vehicles	10
271	70191100	Chopped strands of glass, length ≤ 50 mm	12
272	70191900	Slivers, yarn & other chopped strands of glass	10
273	70193900	Webs, mattresses, boards & similar nonwoven products of glass fibres	10.5
274	72082790	Other flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w ≥ 600 mm, pickled, thk<3mm	5
275	72083890	Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w ≥ 600 mm, 3mm \leq thk \leq 4.75mm	5
276	72083990	Flat rlld prod, i/nas, in coil, hr,w ≥ 600 mm, thk<3mm	3
277	72091690	Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w ≥ 600 mm, 1mm \leq thk \leq 3mm,	6
278	72091790	Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w ≥ 600 mm, 0.5mm \leq thk \leq 1mm,	3
279	72091890	Other flat rlld prod, i/nas, not in coil, cr,w ≥ 600 mm, thk<0.5mm	6
280	72103000	Flat rlld prod, i/nas, electrocly platd/coatd with zinc,w ≥ 600 mm	8
281	72104900	Flat rlld prod, i/nas, plated or coated with zinc,w ≥ 600 mm, nes	4
282	72171000	Wire,iron or non alloy steel, not plated or coated	8
283	72191200	Flat rlld prod, stains steel, hr, in coil,w ≥ 600 mm, 4.75mm \leq th \leq 10mm	4
284	72191319	Of a thickness of 3mm or more but less than 4.75mm,not acid pickled ,other stainless steel,incoil	4
285	72191329	Of a thickness of 3mm or more but less than 4.75mm,acid pickled ,other stainless steel,incoil	4
286	72192300	Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w ≥ 600 mm, 3mm \leq thk<4.75mm	10
287	72192410	Flat rlld prod, stainless steel, hr, nic,w ≥ 600 mm, 1mm \leq thk<3mm	10

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
288	72193100	Flat rlld prod, stainless steel, cr,w \geq 600mm, 4.75mm or more thick	10
289	72193200	Flat rlld prod, stainless steel, cr,w \geq 600mm, 3mm \leq thick<4.75mm	10
290	72193300	Flat rlld prod, stainless steel, cr,w \geq 600mm, 1mm<thick <3mm	10
291	72193400	Flat rlld prod, stainless steel, cr,w \geq 600mm, 0.5mm \leq thick \leq 1mm	10
292	72193500	Flat rlld prod, stainless steel, cr,w \geq 600mm, thick<0.5mm	10
293	72199000	Flat rlld prod, stainless steel, 600mm or more wide, nes	10
294	72209000	Flat rlld prod, stainless steel,w<600mm, nes	10
295	72251900	Flat rlld prd of Si-electricl steel,w \geq 600mm, nes	6
296	74071000	Bars, rods & profiles of refined Cu	4
297	74072100	Bars, rods & profiles of Cu-Zn base alloys	7
298	74072900	Bars, rods & profiles, Cu alloy nes	7
299	74081100	Wire of refined Cu of which the max cs dimension >6mm	4
300	74081900	Wire of refined Cu of which the max cs dimension \leq 6mm	4
301	74082100	Wire, Cu-zinc base alloy	7
302	74091900	Plate,sheet & strip of refined Cu,not in coil,thick >0.15mm	4
303	74092100	Plate,sheet & strip of Cu-Zn base alloys,in coil,thick >0.15mm	7
304	74092900	Plate,sheet & strip of Cu-Zn base alloys,not in coil,thick> 0.15mm	7
305	74093100	Plate, sheet & strip of Cu-tin base alloys, in coil, thick>0.15mm	7
306	74093900	Plate,sheet & strip of Cu-tin base alloys,not in coil,thick> 0.15mm	7
307	74094000	Plate,sheet & strip of Cu-Ni / Cu-Ni-Zn base alloy,thick>0.15mm	7
308	74099000	Plate, sheet & strip of Cu alloy, thick>0.15mm,nes	7
309	74101100	Foil of refined Cu, not backed	4
310	74101210	Foil of Cu-Ni base / Cu-Ni-Zn base alloys, not backed	7
311	74101290	Foil of Cu alloys, nes, not backed	7
312	74102110	Refined Copper foil (backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.15mm,Suitable for manufacturing printed circuit board	4
313	74102190	Foil of refined Cu, backed	4
314	76061190	Plate/sheet/strip, Al, not alloyed, rect' sq, thick >0.2mm, nes	6
315	76061220	Plate, sheet' strip, Al alloy, rect' sq, 0.2<thick<0.28mm	6

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
316	76061230	Plate, sheet' strip, Al alloy, rect' sq, 0.28mm≤thick≤0.35	6
317	76069100	Plate, sheet' strip, Al, not alloyed, >0.2mm thick, nes	6
318	76069200	Plate, sheet' strip, Al alloy, >0.2mm thick, nes	10
319	76071190	Foil, Al, not backed, rolled but not further worked, ≤0.2mm,>0.007mm	6
320	76071900	Foil, Al, not backed & not >0.2mm thick, nes	6
321	76072000	Foil, Al, backed, not >0.2mm thick excluding any backing	6
322	81130000	Cermets & articles thereof, incl. waste & scrap	8.4
323	82032000	Pliers (incl. cutting pliers), pincers, tweezers & similar tools	10.5
324	82041200	Wrenches, hand-operated, with adjustable jaws	10
325	82052000	Hammers & sledge hammers	10
326	82054000	Screwdrivers	10.5
327	82055900	Tools for masons, watchmakers, miners & hand tools nes	10
328	82072010	Dies for drawing/extruding metal with workng part of diamond/cubic BN	8
329	82072090	Dies for drawng/extrudng metal with workng part of oth materials, nes	8
330	82073000	Tools for pressing, stamping' punching	8
331	82074000	Tools for taping' threading	8
332	82075010	Tools for drilling, nes, with working part of diamond/cubic BN	8
333	82075090	Tools for drilling, with workng part of oth materials, nes	8
334	82076010	Tools for boring/broaching, with working part of diamond/cubic BN	8
335	82077000	Tools for milling	8
336	82078000	Tools for turning	8
337	82079010	Interchangeable tools, nes, with working part of diamond/cubic BN	8
338	82079090	Interchangeable tools, nes, with workng part of oth maerials	8
339	82082000	Knives & blades for machines/mechanical appliances for wood working	8
340	82084000	Knives & blades for agricultural, horticultural' forestry machines	8
341	82089000	Knives & blades for leather, paper, tobacco machines & oth industries	8
342	84122100	Hydraulic power engines & motors linear acting (cylinders)	12
343	84123100	Pneumatic power engines & motors linear acting (cylinders)	14
344	84138100	Pumps nes	8
345	84139100	Parts of pumps for liquids	5

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
346	84141000	Vacuum pumps	8
347	84143013	Compressors for airconditioner, 0.4kw <motor power ≤ 5kw	10
348	84143014	Compressors for airconditioner, motor power >5 kw	10
349	84145120	Window fans, with a built-in electric motor of output ≤ 125W	20
350	84145199	Fans nes, with a built-in electric motor of output ≤ 125W	10
351	84145990	Other fans, nes	8
352	84148090	Air or gas compressors/hoods, nes	7
353	84149019	Parts of compressors of subheadng Nos. 84143011-84143014, 84143090	8
354	84149020	Parts of machines of subheading Nos. 84145110-84145190, 84146000	12
355	84149090	Parts of machines of other subheadings of 84.14, nes	7
356	84159090	Parts of air conditioners of other subheadings of 84.15	10
357	84178090	Industrial/lab furnaces/ovens, non-electric, nes	10
358	84191900	Instantaneous' storage water heaters, non-electric, nes	35
359	84193200	Dryers for wood, paper pulp, paper' paperboard	9
360	84193990	Other dryers, nes	9
361	84195000	Heat exchange units, non-domestic, non-electric	10
362	84199090	Parts of other machinery, plant & equip of heading 84.19	4
363	84201000	Calendering' rolling machines, excl for metals' glass	8.4
364	84212190	Filtering' purifying machines for water, non-household type	5
365	84212990	Filtering' purifying machinery & apparatus for liquids nes	5
366	84213910	Filtering' purifying machines for gases nes, household type	15
367	84213921	Electrostatic dust collectors for industry uses	5
368	84213923	Cyclone dust collectors for industry uses	5
369	84213929	Other dust collectors for industry uses, nes	5
370	84213990	Other dust collectors, nes	5
371	84219990	Parts for filtering' purifying machines of non-household type	5
372	84243000	Steam' sand blasting machines & similar jet projecting machines	8.4
373	84281090	Other lifts and skip hoists	6
374	84283300	Continous-action elevators/conveyors for goods nes, belt type	5
375	84283910	Continous-action elevators/conveyors for goods, nes, chain type	5

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
376	84283920	Continous-action elevators/conveyors for goods, nes, roller type	5
377	84283990	Continous-action elevators/conveyors for goods, nes	5
378	84289090	Other lifting, handling, loading or unloading machinery	5
379	84388000	Other machinery for the industrial preparation/manufacture of food/drink, excl. for the extraction/preparation of animal/fixed vegetable fats/oils	8.5
380	84392000	Machinery for making paper' paperboard	8.4
381	84393000	Machinery for finishing paper' paperboard	8.4
382	84411000	Cutting machines for paper pulp, paper' paperboard of all kinds	12
383	84418090	Machinery for making up paper pulp, paper' paperboard nes	12
384	84431922	Platen screen press	10
385	84431929	Other screen printing machinery	10
386	84431980	Other printing machinery	8
387	84440010	Synthetic filament spinning jets	10
388	84463040	Water jet looms for weaving fabrics of a width >30cm, shuttless	8
389	84471100	Circular knitting machines with cylinder diameter ≤165 mm	8
390	84471200	Circular knitting machines with cylinder diameter >165 mm	8
391	84472020	Other flat knitting machines	8
392	84485900	Other parts/accessories of machns of 84.47/their auxiliary machinery	6
393	84514000	Washing, bleaching' dyeing machines	8.4
394	84515000	Machines for reeling,unreeling,folding,cut' pink textile fabrics	8
395	84518000	Machines for wring/dress/finishing/coating' impreg tex yarns etc	12
396	84522190	Other non-household type automatic sewing machines nes	12
397	84529099	Parts of non-household sewing machines, nes	14
398	84581100	Horizontal lathes numerically controlled	9.7
399	84589100	Lathes nes numerically controlled	5
400	84592100	Drilling machines nes, numerically controlled	9.7
401	84601100	Fl-surf grindg mach,pos of one axis acc to 0.01mm, numerical controld	9.7
402	84604020	Lapping machines	13
403	84609010	Grinding wheel mechines	15
404	84609020	Polishing machines	15
405	84612020	Slotting machines	15

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
406	84613000	Broaching machines	12
407	84615000	Sawing / cutting-off machines by removing metal	12
408	84619011	Double-column (open-side) planing machines	15
409	84619019	Other planing machines, nes	15
410	84621010	Forging / die-stamping mach & hammers, numerically controlled	9.7
411	84621090	Forging / die-stamping mach & hammers, not numerically contrld	12
412	84624900	Punching/notching machines, not numerically controlled	10
413	84629910	Mechanical presses	10
414	84631019	Cold-drawing tube benches, >300t	10
415	84662000	Work holders for use with machines of 84.56 to 84.65	7
416	84669400	Parts & accessories nes for use on mach of hdg No 84.62 or 84.63	6
417	84772010	Plastic granulators	5
418	84772090	Extruders for working rubber / plastics nes	5
419	84774010	Plastics bridge-die-forming mahines	5
420	84774020	Plastics calender-forming machines	5
421	84774090	Vacuum moldng/thermoforming mach for workng rubber/plastic nes	5
422	84775900	Mach for moulding / otherwise forming rubber / plastics nes	5
423	84778000	Mach for working rubber / plastics / for the mfr of prods therefrom	5
424	84798110	Electric wire coil-winders	9.5
425	84798190	Other machines for treating metal	9.5
426	84798200	Machines for mixing/kneading/crushing/grinding, etc	7
427	84804100	Moulds, injection / compression types, for metal / metal carbides	8
428	84807900	Moulds for rubber / plastics, nes	5
429	84812010	Valves for oleohydraulic transmissions	5
430	84813000	Valves, check	5
431	84814000	Valves, safety / relief	5
432	84818010	Other valves	7
433	84819010	Parts of valves	8
434	84819090	Parts of taps, cocks / similar appliances	8
435	84824000	Bearings, needle roller	8
436	84829900	Bearing parts, nes	6
437	84834010	Roller screws	8
438	84834090	Gears/gearing, ball screws, gear boxes, speed changers, etc	8

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
439	84839000	Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; parts of appliances of heading No. 84.83	8
440	84841000	Gaskets of metal sheeting combined with other material	8
441	84879000	Machinery parts, not specified or included elsewhere in this chapter	8
442	85011010	Electric motors of an output ≤ 37.5 W, for toys	24.5
443	85011099	Electric motors of an output ≤ 37.5 W, nes	9
444	85013100	DC motors, DC generators, of an output not exceeding 750 W	12
445	85030010	Parts of electric motors of subheading No. 8501.1010, 8501.1091	12
446	85030090	Parts of other machines of heading No. 85.01 or 85.02	8
447	85043110	Mutual inductors, capacity ≤ 1 KVA	5
448	85043190	Other transformers, capacity ≤ 1 KVA, nes	5
449	85049019	Parts of other transformers, nes	8
450	85049020	Parts of voltage stabilized suppliers and UPS	8
451	85049090	Parts of ballasts, static converters and other inductors	8
452	85051110	Permanent magnets/articles going to be permanent magnets, of rare-earth	7
453	85051190	Permanent magnets/articles going to be permanent magnets, of other metal	7
454	85078020	Lithium ion	12
455	85081100	Vacuum cleaners with self-contained electric motor, of a power not exceeding 1500W and having a dust bag or other receptacle capacity not exceeding 20l	10
456	85094090	Other domestic food grinders & mixers; fruit or veg juice extractors	10
457	85122010	Lighting equipment of a kind used for motor vehicles	10
458	85129000	Parts of electrical lighting, signalling & defrosting equipment	8
459	85158000	Other electric/laser/ultrasonic machines for weld/cut nes or for hot spray of metals/cermets	8
460	85162100	Electric space heating apparatus, having storage heating radiators	35
461	85164000	Electric smoothing irons	35
462	85166030	Electric cookers	15
463	85166050	Electric oven	15
464	85167210	Automatic bread makers	32
465	85181000	Microphones & stands therefor	10
466	85184000	Audio-frequency electric amplifiers	12

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
467	85189000	Parts of microphones, loudspeakers, headphones, earphones & electric sound amplifiers	10.5
468	85258013	Other television cameras, not for special purposes	35
469	85299042	Camera modules without special purpose	12
470	85299049	Parts for other TV cameras	12
471	85361000	Electrical fuses, for a voltage not exceeding 1,000 volts	10
472	85371011	Programmable controllers	5
473	85371019	Other numerical control panels, for a voltage \leq 1,000 V	5
474	85389000	Parts for switches, fuses, panels and etc, nes	7
475	85393990	Other discharge lamps, for other uses nes	8
476	85399000	Parts of elect filament or disch lamps, UV or IR lamps & arc-lamps	8
477	85408900	Valve & tubes, nes	8
478	85432010	General signal generators, output frequency < 1,500 MHz	15
479	85432090	Other signal generators, nes	8
480	85441100	Insulated winding wire of copper	10
481	85442000	Co-axial cable & other co-axial electric conductors	10
482	85444929	Electric conductors, not fitted with connectors, for a voltage exceeding 80V but not exceeding 1000V	12
483	87081000	Bumpers & parts of motor vehicles	10
484	87082930	Windowpane raiser	10
485	87082941	Motor vehicles electric sunroofs	10
486	87082942	Motor vehicles manual sunroofs	10
487	87082951	Side panels	10
488	87082952	Car doors	10
489	87082953	Engine hood	10
490	87082954	Front wall	10
491	87082955	Baggage compartment lids (or back door)	10
492	87082956	Rear wall	10
493	87082957	Fender	10
494	87082959	Other body Coverings	10
495	87082990	Parts & accessories of bodies nes for motor vehicles	10
496	87084010	Gear boxes of tractors	6
497	87084020	Gear boxes of buses with seats \geq 30	10
498	87084030	Gear boxes of dumpers	6
499	87084040	Gear boxes of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230	10
500	87084050	Gear boxes of trucks of 8704.2240, 8704.2300	10
501	87084060	Gear boxes of vehicles of 87.05	10
502	87084099	Gearshift of other motor vehicles of 87.02 to 87.04	10

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
503	87087010	Road wheel & parts of tractors	6
504	87087020	Road wheel & parts of buses with seats ≥ 30	10
505	87087030	Road wheel & parts of dumpers	6
506	87087040	Road wheel & parts of trucks of 8704.2100/2230/3100/3230	10
507	87087050	Road wheel & parts of trucks of 8704.2240, 8704.2300	10
508	87087060	Road wheel & parts of vehicles of 87.05	10
509	87087090	Road wheel & parts of other vehicles of 87.02 to 87.04	10
510	87089991	Frames of other vehicles of 87.02 to 87.04	10
511	87089992	Motor vehicles shafts	10
512	87089999	Other parts & accessories nes of other vehicles of 87.02 to 87.04	10
513	87120020	Racing bicycles	13
514	87120030	Mountain bicycles	13
515	87120041	Cross-country bicycles, 16", 18", 20"	13
516	87120049	Cross-country bicycles, nes	13
517	87120081	Other bicycles, not larger than 16"	13
518	87120089	Bicycles, nes	13
519	87120090	Non-motorised cycles, nes	23
520	87149100	Bicycle frames & forks, & parts thereof	12
521	87149200	Bicycle wheel rims & spokes	12
522	87149310	Hubs of bicycle	12
523	87149320	free wheel	12
524	87149390	Free-wheel, sprocket wheel of bicycle	12
525	87149400	Bicycle brakes, including coaster braking hubs, & parts	12
526	87149500	Bicycle saddles	12
527	87149610	Bicycle padals and parts thereof	12
528	87149620	Bicycle crank-gears and parts thereof	12
529	87149900	Bicycle parts nes	12
530	90021190	Objective lenses for photo camera/enlarger/reducer, projector, nes	15
531	90021990	Objective lenses, nes	15
532	90029010	Other optical elements, mounted, for photo cameras	15
533	90029090	Other optical elements, mounted, nes	15
534	90213100	Artificial joints	4
535	90318090	Measuring or checking instruments, appliances & machines, nes	5
536	95063900	Golf equipment nes	14
537	95069110	Gymnasium or recovered equipment	12
538	96062100	Buttons of plastics, not covered with textile material	21

No.	Tariff Line in 2009	Description of Goods (for short)	Import Tariff in 2009 (%)
539	96062200	Buttons of base metal, not covered with textile material	15

Note: The descriptions of goods in the table are in their shortened forms. The specific product scope shall follow the corresponding tariff lines of the Mainland's Customs Tariff of Import and Export in 2009.

Tariff Reduction Arrangement for Products Under the Early Harvest on the Mainland Side

	Import Tariff in 2009 (X%)	Agreement Tariff Rate		
		The First Year of Implementing the Early Harvest Program	The Second Year of Implementing the Early Harvest Program	The Third Year of Implementing the Early Harvest Program
1	$0 < X \leq 5$	0		
2	$5 < X \leq 15$	5	0	
3	$X > 15$	10	5	0

Notes:

1. Import tariff in 2009 refers to the non-interim import tariff rate that the Mainland generally applied to other members of the World Trade Organization in 2009.
2. If the Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement enters into force in the first half of the year, the Early Harvest Program shall be implemented on July 1st of the same year; if the Agreement enters into force in the second half of the year, the Early Harvest Program shall be implemented on January 1st of the next year.
3. The Agreement Tariff Rate of the products under the Early Harvest Program shall be reduced to zero by a maximum of three installments in no more than two years after the implementation of the Program. The reduction of tariff rates in the first year shall commence on the date of implementing the Early Harvest Program, and the reductions in the second year and the third year shall commence on January 1st of the respective year.

Annex II

Provisional Rules of Origin Applicable to Products Under the Early Harvest for Trade in Goods

Article 1 Definitions

For the purposes of this Provisional Rules:

Customs Valuation Agreement means the *Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, which is part of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Fungible materials means materials that are interchangeable for commercial purposes and whose properties are essentially identical and between which it is impractical to differentiate by a mere visual examination.

Generally Accepted Accounting Principles means the recognized essential authoritative accounting standards of one Party with respect to the recording of revenues, expenses, costs, assets and liabilities, the disclosure of information and the preparation of financial statements. These standards may encompass broad guidelines of general application as well as detailed standards, practices and procedures.

Material means a good physically incorporated into another good or used in the production of another good, including ingredients, parts, components, subassemblies or semi-subassemblies.

Neutral elements means articles used in the production, testing or inspection of another good, but not physically incorporated into the good.

Non-originating materials means materials other than those qualified as originating in accordance with the provisions of this Provisional Rules.

Originating materials or originating goods means materials or goods which are qualified as originating in accordance with the provisions of this Provisional Rules.

Production means methods of obtaining goods, including but not limited to, growing, raising, mining, harvesting, fishing, farming, trapping, hunting, capturing, gathering, collecting, breeding, extracting, manufacturing, processing, or assembling.

Harmonized System means the *Harmonized Commodity Description and Coding System* of the World Customs Organization.

Heading means the four-digit code used in the Harmonized System.

Subheading means the six-digit code used in the Harmonized System.

Article 2 Originating Goods

Unless otherwise provided in this Provisional Rules, a good shall be considered as originating in one Party when:

- (a) the good is wholly obtained in one Party in accordance with Article 3;

- (b) the good is produced entirely in one or both Parties, exclusively from originating materials; or
- (c) the good is produced in one or both Parties, using non-originating materials, and conforms to the product specific rules provided in Article 4.

Article 3 Goods Wholly Obtained

For the purpose of subparagraph (a) of Article 2, the following goods shall be considered as wholly obtained in one Party:

- (a) live animals born and raised in one Party;
- (b) products obtained from live animals referred to in subparagraph (a) above in one Party;
- (c) plants or plant products harvested, picked or gathered in one Party;
- (d) goods obtained by hunting, trapping, fishing, farming, gathering or capturing in one Party;
- (e) minerals extracted in one Party;
- (f) products obtained by one Party from its relevant waters, seabed or subsoil beneath the seabed;
- (g) goods processed or manufactured on board factory ships registered in one Party, exclusively from goods referred to in subparagraph (f) above;
- (h) waste and scrap derived from processing operations in one Party and fit only for the recovery of raw materials, or waste collected after consumption in one Party provided that such waste are fit only for the recovery of raw materials; and
- (i) goods obtained in one Party solely from goods referred to in subparagraphs (a) through (h) above.

Article 4 Product Specific Rules

Unless otherwise provided in this Provisional Rules, the originating status of the goods, produced in one or both Parties using non-originating materials, shall be determined in accordance with the corresponding rules set forth in the Attachment to this Provisional Rules, which specifies a change in tariff classification, a regional value content, processing operation or other requirements.

The above-mentioned Attachment shall be implemented subsequent to the agreement to be reached through the consultation between the expert group on Rules of Origin of both Parties.

Article 5 Change in Tariff Classification

For the purpose of a change in tariff classification criterion provided in Article 4 of this Provisional Rules, the non-originating materials used in the production of a

good shall undergo a change of tariff classification specified in the Attachment to this Provisional Rules as a result of processes performed in one or both Parties.

Article 6 Regional Value Content

1. For the purpose of the Regional Value Content (RVC) criterion provided in Article 4, the RVC shall be calculated according to the following formula:

$$\text{RVC} = \frac{\text{FOB-VNM}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

where:

VNM shall be the value of non-originating materials adjusted based on CIF.

2. Both FOB and CIF values referred to in this Provisional Rules shall be determined pursuant to the *Customs Valuation Agreement* and the Generally Accepted Accounting Principles.

Article 7 Processing Operations

For the purpose of the processing operation criterion provided in Article 4, the goods concerned shall be considered as originating provided that the processing operations specified in the Attachment to this Provisional Rules, have been conducted in one or both Parties.

Article 8 Accumulation Rule

Where an originating material of one Party is incorporated into a good in the other Party, the material so incorporated shall be considered to be originating in the latter Party.

Article 9 Minimal Operations or Processes

1. For the purposes of this Article, “simple” is used to describe operations or processes which need neither professional skill nor specialized machine, apparatus or equipment.
2. Simple operations or processes which contribute minimally to the essential characteristics of the goods, either by themselves or in combination, shall be considered to be minimal operations or processes and do not confer origin. These include but not limited to:
 - (a) operations to ensure the preservation of goods in good condition during transportation or storage, such as ventilation, dehumidification, refrigeration, freezing, chilling, oiling, antirust painting, protection wrapping, or placing in salt or aqueous solutions;
 - (b) breaking-up and assembling of goods for the purpose of facilitating

- consignments;
- (c) packaging, unpackaging or repackaging for sale or exhibition purposes;
 - (d) slaughtering, freezing, cutting and slicing of animals;
 - (e) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching (including the making-up of sets of articles), slitting, bending, coiling, or uncoiling;
 - (f) washing, cleaning, removing dust, oxide, oil, paints and other coverings;
 - (g) simple painting, polishing, sharpening, grinding, cutting, assembling or disassembling;
 - (h) bottling, canning, bagging, casing, boxing, fixing on cards or boards, and other similar packaging operations;
 - (i) affixing or printing marks, labels, logos or other like distinguishing signs on products or their packaging;
 - (j) diluting, dissolving or simple mixing that does not materially alter the characteristics of the goods;
 - (k) husking, partial or complete bleaching, polishing and glazing of cereals other than rice;
 - (l) operations to color sugar or form sugar lumps;
 - (m) ironing or pressing of textiles;
 - (n) peeling, stoning and shelling of fruits, nuts and vegetables.

Article 10 *De Minimis*

A good that fails to meet the criterion of change in tariff classification, pursuant to the provisions of the Attachment to this Provisional Rules, shall nonetheless be considered to be originating, provided that:

- (a) the value of all non-originating materials, determined pursuant to Article 6, that fail to meet the criterion of change in tariff classification, does not exceed ten percent (10%) of the FOB value of the given good; and
- (b) the good meets all the other applicable requirements of this Provisional Rules.

Article 11 *Fungible Materials*

1. In determining whether a good is originating, any fungible material shall be distinguished by the physical separation of the goods; or by one of the inventory management methods recognized in the Generally Accepted Accounting Principles of the exporting Party.
2. The selected inventory management method shall be used continuously for that good or material throughout the entire fiscal year.

Article 12 *Neutral Elements*

In determining whether a good is originating, the origin of the following neutral elements shall be disregarded:

- (a) fuel, energy, catalysts and solvents;
- (b) equipment, devices and supplies used for testing or inspecting the goods;
- (c) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment and supplies;
- (d) tools, dies and molds;
- (e) spare parts and materials used in the maintenance of equipment and buildings; and
- (f) any other goods that are not incorporated into the good, whose use in the production of that good can reasonably be demonstrated to be a part of that production.

Article 13 Sets

Sets, as defined in General Rule 3 for the Interpretation of the Harmonized System, shall be considered to be originating in one Party provided all the products of the sets are originating in that Party. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be considered to be originating, provided that the value of the non-originating materials, pursuant to Article 6, does not exceed ten percent (10%) of the FOB value of the set.

Article 14 Packaging Materials and Containers

1. Where goods are subject to a change in tariff classification criterion set out in the Attachment to this Provisional Rules, the origin of the packaging materials and containers in which the goods are packaged for retail sale shall be disregarded in determining the origin of the goods, provided that the packaging materials and containers are classified with the goods. Nevertheless, if the goods are subject to a regional value content requirement, the value of the packaging materials and containers used for retail sale shall be taken into account as originating materials or non-originating materials, as the case may be, in calculating the region value content of the goods.
2. The packaging materials and containers used for transportation shall not be taken into account in determining the origin of the goods.

Article 15 Accessories, Spare Parts and Tools

1. For the purpose of a change in tariff classification criterion provided in the Attachment to this Provisional Rules, accessories, spare parts, tools, manuals and informative materials presented with the goods upon importation shall be disregarded in the determination of the origin of the goods, provided that these are classified with and not invoiced separately from the good.

2. Where the goods are subject to a regional value content requirement, the value of the accessories, spare parts, tools, manuals and informative materials shall be taken into account as originating materials or non-originating materials, as the case may be, in calculating the region value content of the goods, provided that these are presented with and not invoiced separately from the goods.
3. This Article applies where the quantities and values of the accessories, spare parts, tools, manuals and informative materials are customary for the goods.

Article 16 Direct Consignment

1. Originating goods claiming for preferential tariff treatment shall be directly consigned between the Parties.
2. Goods whose transportation involves transit through one or more third parties, with or without transshipment or temporary storage, shall still be considered as directly consigned between the Parties, provided that:
 - (a) the transit entry is justified for geographical reasons or transportation requirements;
 - (b) the goods do not enter into trade, commerce or consumption in the third party; and
 - (c) the goods do not undergo any operation in the third party other than unloading and reloading, repackaging, or any operation required to keep them in good condition.
3. Under the condition set forth in paragraph 2 of this Article, the duration of temporary storage of the goods in the third party shall not exceed sixty (60) days from the date of their entry into that third party, and during the whole period of its temporary storage, the goods shall remain under the custody of Customs of that third party.
4. For the purpose of the goods as set out in paragraph 2 of this Article, documentation issued by the Customs of the transit party and other evidentiary documents recognized by the customs of the importing Party shall be submitted upon import declaration.

Article 17 Operational Procedures Related to Rules of Origin

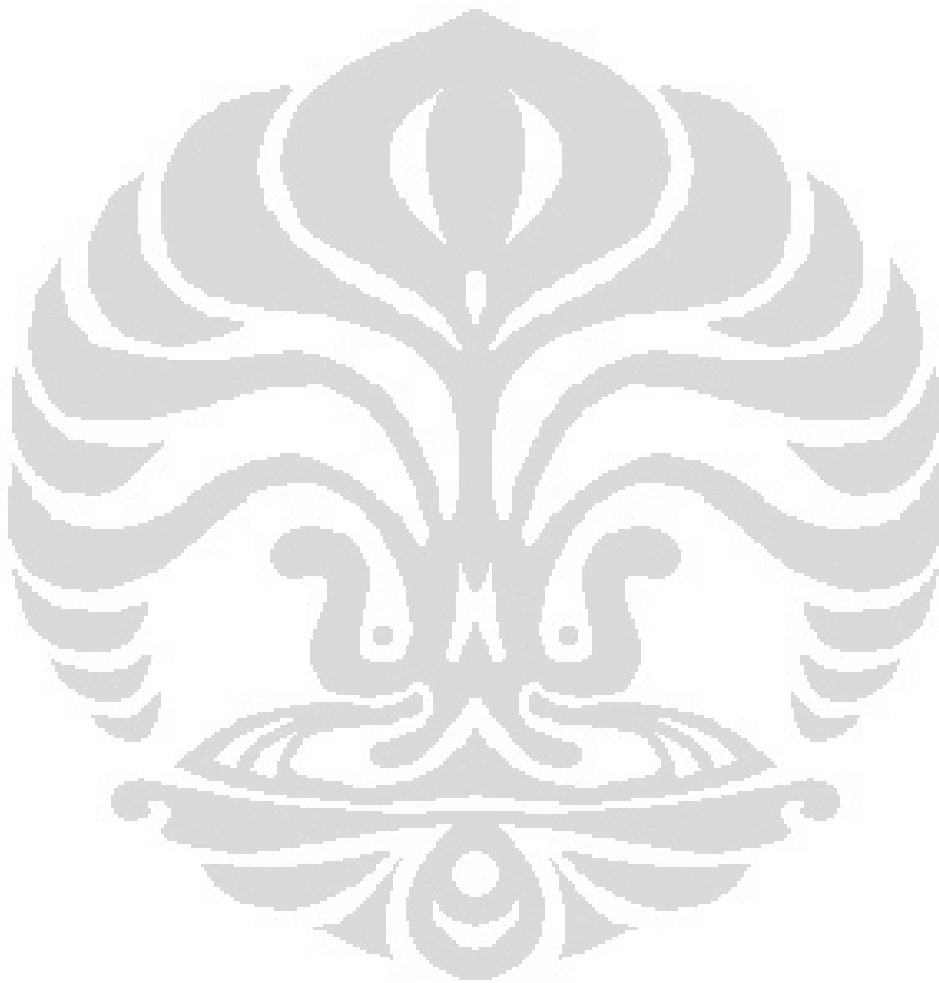
Operational procedures for the implementation of this Provisional Rules shall be implemented subsequent to the agreement to be reached through the consultation between the expert group on Rules of Origin of both Parties.

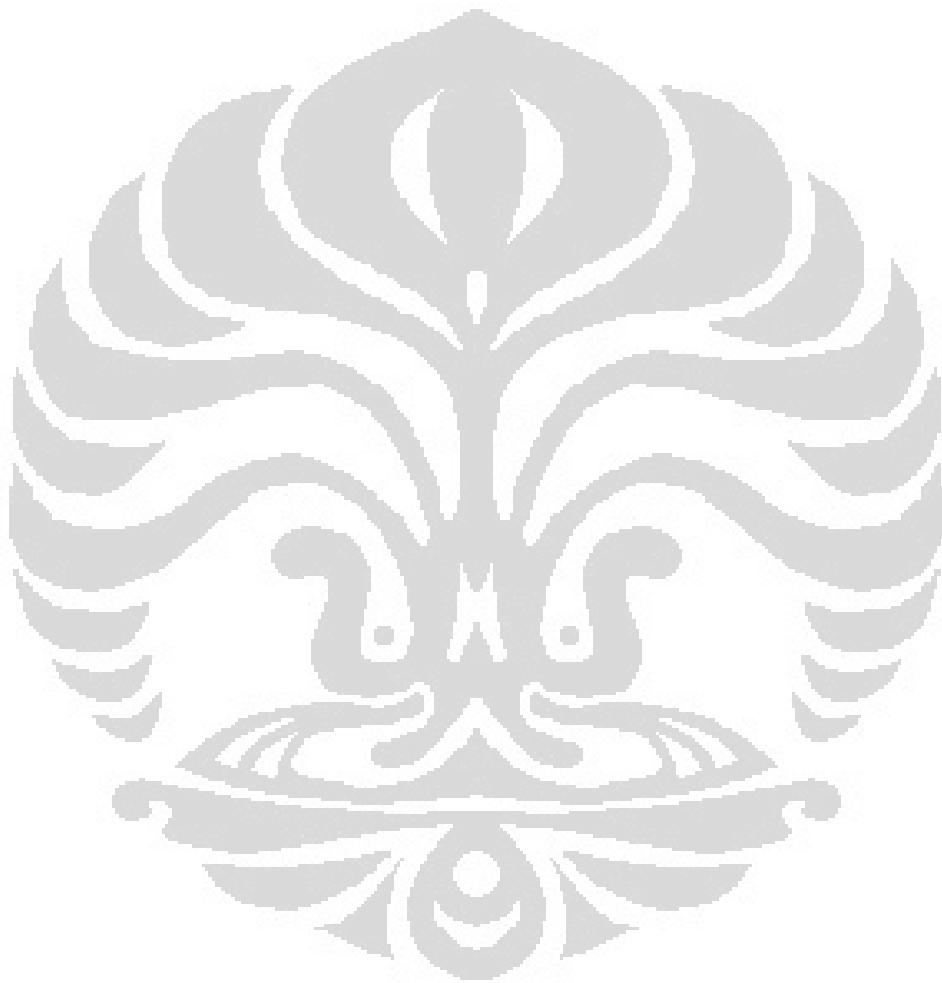
Annex III

Safeguard Measures Between the Two Parties Applicable to Products Under the Early Harvest for Trade in Goods

1. If, as a result of the implementation of the Early Harvest Program by an importing Party, any specific product thereof is being imported from the other Party in such increased quantities, absolute or relative to the production of the importing Party, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the industry of the importing Party that produces like or directly competitive products, the importing Party may request consultations with the other Party to seek a mutually satisfactory solution.
Pursuant to the previous paragraph, if a Party determines to take a safeguard measure between the two Parties after investigation, the Party may increase the tariff rate applicable to the product concerned up to the level of non-interim tariff rate generally applied to the members of the World Trade Organization at the time when such a safeguard measure between the two Parties is taken.
2. The duration of a safeguard measure between the two Parties shall be as short as possible. The measure shall be taken only to the extent necessary to eliminate or prevent injury to the industry of the importing Party. The duration of such a measure shall not exceed one year.
3. When a safeguard measure between the two Parties on a product is terminated by one Party, the tariff rate of this product shall be the rate applicable at the time of the termination of the safeguard measure between the two Parties according to the tariff reduction modalities set forth in Annex I of the *Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement*.
4. When a safeguard measure between the two Parties is taken, in the event of rules not stipulated in this Annex, the *Agreement on Safeguards* of the World Trade Organization shall be applied *mutatis mutandis*, except the quantitative restriction measures set forth in Article 5, as well as Articles 9, 13 and 14 of the *Agreement on Safeguards* of the World Trade Organization.
5. Where the *Agreement on Safeguards* of the World Trade Organization is applied *mutatis mutandis* under this Annex, the “Council for Trade in Goods” or the “Committee on Safeguards” mentioned in the *Agreement on Safeguards* of the World Trade Organization refers to the “Cross-Straits Economic Cooperation Committee” under the *Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement*.
6. Neither Party may simultaneously take the following measures on a product from the other Party:

- (1) a safeguard measure between the two Parties;
- (2) a measure set forth in Article XIX of the *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* and the *Agreement on Safeguards* of the World Trade Organization.





Annex IV

Sectors and Liberalization Measures Under the Early Harvest for Trade in Services

Commitments of the Taiwan Side on Liberalization of Non-financial Service Sectors¹

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
1. Business services		
C. Research and development services (CPC 851, 852, 853)	(1) No limitation. (2) No limitation. (3) Service suppliers of the Mainland are allowed to establish their commercial presence in Taiwan in the form of a sole proprietorship, joint venture, partnership or branch, to supply research and development services.	

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
1. Business services		
F. Other business services (s) Convention services (CPC 87909*) — *Activities of establishments engaged in provision of planning, organizing, managing and marketing services for conventions and similar events (including catering and beverage services)	(1) No limitation. (2) No limitation. (3) Service suppliers of the Mainland are allowed to establish their commercial presence in Taiwan in the form of a sole proprietorship, joint venture, partnership or branch, to supply convention services.	

¹ Sectors and sub-sectors are classified in accordance with the Services Sectoral Classification List of the World Trade Organization General Agreement on Trade in Services (GNS/W/120). The contents of each sector are based on the corresponding CPC, United Nations Provisional Central Product Classification, ST/ESA/STAT/SER.M/77 as reference.

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
1. Business services		
F. Other business services (s) Exhibition services (CPC87909) – Jointly held business-to-business exhibitions only.		The Mainland's enterprises, public institutions and convention-and-exhibition-related bodies or foundations, etc. are allowed to hold business-to-business exhibitions in Taiwan jointly with bodies such as enterprises, associations, or chambers of commerce of Taiwan's convention and exhibition industry, provided the relevant regulations are complied with.

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
1. Business services		
F. Other business services (t) Others v. Specialty design services (CPC87907) – All specialized design services other than interior design are deemed specialty design services, such as design, visual communication (graphic) design and package design services in respect of merchandise such as fashion items, jewelry, furniture and other personal or household items.	(1) No limitation. (2) No limitation. (3) Service suppliers of the Mainland are allowed to establish commercial presence in Taiwan in the form of a sole proprietorship, joint venture, partnership or branch, to supply specialty design services.	

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
2. Communication services		
D. Audiovisual services (b) Motion pictures projection services – Chinese-language motion pictures and motion pictures jointly produced.		A maximum of ten motion pictures of the Mainland which are filmed by production units incorporated in accordance with the relevant regulations of the Mainland and which conform to the definitions in relevant regulations of Taiwan may, upon review and approval of the competent authority of Taiwan, be commercially released and exhibited in Taiwan each year; and regulations governing the release and exhibition of motion pictures of the Mainland shall be complied with.

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
4. Distribution services		
A. Commission agents' services (except live animals) (CPC 621) – Brokerage of sales of tangible commodities for a commission, on a fee or contract basis, is deemed commission agents' service. Commodity brokerage via the Internet is included in this class.	(1) No limitation. (2) No limitation. (3) Service suppliers of the Mainland are allowed to establish commercial presence in Taiwan in the form of a sole proprietorship, joint venture, partnership or branch, to supply commission agents' services.	

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
10. Recreational, cultural and sporting services (other than audiovisual services)		
D. Sporting and other recreational services (CPC 96411, 96412, 96419)	(1) No limitation. (2) No limitation. Service suppliers of the Mainland are allowed to establish their commercial presence in Taiwan in the form of a sole proprietorship, joint venture, partnership or branch, to supply sporting and recreational services.	

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
11. Air transport services		
(c) Computer reservation system ²	(1) No limitation. (2) No limitation. (3) Service suppliers of the Mainland are allowed to establish commercial presence in Taiwan in the form of a sole proprietorship, joint venture, partnership or branch, to supply computer reservation system services.	

Commitments of the Taiwan Side on Liberalization of Financial Services Sector

Sector	Specific Commitments
Banking and other financial services (excluding securities, futures and insurance)	The Mainland's banks which have been permitted to incorporate representative offices in Taiwan and whose representative offices have so incorporated for one full year, may apply for incorporation of branches in Taiwan.

² The definition in the Annex on Air Transport Services to the World Trade Organization General Agreement on Trade in Services shall apply.

Commitments of the Mainland Side on Liberalization of Non-financial Service Sectors³

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
1. Business services		
A. Professional Services b. Accounting, auditing and bookkeeping services (CPC862)	(1) No limitation (2) No limitation (3) Unbound except as indicated in the Mainland's WTO commitments	The validity period of the "Temporary License to Perform Auditing Service", applied for by Taiwan accounting firms for the purpose of conducting auditing business on a temporary basis in the Mainland is one year.

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
1. Business services		
B. Computer and Related Services b. Software implementation services (CPC842) c. Data processing services (CPC843, excluding CPC8439)	(1) No limitation (2) No limitation (3) On the basis of the Mainland's commitments upon its accession to the WTO, Taiwan service suppliers shall be allowed to set up wholly-owned enterprises to provide software implementation services in the Mainland. (1) No limitation (2) No limitation (3) On the basis of the Mainland's commitments upon its accession to the WTO, Taiwan service suppliers shall be allowed to set up wholly-owned enterprises to provide data processing services in the Mainland.	

³ Sectoral classification is based on WTO's GATS Services Sectoral Classification List (GNS/W/120). For the contents of the sectors, reference is made to the relevant CPC, United Nations Provisional Central Product Classification (ST/ESA/STAT/SER.M/77).

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
1. Business services		
C. Research and Development Services - Research and experimental development services on natural sciences and engineering (CPC8510)	(1) No limitation (2) No limitation (3) Taiwan service suppliers shall be permitted to set up equity joint venture, contractual joint venture or wholly owned enterprises to provide research and experimental development services on natural sciences and engineering in the Mainland.	

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
1. Business services		
F. Other Business Services s. Convention services (CPC87909)	(1) No limitation (2) No limitation (3) On the basis of the Mainland's commitments upon its accession to the WTO, Taiwan service suppliers shall be allowed to set up wholly-owned enterprises to provide convention services in the Mainland.	

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
1. Business services		
F. Other Business Services -Specialty design Services (CPC87907)	(1) No limitation (2) No limitation (3) Taiwan service suppliers shall be permitted to set up equity joint venture, contractual joint venture and wholly owned enterprises to provide specialty design services in the Mainland.	

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
2. Communication services		
D. Audiovisual Services -Videos, including entertainment software and (CPC83202), distribution services -Sound recording distribution services	(1) No limitation (2) No limitation (3) Unbound except as indicated in the Mainland's WTO commitments.	Chinese language motion pictures produced by production companies in Taiwan which are set up or established in accordance with the relevant laws of Taiwan, and which own more than 50% of the copyright of the motion pictures concerned, may be imported for distribution in the Mainland on a quota-free basis, after vetting and approval by the competent authority of the Mainland. Taiwan residents should comprise more than 50% of the total principal personnel ⁴ in the motion pictures concerned.

⁴ Principal personnel includes personnel performing the roles of director, screenwriter, leading actor, leading actress, supporting actor, supporting actress, producer, cinematographer, editor, art director, costume designer, action choreographer, and composer of the original film score.

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
8. Health Related and Social Services (other than those listed under Professional Services)		
A. Hospital Services (CPC9311)	(1) Unbound (2) Unbound (3) Taiwan service suppliers shall be permitted to set up hospitals with Mainland-Taiwan joint ventures and cooperation in the Mainland and wholly owned hospitals in Shanghai Municipality, Jiangsu Province, Fujian Province, Guangdong Province and Hainan Province of the Mainland. ⁵	

Modes of service supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence

Sector or Sub-sector	Commitments on Market Liberalization	Additional Commitments
11. Transport services		
C. Air Transport Services d. Aircraft repair and maintenance services ⁶ (CPC8868)	(1) Unbound ⁷ (2) No limitation (3) On the basis of the Mainland's commitments upon its accession to the WTO, Taiwan service suppliers are permitted to establish wholly owned or equity joint venture enterprises in the Mainland. The Taiwan service supplier or the principal investor of a group of service suppliers making a joint investment shall be a juridical person.	

⁵ The establishment of such hospitals shall comply with relevant regulations on foreign investment in hospitals of joint ventures, cooperation and wholly-ownership.

⁶ The definition in WTO's GATS Annex on Air Transport Services applies.

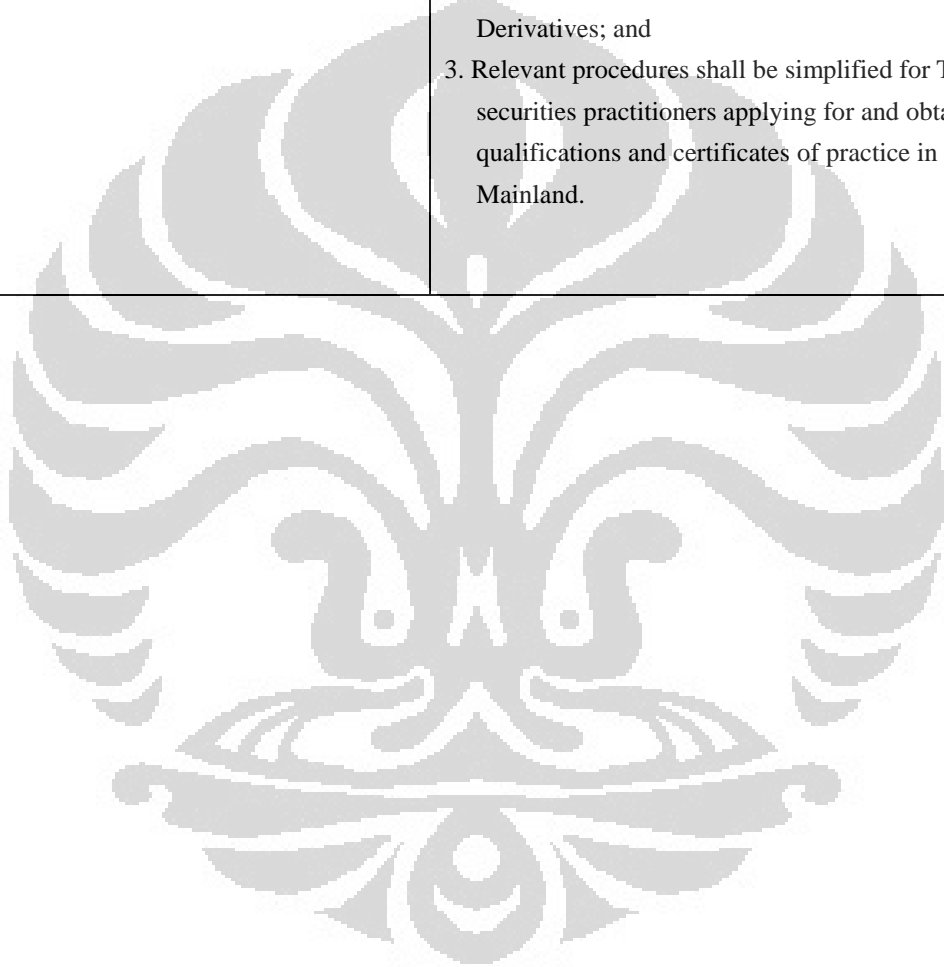
⁷ Unbound due to the lack of technical feasibility.

Commitments of the Mainland Side on Liberalization of Financial Services Sector

Sector	Specific Commitments
Insurance and Insurance –Related Services	Groups formed by Taiwan insurance companies through integration or strategic mergers shall be allowed to apply for entry into the Mainland insurance market with reference to market access conditions for foreign-funded insurance companies (total assets held by the group of over US\$ 5 billion; more than 30 years of establishment experience of any one of the Taiwan insurance companies in the group; and a representative office established in the Mainland for over 2 years by any one of the Taiwan insurance companies in the group).

Sector	Specific Commitments
Banking and Other Financial Services (excluding securities, futures and insurance)	<ol style="list-style-type: none"> 1. For Taiwan banks to set up wholly owned banks or branches (not branches affiliated to a wholly owned bank) in the Mainland with reference to the Regulation on Administration of Foreign-funded Banks, they shall have representative offices in the Mainland for more than one year before application. 2. For the operating branches of Taiwan banks in the Mainland to apply to conduct RMB business, they shall have been operating in the Mainland for more than two years and be profitable in the preceding year before application. 3. For the operating branches of Taiwan banks in the Mainland to apply to conduct RMB business for Taiwan corporates in the Mainland, they shall fulfill the following conditions: they should have been operating in the Mainland for more than one year and been profitable in the preceding year. 4. The operating branches of Taiwan banks in the Mainland may set up special agencies providing financial services to small businesses, the specific requirements of which shall follow relevant rules in the Mainland. 5. Fast tracks shall be established for Taiwan banks applying to set up branches (not branches affiliated to wholly owned banks) in central and western, as well as northeastern regions of the Mainland. 6. In conducting profitability assessment on the branches of Taiwan banks in the Mainland, the relevant authorities shall take into account the overall performance of the Taiwan bank under assessment.

Sector	Specific Commitments
Securities, futures and other related services	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proper facility shall be provided to the qualified Taiwan-funded financial institutions applying for qualification of Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) in the Mainland. 2. Taiwan Stock Exchanges and Taiwan Futures Exchanges shall be included as soon as possible in the List of Overseas Exchanges Recognized by the Mainland for Qualified Domestic Institutional Investors (QDII) to invest in Financial Derivatives; and 3. Relevant procedures shall be simplified for Taiwan securities practitioners applying for and obtaining qualifications and certificates of practice in the Mainland.



Annex V

Definitions of Service Suppliers Applicable to Sectors and Liberalization Measures under the Early Harvest for Trade in Services

The two Parties agree to define Service Supplier⁸ in the service sectors and liberalization measures listed in Annex IV of the Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement (hereinafter referred to as Annex IV) that are beyond their respective World Trade Organization commitments as follows:

1. The service supplier applicable to the sectors and liberalization measures under the Early Harvest for trade in services refers to a natural person or juridical person of one Party that provides services to the other Party.⁹
 - (1) “Natural person of one Party” refers to the natural person that holds the identity certificate of either Party;
 - (2) “Juridical person of one Party” refers to the entity that is constituted in either Party according to its regulations, which includes any company, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship or association (chamber of commerce).
2. A service supplier of one Party that is a juridical person shall simultaneously meet the following conditions:
 - (1) the nature and scope of the services supplied in this Party shall include the nature and scope of the services intended to be supplied in the other Party;¹⁰
 - (2) the following requirements shall be met when engaging in substantive business operation in this Party:
 - a. such a service supplier shall have engaged in business operations with the same nature and scope of services for three consecutive¹¹ years or more as such a supplier intends to provide in the other Party. Among which:
A banking institution of one Party that engages in banking and other financial services (excluding securities, futures and insurance) shall have obtained business license(s) from and registered with the banking supervisory and regulatory authority in this Party, and have been engaging in business operations for five consecutive years or more;
A securities and futures company of one Party that engages in securities, futures and related services shall have obtained business license(s) from and registered with the securities and futures supervisory and regulatory

⁸ Only applicable to service suppliers that will provide services in the mode of commercial presence.

⁹ Excluding branches, representative offices, liaison offices, or other non-juridical institutions.

¹⁰ As to medical service suppliers in Taiwan's side, such suppliers include: (1) juridical-person medical institutions; (2) the founders of medical institutions; (3) the special-purpose companies established by the medical institutions.

¹¹ As to the medical service suppliers in Taiwan's side, the medical institutions provided for in footnote 3 shall comply with this requirement.

authority in this Party, and have been engaging in business operations for five consecutive years or more;

An insurance company of one Party that engages in insurance and related services, shall have obtained business license(s) from and registered with the insurance supervisory and regulatory authority in this Party, and have been engaging in business operations for five consecutive years or more;

- b. such a service supplier shall have been paying income tax in this Party;
- c. such a service supplier shall own or lease business premises in this Party.

3. In order to be qualified to the preferential treatments that are listed in Annex IV and beyond the commitments in the World Trade Organization, the service supplier of one Party shall file an application, accompanied by appropriate documentation and information, with the competent authority or its consigned institutions of such Party, for a Service Supplier Certificate in accordance with the following requirements:

- (1) A natural person service supplier of one Party shall provide identity certificate and other documentation and information deemed necessary by the competent authority or its consigned institutions;
- (2) A juridical person service supplier of one Party shall provide:
 - a. Copy of the registration certificate;
 - b. Copy of the tax payment certificate of the latest three or five years;
 - c. Audited financial statements of the latest three or five years;
 - d. Certificate documents or their copies of business premises ownership or lease;
 - e. Other documentation or their copies that serve to prove the nature and scope of services provided;
 - f. Other documentation or information deemed necessary by the competent authority or its consigned institutions.

4. The competent authority or its consigned institutions of one Party shall issue a Service Supplier Certificate to a service supplier of such Party upon finding that the relevant documents and information submitted by such service supplier pursuant to Item 3 of this Annex conform to the provisions of this Annex.

5. When a service supplier of one Party applies to provide in the other Party the services that are listed in Annex IV and beyond the commitments in the World Trade Organization, such a service supplier shall provide related competent authorities with a valid Service Supplier Certificate as well as documents and information required for the related service sectors involved in the application.

6. The service supplier of one Party that has been providing services in the other Party may apply for a Service Supplier Certificate according to related provisions in this Annex to enjoy the preferential treatments that are listed in Annex IV and beyond the commitments in the World Trade Organization.